

PROF. DR. H. SUFIAN HAMIM, M. Si
Dr. Dra. WIWIK SURYANDARTIWI A, MM



Filsafat Ilmu
**DAN METODOLOGI
PENELITIAN**

**ILMU
SOSIAL**

Editor :
SYARIFAH ERMA YUNA, S.IP

Biografi



PROF. DR. H. SUFIAN HAMIM, M. Si

The first author obtained his Bachelor's degree in Constitutional Law at the Universitas Islam Riau in 1985-1989. He received a Master's degree in Public Administration from the Universitas Padjadjaran in 1992-1994, and obtained a Doctorate Degree in Public Administration from the Universitas Padjadjaran in 1998-2002. He has been a lecturer at the Faculty of Social and Political Sciences at the Universitas Islam Riau since 1990, and a lecturer teaching Public Administration at the Postgraduate Studies of the Universitas Islam Riau since 2007. His current research interests are Public Administration, Strategic Management and Development Planning.

email: sufianhamim@soc.uir.ac.id

SCOPUS ID : <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213145366>

ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0001-5780-2870>



Dr. Dra. Wiwik Suryandartiwi A, MM

The second author obtained the Bachelor Degree from The Communication Study Program of Sebelas Maret State University in Solo, the Master Management in Atmajaya University in Yogyakarta, and the Doctoral Program at Tujuh Belas Agustus (Untag) University in Surabaya.

Now she is Rector of Awal Bros University in Pekanbaru, Indonesia.

email: wiwik@stikesawalbrospekanbaru.ac.id

SCOPUS ID : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091973576&origin=resultslist&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1

Sinopsis

Inti pembahasan buku ini tentang Filsafat Ilmu yang dapat mendukung metodologi penelitian berkisar pada ilmu, Metode Ilmiah, dan Logika Penjelasan Ilmiah sebagaimana yang diartikan oleh Filsafat Ilmu itu sendiri. Tentang Ilmu akan dijelaskan mengenai pengetahuan dan ilmu, sifat-sifat dan asumsi dasar ilmu, dan anatomi/komponen ilmu. Tentang Metode Ilmiah menjelaskan tentang prosedur langkah penjelasan Ilmiah. Tentang logika penjelasan ilmiah akan menjelaskan teknik berfikir induktif-empirik atau deduktif-hipotetik. Hendaknya Filsafat Ilmu ini bersambung dengan metode-metode Penelitian dan Teknik Penelitian, sedemikian rupa sehingga lengkap menjadi satu kesatuan Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian.

**FILSAFAT ILMU DAN
METODOLOGI PENELITIAN
ILMU SOSIAL**

**Prof. Dr. H. Sufian Hamim, M. Si
Dr. Dra. Wiwik Suryandartiwi A, MM**



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**FILSAFAT ILMU DAN METODOLOGI PENELITIAN
ILMU SOSIAL**

Penulis : Prof. Dr. H. Sufian Hamim, M. Si
Dr. Dra. Wiwik Suryandartiwi A, MM

Editor : Syarifah Erma Yuna, S.IP

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-114-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan sedikit pengalaman penulis memberanikan diri untuk menerbitkan buku ini.

Sebagai penulis pemula, tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangannya, terutama dalam menganalisis dan menguraikan Tentang Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial. Demikian pula di sana sini masih banyak kekurangan dalam menjelaskan metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif, tentunya sebagai salah satu kelemahan dalam penulisan buku ini. Oleh karena itu hadirnya buku ini sama sekali tidak diikuti pretensi sebagai buku yang lengkap menguraikan tentang Filsafat Ilmu dan Penelitian Ilmu Ssial. Kepada mereka yang mempunyai pemikiran/gagasan sebagaimana yang penulis kutip dalam isi buku ini penulis mengucapkan terima kasih dengan do'a semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda.

Kekurang sempurnaan pada buku ini pasti tidak terelakkan. Oleh sebab itu semua bentuk saran maupun kritik untuk penyempurnaan buku ini senantiasa kami tunggu. Kepada mereka yang bersedia memberikan saran dan kritik kami sampaikan terima kasih dari hati yang tulus.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Agustus 2022

Penulis,

Prof. Dr. H. Sufian Hamim, M.Si.

dan Dr. Dra. Wiwik Suryandartiwi, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 FILSAFAT ILMU.....	1
BAB 2 ILMU SEBAGAI PENGETAHUAN	3
A. Pengertian Ilmu dan Pengetahuan.....	3
B. Sifat-sifat dan Asumsi Dasar Ilmu.....	5
C. Anatomi / Komponen Ilmu.....	6
1. Alam nyata (Realita).....	7
2. Alam abstrak (general).....	7
D. Ilmu dan Proses Berfikir.....	8
BAB 3 PENELITIAN.....	10
A. Penelitian dan Kebenaran	10
B. Metode Ilmiah.....	11
1. Menetapkan, Merumuskan dan Mengidentifikasi Masalah	17
2. Menyusun Kerangka Pikiran.....	19
3. Merumuskan Hipotesis.....	21
4. Membahas dan Menarik Kesimpulan	33
C. Metode Penelitian	34
BAB 4 KONSEP, TEORI, VARIABEL, DIMENSI, HIPOTESIS DAN PENGUKURAN.....	36
A. Defenisi Teori	37
B. Fungsi Teori.....	40
C. Konsep dan Pengembangannya	52
1. Ciri-ciri konsep	53
D. Variabel dan Dimensi	62
E. Pengembangan Hipotesis.....	63
F. Defenisi Operasional, Indikator, dan Pengukuran	66
G. Pengembangan Instrumen Penelitian	69
DAFTAR PUSTAKA	70
TENTANG PENULIS.....	75
LAMPIRAN	77

BAB

1

FILSAFAT ILMU

Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat. Pembahasan filsafat ilmu berkisar pada: ontologi, yaitu hakekat ilmu pengetahuan; epistemologi, yaitu pencarian/penemuan ilmu pengetahuan; dan aksiologi, yaitu: manfaat ilmu pengetahuan.

Filsafat Ilmu berbeda dengan filsafat. Tetapi keduanya sulit untuk dipisahkan. Filsafat merupakan dasar bagi Filsafat Ilmu. Filsafat bersangkutan dengan pengetahuan, sedangkan Filsafat Ilmu bersangkutan dengan ilmu (sain). Ilmu adalah pengetahuan tetapi tidak semua ilmu pengetahuan adalah ilmu. Dengan demikian jelas berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan.

Sebagai studi antara filsafat dan Filsafat Ilmu dibedakan menurut bidang kajiannya. Untuk memahami perbedaan kajiannya dapat dilihat dari pengertian masing-masing.

Filsafat (falsafi : Arab) adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi mengenai sebab-sebab, azas-azas, hukum-hukum dan sebagainya dari segala sesuatu yang ada di alam semesta, atau mengenai kebenaran dan arti penting tentang adanya sesuatu. Sedangkan Filsafat Ilmu diartikan sebagai *analisis prosedur-prosedur dan logika tentang penjelasan ilmiah (keilmuan)*.

Penelitian adalah *upaya (kegiatan) membangun ilmu, yang dilakukan tidak dengan semena-mena, melainkan dengan melalui prosedur-prosedur dan menggunakan metode-metode tertentu, yang dilakukan secara sistematis*. Prosedur-prosedur sistematis itu menunjuk kepada Filsafat Ilmu, sedangkan metode-metode tertentu yang sistematis menunjuk kepada metodologi. Dengan

demikian, untuk dapat memahami dan melakukan penelitian itu, selain harus *menguasai metodologinya juga harus menguasai Filsafat Ilmunya*. Oleh karena itu pula biasanya Metodologi Penelitian tidak dapat dipisahkan dari Filsafat Ilmu.

Inti pembahasan Filsafat Ilmu dalam tulisan ini, yang dapat mendukung metodologi penelitian berkisar pada ilmu, Metode Ilmiah, dan Logika Penjelasan Ilmiah sebagaimana yang diartikan oleh Filsafat Ilmu itu sendiri. Tentang Ilmu akan dijelaskan mengenai pengetahuan dan ilmu, sifat-sifat dan asumsi dasar ilmu, dan anatomi/komponen ilmu. Tentang Metode Ilmiah menjelaskan tentang prosedur langkah penjelasan Ilmiah seperti : *menetapkan, merumuskan, mengidentifikasi, merumuskan, menyusun pendekatan masalah/ kerangka pikiran/ kerangka teoritis/ konsep teoritis, menyusun hipotesis, menguji hipotesis, pembahasan faktual dan penarikan kesimpulan teoritis*.

Tentang logika penjelasan ilmiah akan menjelaskan teknik berfikir induktif-empirik atau deduktif-hipotetik. Sebenarnya logika ini termasuk dalam metode ilmiah yang bersangkutan dengan perumusan hipotesis (deduktif-hipotetik : berfikir deduktif untuk menarik kesimpulan hipotesis) dan pengujian hipotesisnya (induktif-empirik : berfikir induktif untuk menyatakan proposisi hipotesis menjadi fakta).

Hendaknya Filsafat Ilmu ini bersambung dengan metode-metode Penelitian dan Teknik Penelitian, sedemikian rupa sehingga lengkap menjadi satu kesatuan Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian.

BAB 2

ILMU SEBAGAI PENGETAHUAN

A. Pengertian Ilmu dan Pengetahuan

Seperti telah dikatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Jika demikian ada pengetahuan yang tidak merupakan ilmu. Jadi pengetahuan mana yang merupakan ilmu itu ? Untuk menjawabnya perlu diketahui tentang pengertian-pengertian dari pengetahuan dan ilmu itu. Pengertian-pengertian itu adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan (*knowledge*) adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai sebab-akibat (kausalitas) yang hakiki dan universal.
2. Ilmu (*science*) adalah akumulasi pengetahuan yang menjelaskan hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang hakiki dan universal, dari suatu obyek menurut metode-metode tertentu yang merupakan satu kesatuan sistematis.

Dari kedua pengertian itu jelas bahwa pengetahuan bukan hanya ilmu, pengetahuan merupakan bahan bagi ilmu.

Pengetahuan atau “*knowledge*” merupakan sesuatu yang dikejar manusia untuk memenuhi keingintahuannya (*curiosity*). Maka lahirlah “*folk-wisdom*” (kearifan rakyat) antara lain dituangkan dalam bentuk pepatah petitih, peribahasa, perumpamaan dan sebagainya. Dapat dilihat bahwa di dalamnya terdapat keterangan tentang apa maupun hubungan sebab-akibat (kausalitas), misalnya :

“Bila tiada rotan, akarpun berguna (subtitusi)”,
“Bila tiada elang, belalang adalah elang (subtitusi)”,
“Air beriak tanda tak dalam (indikator, juga kausalitas)”,
“Barang siapa menggali lubang, ia sendiri terperosok ke dalamnya (kausalitas).

Lebih jauh dikatakan bahwa ilmu (science) adalah pengetahuan keilmuan yang diperoleh dari pengetahuan melalui metode ilmu ditandai dengan presisi (tingkat ketepatan), baik tentang apa maupun tentang mengapa (kausalitas), sehingga menetapkan mana yang kausalitas, mana yang kausalitas, misalnya; karena banyak burung bangau maka banyak isteri nelayan yang hamil (itu tidak berarti bahwa bayi dibawa oleh burung bangau), hubungan burung bangau dengan isteri nelayan hamil itu merupakan hubungan yang kabur (spurious correlation). Dengan demikian pula dikatakan bahwa hasil-hasil kegiatan keilmuan merupakan alat meramalkan (prediksi) dan mengendalikan (control) gejala-gejala alam. Hal ini mudah dimengerti karena pengetahuan keilmuan (ilmu) merupakan sari penjelasan tentang kejadian-kejadian di alam yang bersifat umum dan impersonal.

Perbedaan antara pengetahuan keilmuan dengan pengetahuan lainnya, misalnya seni dan agama, dapat dilihat dari upaya-upaya memperolehnya. Pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

Gejala-gejala yang terdapat di alam semesta ini ditangkap oleh manusia melalui panca inderanya, bahkan ada pula yang ditangkap oleh indera keenamnya (extra cencory) yaitu berupa intuisi. Segala yang ditangkap indera-inderanya itu dimasukkan pikiran dan perasaannya. Dengan segala keyakinan atau kepercayaannya ditariklah kesimpulan-kesimpulan yang banar ini dijadikan pengetahuannya (ilmu, seni dan agama itu). Dalam upaya memperoleh pengetahuan itu dapat dibedakan antara upaya yang bersifat aktif dan pasif.

Upaya aktif yaitu berupa upaya dengan mempergunakan penalaran pikiran dan perasaan. Sedangkan upaya pasif yaitu upaya dengan mempergunakan keyakinan

atau kepercayaan terhadap kebenaran sesuatu yang diwartakan (misalnya wahyu Tuhan melalui Nabi/Rasul atau ilmu dan pengetahuan lainnya).

Baik secara aktif maupun secara pasif, keyakinan atau kepercayaan itu memegang peranan penting. Bedanya adalah bahwa kesimpulan yang benar yang diperoleh melalui alur penalaran pikiran (secara aktif) adalah bersifat logis dan analitis, sedangkan yang diperoleh melalui perasaan (pasif) dilandaskan pada empathy, adalah meletakkan perasaan pada "obyek" yang ingin diketahui atau dimengertinya itu, hal ini terdapat pada seni, agama dan kepercayaan.

Maka dengan demikian, melalui ilmu diperoleh pengetahuan tentang suatu obyek itu dari luar, artinya kita sebagai pengamat berusaha mengerti dari kaca mata kita selaku orang luar, sedangkan melalui agama, seni, kepercayaan yang berlandaskan empathy itu, berarti kita berusaha memahami dari dalam.

Dari uraian di atas dapatlah diketahui tentang kedudukan ilmu dalam pengetahuan dan perbedaan ilmu dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Keterangan lain menyatakan bahwa upaya aktif untuk memperolehnya pengetahuan keilmuan, itu tidak dilakukan dengan semena-mena, melainkan menurut aturan-aturan atau metode-metode dan teknik-teknik tertentu. Upaya semacam ini disebut penyelidikan (*inquiry*), baik empirik maupun non-empirik. Secara empirik dapat dilakukan dengan mempergunakan prinsip-prinsip pengamatan (*observation*).

B. Sifat-sifat dan Asumsi Dasar Ilmu

Seperti telah disinggung bahwa ilmu dapat menjelaskan / menerangkan segala yang ada di alam semesta. Maka sebagai sifat dari ilmu adalah :

- a. Bahwa ilmu adalah menjelajah dunia empirik tanpa batas, sejauh mana dapat ditangkap oleh indera manusia. Naumn, oleh karena kemampuan indera manusia terbatas, maka sebagai sifat kedua dari ilmu;

- b. Bahwa tingkat kebenaran yang dicapainya adalah relatif atau tidak sampai kepada tingkat kebenaran yang mutlak;
- c. Bahwa ilmu menemukan proposisi-proposisi (ungkapan yang terdiri dari dua variabel atau lebih menyatakan kausalitas) yang teruji secara empirik.

Sebagai asumsi dasar dari ilmu sehubungan dengan ketiga sifatnya itu bahwa pertama, adalah bahwa dunia itu ada (manipulable), sebagai asumsi kedua adalah percaya kepada kemampuan indera manusia yang menangkap fenomena-fenomena itu. Asumsi dasar ketiga, adalah bahwa fenomena-fenomena yang terjadi di dunia "manipulable" itu berhubungan satu sama lain.

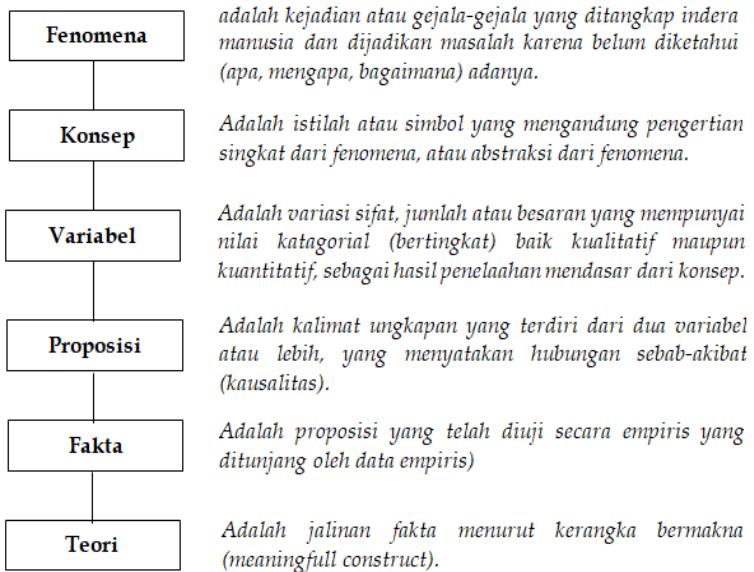
Lebih lanjut diterangkan, sehubungan dengan asumsi dasar ketiga itu, bahwa ilmu merupakan "belief sistem", artinya ilmu itu kebenarannya didasarkan kepada keyakinan atau kepercayaan, meskipun kebenarannya bersifat relatif. Selain itu dikatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang sistematis, atau ilmu itu merupakan sistem. Dengan demikian jelas bahwa ilmu mempunyai unsur-unsur sistematis yang berupa tindakan-tindakan fungsional, seperti merumuskan masalah, mengamati dan mendeskripsi, menjelaskan atau menerangkan dan meramalkan serta mengontrol gejala-gejala yang terjadi di alam semesta ini. Sedangkan unsur-unsur yang membangun ilmu, merupakan komponen dari anatomi ilmu.

C. Anatomi / Komponen Ilmu

Anatomi atau komponen ilmu dibangun dari realita alam semesta. Dikatakan bahwa komponen-komponen itu merupakan aspek dinamis dari perwujudan ilmu yang bersifat abstrak tetapi (berlaku umum). Komponen-komponen itu seolah-olah perkembangan dari alam konkret (realita) sampai pada alam abstrak (ilmu). Komponen yang menjembatannya itu adalah : fenomena, konsep, dan atau variabel, proposis, fakta dan teori. Penjelasan-penjelasan setiap komponen, disajikan pada bagan skematis dibawah ini :

1. Alam nyata (Realita)

(sebagai pengetahuannya)



2. Alam abstrak (general)

(sebagai ilmu)

dari berbagai skematis di atas dapat diuraikan bahwa fenomena yang ditangkap oleh indera manusia dari alam nyata itu diabstraksikan pada *konsep-konsep* (fenomena menyumbangkan ide, materi, atau tenaga pada suatu kegiatan bagi kepentingan umum diabstraksikan kepada *konsep partisipasi*, proses penemuan cara-cara baru dalam pembangunana, diabstraksikan dalam konsep "motivasi" dan sebagainya).

Penelaahan mendasar dari *konsep-konsep* itu akan sampai pada *variabel-variabel* (yaitu variasi sifat, jumlah atau besaran yang bernilai kategorial). Jika variabel-variabel (dua variabel atau lebih) digolongkan penentu (determinant) dan golongan yang ditentukan (*result*), kemudian dihubungkan (korelasi atau "relationship") terjalin ungkapan atau kalimat yang menyatakan hubungan sebab-akibat, hal ini disebut *proposisi*. Proposisi itu merupakan kesimpulan

penalaran pikiran, yang tingkat kebenarannya masih sementara (hipotesis). Jika proposisi teruji secara (dengan data) empiris maka proposisi hipotesis itu menjadi fakta. Jalinan fakta dalam kerangka penuh arti atau makna (*meaningfull construct*) disebut teori. Teori-teori inilah sebenarnya yang merupakan *ilmu* (*ingat*, bahwa ilmu penuh dengan teori-teori). Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa teori itu adalah seperangkat konsep-konsep dan atau variabel-variabel dari suatu fenomena, dan proposisi-proposisi yang berhubungan satu sama lain yang tersusun secara sistematis, dan bertujuan dapat menjelaskan atau menerangkan (*explanation*) dan meramalkan (*prediction*) ataupun mengendalikan (*control*) fenomena-fenomena itu. Kesimpulan teori ini adalah ilmu yang bersifat general (berlaku umum) dan abstrak.

D. Ilmu dan Proses Berfikir

Ilmu atau “sains” adalah pengetahuan tentang fakta-fakta, baik natural atau sosial yang berlaku umum dan sistematis.

Ilmu lahir karena manusia diberkahi Tuhan suatu sifat ingin tahu. Keingintahuan seseorang terhadap permasalahan disekelilingnya dapat menjurus kepada keingintahuan ilmiah.

Menurut Tan (dalam Nazir, 1985) berpendapat bahwa ilmu bukan saja merupakan suatu himpunan pengetahuan yang sistematis, tetapi juga merupakan suatu metodologi. Ilmu menemukan materi-materi ilmiah serta memberikan suatu rasionalisasi sebagai hukum alam. Ilmu membentuk kebiasaan serta meningkatkan keterampilan observasi, percobaan (eksperimen), klasifikasi, analisa serta membuat generalisasi. Dengan adanya keingin tahuan manusia yang terus menerus, maka ilmu akan terus berkembang dan membantu kemampuan persepsi serta kemampuan berfikir secara logis, yang disebut penalaran.

Konsep antara ilmu dan berfikir adalah sama. Dalam memecahkan masalah keduanya dimulai dari adanya sangsi

dan kebutuhan akan suatu hal yang bersifat umum. Kemudian timbul suatu pertanyaan yang khas, dan selanjutnya dipilih suatu pemecahan tentatif untuk penyelidikan.

Proses berfikir suatu refleksi yang teratur dan hati-hati. Proses berfikir lahir dari suatu sangsi akan sesuatu dan keinginan untuk memperoleh suatu ketentuan yang kemudian tumbuh menjadi suatu masalah yang khas. Masalah ini memerlukan suatu pemecahan, dan untuk ini dilakukan penyelidikan terhadap data yang tersedia dengan metode yang tepat. Akhirnya, sebuah kesimpulan tentatif akan diterima, tetapi masih tetap di bawah penyelidikan yang kritis dan terus menerus untuk mengadakan evaluasi secara terbuka.

Menurut Dewey (dalam Nazir, 1985) proses berfikir dari manusia normal mempunyai urutan sebagai berikut :

1. Timbul rasa sulit, baik dalam bentuk adaptasi terhadap alat, sulit mengenal sifat, ataupun dalam menerangkan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba.
2. Kemudian rasa sulit tersebut diberi defenisi dalam bentuk permasalahan.
3. Timbul suatu kemungkinan pemecahan yang berupa reka-reka, hipotesis, inferensi atau teori.
4. Ide-ide pemecahan diuraikan secara rasional melalui pembentukan implikasi dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti (data).
5. Menguatkan pembuktian tentang ide-ide di atas dan menyimpulkannya baik melalui keterangan-keterangan ataupun percobaan-percobaan.

Pada hakekatnya, berfikir secara ilmiah merupakan gabungan antara penalaran secara deduktif dan induktif. Masing-masing penalaran ini berkaitan erat dengan rasionalisme dan atau empirisme. Induksi merupakan cara berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Sedangkan cara berfikir yang berpangkal dari pernyataan yang bersifat umum, dan dari sini ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Berfikir secara demikian dinamakan berfikir secara deduktif.

BAB

3

PENELITIAN

A. Penelitian dan Kebenaran

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. *Research* berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali” dan “to search” yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya dari *research* adalah *research* mencari kembali.

Menurut kamus Webster’s New Internasional, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu.

Parsons (dalam Nazir, 1985) penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.

Bagaimana hubungan antara penelitian, ilmu dan kebenaran ? penelitian dan ilmu adalah sama-sama proses, sehingga penelitian dan ilmu adalah proses menghasilkan kebenaran (*truth*).

Kebenaran yang diperoleh melalui penelitian terhadap fenomena yang fana adalah suatu kebenaran yang telah ditemukan melalui proses ilmiah, karena penemuan tersebut dilakukan secara ilmiah. Namun ada juga kebenaran terhadap fenomena yang fana dapat diterima tidak melalui proses penelitian, misalnya secara kebetulan, secara *common sense* (akal sehat), melalui wahyu, secara intuitif, secara trial dan error, spekulasi, dan juga karena kewibawaan.

Umumnya, suatu kebenaran ilmiah dapat diterima dikarenakan oleh tiga hal, yaitu :

1. Adanya koheren (konsisten), yaitu :
Suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren/konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar;
2. Adanya koresponden (berhubungan), yaitu :
Suatu pernyataan dianggap benar, jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan atau mempunyai korespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut;
3. Pragmatis, yaitu :
Suatu pernyataan dianggap benar karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis.

B. Metode Ilmiah

Metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan *pengetahuan* atau *ilmu* itu. Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis jika metode ilmiah ini disangkutkutan dengan anatomi/ komponen ilmu, maka metode ilmiah adalah proses mendapatkan komponen-komponen.

Menurut M Nazir (1985) Metode Ilmiah dalam meneliti mempunyai kriteria serta langkah-langkah tertentu dalam bekerja, seperti tertera pada skema dibawah ini :

Metode Ilmiah/ Alamiah

Kriteria	Langkah-langkah
1. Berdasarkan fakta	1. memilih dan mendefenisikan masalah
2. bebas dari prasangka	2. Survei terhadap data yang tersedia
3. menggunakan prinsip-prinsip analisis	3. Memformulasikan hipotesis
4. menggunakan hipotesis	4. Membangun kerangka analisis
5. Menggunakan ukuran objektif	5. Mengumpulkan data primer serta alat-alat dalam menguji hipotesis
6. Menggunakan teknik kuantifikasi	6. mengolah, menganalisis dan membuat interpretasi.
	7. Membuat generalisasi dan kesimpulan
	8. Membuat laporan

Kriteria Metode Ilmiah/ Alamiah :

1. Berdasarkan fakta, yaitu keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang akan dikumpulkan dan yang dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Janganlah penemuan atau pembuktian didasarkan pada daya khayal, kira-kira, legenda-legenda atau kegiatan sejenis.
2. Bebas dari prasangka, yaitu metode ilmiah harus mempunyai sifat bebas prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif. Menggunakan suatu fakta haruslah dengan alasan dan bukti yang lengkap dan dengan pembuktian yang objektif.
3. Menggunakan prinsip analisis, yaitu dalam memahami serta memberi arti terhadap fenomena yang kompleks, haruslah

digunakan prinsip analisis. Semua masalah harus dicari sebab-musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis. Fakta yang mendukung tidaklah dibiarkan sebagaimana adanya atau hanya dibuat deskripsinya saja. Tetapi semua kejadian harus dicari sebab-akibat dengan menggunakan analisis yang tajam.

4. Menggunakan Hipotesis, yaitu dalam metode ilmiah peneliti harus dituntun dalam proses berfikir dengan menggunakan hipotesis. Hipotesis harus ada untuk menggonggokkan persoalan serta memandu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Hipotesis merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran peneliti.
5. Menggunakan ukuran objektif, yaitu kerja penelitian dan analisis harus dinyatakan dengan ukuran yang objektif. Ukuran tidak boleh dengan merasa-rasa atau menuruti hati nurani. Pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara objektif dan dengan menggunakan pikiran yang waras.
6. Menggunakan Teknik Kuantifikasi, yaitu dalam mempermalukan data ukuran kuantifikasi yang lazim harus digunakan, kecuali untuk atribut-atribut yang tidak dapat dikuantifikasikan. Ukuran-ukuran, seperti ton, meter, detik, km, kilogram, dan sebagainya harus selalu digunakan. Jauhilah ukuran seperti sejauh mata memandang, dan sebagainya. Tingkat pengukuran biasanya nominal, ordinal, interval dan rasio.

Penelitian dengan menggunakan metode-metode ilmiah sekurang-kurangnya dilakuakn dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merumuskan serta mendefenisikan masalah, yaitu langkah pertama dalam meneliti adalah menetapkan masalah yang akan dipecahkan. Untuk menghilangkan keraguan, masalah tersebut didefenisikan secara jelas. Sampai kemana luas masalah yang akan dipecahkan. Sebutkan beberapa kata kunci yang terdapat dalam masalah. Misalnya, masalah

yang dipilih adalah: Bagaimana pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja. Berikan definisi tentang motivasi, dalam bentuk apa motivasinya, tentang produktivitas kerja dan sebagainya.

2. Mengadakan studi kepustakaan, yaitu mencari data yang tersedia yang pernah ditulis peneliti atau orang lain sebelumnya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kerja mencari bahan di perpustakaan merupakan hal yang yang tak dapat dihindarkan oleh seorang peneliti. Ada kalanya, perumusan masalah dan studi kepustakaan dapat dikerjakan bersamaan.
3. Memformulasikan hipotesis, yaitu setelah diperoleh informasi mengenai hasil penelitian lain yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang ingin dipecahkan, maka tiba saatnya peneliti memformulasikan hipotesis-hipotesis untuk penelitian. Hipotesis tidak lain dari kesimpulan sementara tentang hubungan sangkut-paut antar variabel atau fenomena dalam penelitian. Hipotesis merupakan kesimpulan tentatif yang diterima secara sementara sebelum diuji.
4. Menentukan model untuk menguji hipotesis, yaitu merumuskan cara-cara untuk menguji hipotesis tersebut. Pada ilmu-ilmu sosial yang telah berklembang, seperti ilmu ekonomi misalnya, pengujian hipotesis didasarkan pada kerangka analisis yang telah ditetapkan. Dapat pula diuji dengan teknik statistik. Data yang dikumpulkan bisa saja data primer ataupun data sekunder yang akan dikumpulkan oleh peneliti.
5. Mengumpulkan data, yaitu peneliti mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. Data tersebut yang merupakan fakta yang digunakan untuk menguji hipotesis perlu dikumpulkan. Bergantung dari masalah yang dipilih serta merode penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan data akan berbeda-beda. Jika penelitian akan menggunakan metode percobaan, data diperoleh dari plot-plot percobaan yang dibuat sendiri. Pada metode sejarah

ataupun survei normatif, data diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, baik secara langsung ataupun dengan menggunakan kuesioner. Ada kalanya data adalah hasil pengamatan langsung terhadap perilaku manusia di mana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok orang-orang yang diselidikinya.

6. Menyusun, menganalisa dan memberikan interpretasi, yaitu peneliti menyusun data untuk mengadakan analisis. Sebelum analisis dilakukan, data tersebut disusun lebih dahulu untuk membuat coding untuk analisis dengan komputer. Sesudah data dianalisis, maka perlu diberikan tafsiran atau interpretasi terhadap data tersebut.
7. Membuat generalisasi dan kesimpulan, yaitu setelah tafsiran diberikan, maka peneliti membuat generalisasi dari penemuan-penemuan, dan selanjutnya memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan dan generalisasi ini harus berkaitan dengan hipotesis. Apakah hipotesis benar untuk diterima, atukah hipotesis tersebut ditolak. Apakah hubungan antara fenomena yang diperoleh akan berlaku secara umum atukah hanya berlaku pada kondisi khusus saja. Saran-saran apa yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan bagaimana implikasinya untuk kebijakan.
8. Membuat laporan ilmiah, yaitu langkah akhir dari suatu penelitian ilmiah adalah membuat laporan ilmiah tentang hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Peneliti menyusun outline dari penelitiannya, outline penelitian berjenis-jenis bentuknya, tergantung dari kebutuhan atau tradisi suatu lembaga atau perguruan tinggi tersebut.

Sedangkan pendapat lain garis besar langkah-langkah sistematis itu adalah sebagai berikut :

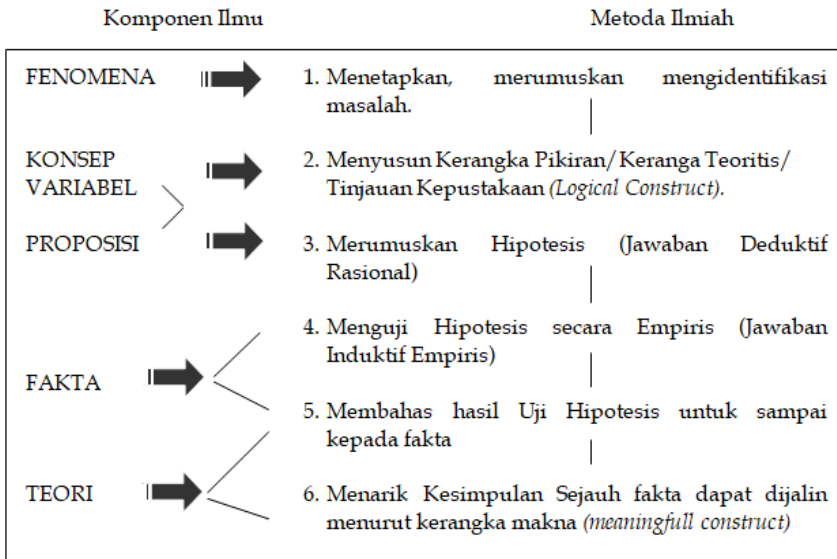
1. *Menetapkan, merumuskan dan mengidentifikasi masalah.*
2. *Menyusun Kerangka Pikiran (logical construct) kerangka teoritis.*
3. *Merumuskan Hipotesis (jawaban rasional terhadap masalah).*
4. *Menguji hipotesis secara empirik (jawaban empiris).*
5. *Membahas jawaban rasional dengan jawaban empiris.*

6. Menarik kesimpulan.

Dari enam langkah *metode ilmiah* itu, tiga langkah pertama merupakan *pengkajian rasional*, sedangkan tiga langkah berikutnya merupakan *pengkajian rasional*, sedangkan tiga langkah berikutnya merupakan *pengkajian empiris*. Pengkajian rasional itu disebut pula *pengkajian deduktif*; dan pengkajian empiris disebut pula *pengkajian induktif*. Pengkajian rasional atau pengkajian deduktif dan pengkajian empiris atau pengkajian induktif itu harus dibahas secara tersendiri sebagai *refleksi thinking*.

Telah dikatakan bahwa metode ilmiah itu merupakan proses mendapatkan komponen-komponen ilmu dalam membangun ilmu, maka hal ini menunjuk pada adanya kesejajaran antara komponen ilmu dengan metode ilmiah. kesejajarannya digambarkan sebagai berikut :

KESEJAJARAN ANTARA METODE ILMIAH DAN KOMPONEN-KOMPONEN ILMU PENGETAHUAN



Bagaimana proses-proses pikiran yang terjadi dalam setiap langkah metode ilmiah itu ? Artinya, bagaimana cara *menetapkan merumuskan dan mengidentifikasi masalah itu*; bagaimana merumuskan hipotesis itu; bagaimana membuat

pembahasan itu; dan bagaimana menarik kesimpulan itu semuanya akan dijelaskan pasal demi pasal.

1. Menetapkan, Merumuskan dan Mengidentifikasi Masalah

Tiga hal yang dipikirkan pada tahap pertama metode ilmiah ini yaitu *menetapkan masalah, merumuskan masalah dan akhirnya, mengidentifikasi masalah.*

a. Menetapkan Masalah

Menetapkan masalah yaitu menetapkan masalah apa yang akan dijadikan objek pengkajiannya. Menetapkan objek kajian saja masih belum spesifik, hal itu baru menetapkan pada ruang lingkup mana pengkajian yang akan dilakukan/bergerak. Penetapan masalahnya mulai dengan *menangkap kesenjangan antara realita dengan harapan-harapan* yang telah menjadi fakta ataupun teori-teori yang telah ada. Sedemikian rupa sehingga apa yang ditangkap itu tidak dapat dijelaskan secara sempurna, baik oleh kewajaran-kewajaran oleh teori-teori yang telah ada itu.

Cara yang paling sederhana untuk *menangkap masalah* ini melalui data sekunder. Dari data itu dapat diketahui tentang sesuatu keadaan dari padanya apakah dijumpai adanya kesenjangan jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan, kewajaran-kewajaran ataupun teori-teori yang telah ada. Data sekunder yang dapat digunakan bagi penetapan masalah adalah data sekunder yang telah dianggap mempunyai data yang kuat, sedemikian rupa sehingga benar-benar menggambarkan realita sebenarnya. Wujud masalah yang dapat ditetapkan dari yang bersifat teoritis adalah sebagai berikut :

- 1) Belum menemukan unsur-unsur, ciri-ciri dan sifat-sifat suatu fenomena.
- 2) Belum mengetahui keadaan beberapa unsur, ciri dan sifat suatu fenomena, pada situasi yang sama ataupun pada situasi yang berbeda-beda.

- 3) Belum dapat menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi.
- 4) Meragukan suatu teori yang telah ada :
 - a) mungkin dalam hal proses perwujudannya.
 - b) melihat “linkage” (ketegasan) dari proposisi suatu teori dengan maksud memperbaikinya.
 - c) melihat ketidak eratan hubungan variabel-variabel dalam proposisinya.
 - d) menilai “informative value” dari proposisi teori.
 - e) dan sebagainya, yang tidak dapat dijelaskan dengan teori yang telah ada, atau belum dapat dijelaskan secara sempurna.
- 5) Belum dapat menemukan metode atau cara untuk mencapai suatu tujuan.

b. Merumuskan Masalah

Setelah masalah yang akan dikaji ditetapkan, kemudian dirumuskan dalam bentuk *pertanyaan penelitian* (research question), yaitu pertanyaan terhadap mana belum ditemukan, atau belum dapat dijelaskan secara memuaskan berdasarkan teori (hukum/dalil) yang ada. Misalnya masalah yang ditetapkan itu berupa keadaan sebagai berikut : menurut teori tidak semua orang bersedia menerima suatu inovasi, sebab ada golongan penolak inovasi (yang disebut laggard), tetapi pada kenyataannya ada inovasi yang mudah diterima, sehingga semua orang dapat menerima dan menerapkan inovasi itu. Maka rumusan masalah atau pertanyaan penelitian berbunyi “Pada situasi atau kondisi mana tidak ada golongan penolak inovasi (laggard) itu”. Perumusan ini biasanya bersifat umum yang bersifat tidak jelas atau tidak tegas; terutama jika masalah itu bersifat kompleks, sehingga sulit bagi operasionalisasi pekerjaan selanjutnya masalah yang telah dirumuskan itu perlu diidentifikasi secara jelas dan tegas.

c. Mengidentifikasi Masalah

Seperti telah dikatakan bahwa mengidentifikasi masalah adalah mempertegas masalah yang telah dirumuskan, yang pertanyaannya bersifat umum (*Problem Statement*) itu. Seperti misal perumusan masalah diatas “Pada situasi atau kondisi mana tidak ada golongan penolak inovasi (*laggard*)”, ada yang tidak jelas dan tegas yaitu situasi atau kondisi yang berhubungan dengan penerapan inovasi, padahal terbatas, misalnya keadaan fisik suatu desa, keadaan sosial desa dan keadaan ekonomi masyarakat desa. Jadi paling tidak, ada tiga hal yang memperjelas dan mempertegas situasi dan kondisi itu. Identifikasi masalah ini pun dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (*Problem Questions*) butir demi butir, misalnya tadi :

- 1) Bagaimana keadaan fisikdesa mendukung untuk penerapan inovasi pertanian.
- 2) Adakah hubungan antara keadaan sosial masyarakat desa dengan penerapan inovasi pembangunan.
- 3) Apakah keadaan ekonomi masyarakat desa mempengaruhi penerapan inovasi pembangunan.

2. Menyusun Kerangka Pikiran

Masalah yang telah diidentifikasi itu dicoba dijawab secara rasional dengan mengalirkan alur pikiran menurut kerangka logis (*logical construst*). Hal ini tidak lain dari menduduk perkarakan masalah yang diidentifikasi (masalah-masalah yang akan dijawab) itu pada kerangka teoritis yang relevan dan mampu menangkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah itu. Cara berfikir kearah itu adalah dengan berfikir deduktif. Cara berfikir ini bertlak dari teori yang bersifat umum (*general*) kepada hal-hal yang bersifat khusus (*spesifik*), atau analisis teoritis (dalil, kaidah, hukum) kepada unsur-unsurnya yang membangun teori yang dipakai titik tolak berpikir itu.

Telah dikatakan bahwa teori (dalil, kaidah, hukum) itu tidak lain adalah jalinan fakta menurut kerangka

bermakna (*meaningfull construct*). Sedangkan fakta adalah proposisi yang telah teruji secara empirik. Proposisi adalah ungkapan yang terdiri dari variabel-variabel yang menyatakan hubungan sebab akibat. Variabel adalah hasil penelaahan mendasar dari konsep-konsep. Sedangkan konsep-konsep itu merupakan abstraksi dari fenomena. Jadi analisis teoritis itu adalah penguraian teori yang menjadi titik tolak berfikir untuk menjawab masalah penelitian, kepada konsep-konsep yang mengabstraksikan fenomenanya. Pekerjaan menguraikan teori sampai kepada konsep-konsepnya itu disebut tahap "*conceptioning*".

Sampai kepada tahap "*conceptioning*" ini berfikir deduktif belum selesai. Selanjutnya adalah tahap "*judgement*" yaitu menduduk perkarakan masalah penelitian pada teori tadi. Menduduk perkarakan ini dimulai dengan menghubungkan konsep-konsep (dan atau variabel-variabel) yang terdapat pada masalah dengan konsep-konsep hasil "*conceptioning*", maka tahap selanjutnya adalah tahap "*reasoning*" (*argumentation*). Tahap ini tidak lain adalah tahap mempertimbangkan duduk perkara itu untuk ditarik kesimpulannya (*conclusin or consepience*), dengan berpegang kepada hukum deduktif, yaitu : segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula pada hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, jika sesuatu yang khusus itu benar-benar merupakan bagian yang umum.

Kesimpulan yang ditarik merupakan deduksi, berdasarkan pada prinsip logika, yang mempergunakan silogisme yang terdiri dari dua premis, premis mayor dan premis minor, dan satu kesimpulan (konsekuen). Premis mayor itu merupakan hasil "*conceptioning*"; sedangkan premis minor adalah hasil dari *judgement*; dan kesimpulan (konsekuensi) itu adalah hasil "*reasoning*" (*argumentation*).

Langkah-langkah menyusun kerangka pikiran itu dapat dibagankan sebagai berikut :

Tahap “Conceptioning” (Menentukan Premis Mayor)	Menguraikan teori (teori-teori) yang dipakai landasan berpikir kepada konsep-konsep umum. Menguraikan masalah penelitian kepada konsep-konsep khusus.
Tahap “Judgement” (Menentukan Premis Minor)	Mendudukan konsep-konsep khusus pada konsep-konsep umum, sehingga benar bahwa konsep khusus merupakan bagian/kelas/unsur dari konsep umum itu.
Tahap “reasoning” (Menentukan Kesimpulan atau Konsekuensi)	Menyatakan bahwa hal-hal yang berlaku pada teori-teori itu berlaku pula bagi hal-hal yang khusus pada masalah penelitian (masalah terjawab secara rasional).

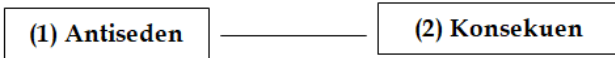
Menyusun kerangka pikiran dengan berfikir deduktif yang mempergunakan prinsip-prinsip logika beserta silogismenya itu harus sangat berhati-hati, mengingat cara tersebut penuh persyaratan-persyaratan. Jika persyaratan-persyaratan itu tidak terpenuhi maka kesimpulan-kesimpulan pikiran itu tidak akan sampai pada kebenaran rasional yang sebenarnya.

3. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis adalah hasil deduktif dari kerangka pikiran yang berbentuk proposisi. Sedangkan *merumuskan hipotesis* tidak lain adalah menyusun proposisi. Menyusun proposisi itu sebenarnya harus penuh ketelitian dan ketekunan, karena harus memenuhi tiga syarat (persyaratan). Tiga syarat yang diminta oleh proposisi ini sebenarnya gambaran dari tiga langkah yang dikerjakan dalam menyusun kerangka pikiran. Ketiga syarat dari proposisi itu bentuk hubungan, ketegasan hubungan variabel (*linkage*) dan nilai informatif hubungan variable (*informative value*). Bentuk hubungan variable dan ketegasan hubungan variable itu

sudah dilakukan pada langkah/tahap “*conceptioning*” dan langkah/tahap “*judgement*”. Sedangkan nilai informatif dari hubungan variable itu dilakukan pada tahap “*judgement*” dan langkah/tahap “*reasoning*”. Konsekuensi/kesimpulan deduksi itu adalah proposisinya.

Secara utuh proposisi dengan memperhatikan syarat-syarat itu kalimat/ unungkapannya terdiri dari tiga komponen, yaitu *antiseden*, *konsekuensi*, *dependensi*. Dua komponen terdahulu merupakan kalimat/unungkapannya proposisi itu sendiri, sedangkan *dependensi* merupakan sifat hubungan dari dua komponen yang lainnya itu. Dengan bagan dibawah ini komponen-komponen itu dapat dijelaskan.



If X Then Y

Jika/andaikata/jika tidak X..... Maka / Jadi Y

<p>Secara formal harus benar; tidak hanya material/kenyataannya saja yang benar, tetapi</p>	<p>agar konsekuensi benar maka :</p> <p>a. tidak boleh membuat juga menurut pikiran. rumusan kesimpulan yang tak relevan dengan antiseden.</p> <p>b. Tak boleh menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan lain yang masih harus diuji kebenarannya.</p>
---	--

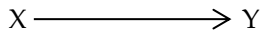
(3) Dependensi

Mengandung arti bahwa antara Antiseden dan Konsekuensi merupakan hubungan sebab-akibat yang benar. Konsekuensi tergantung pada kebenaran antiseden. Antiseden yang tidak benar menyebabkan konsekuensi yang tidak benar (tidak dependen).

- a. Hubungan kausalitas antara dua variabel atau lebih itu akan berbentuk sederhana dan berbentuk kompleks.

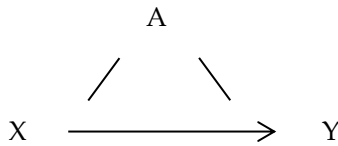
Beberapa contoh terutama yang bersifat kompleks itu antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Hubungan sederhana



“jika besi dipanaskan (X), maka akan menemui (Y)”
(menuainya besi disebabkan karena dipanaskan).

- 2) Hubungan kompleks



Mengandung arti bahwa antara Antiseden dan Konsekuen merupakan hubungan sebab akibat yang benar. Konsekuen tergantung pada kebenaran antiseden. Antiseden yang tidak benar menyebabkan konsekuen yang tidak benar (tidak dependen).

- a) Hubungan kausalitas antara dua variabel atau lebih itu akan berbentuk sederhana dan berbentuk kompleks.

Beberapa contoh terutama yang bersifat kompleks itu antara lain adalah sebagai berikut :

- ❖ Hubungan sederhana

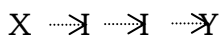
$X \text{-----} Y$ “jika besi dipanaskan (X), maka akan menemui (Y)” (menuainya besi disebabkan karena dipanaskan).

- ❖ Hubungan kompleks

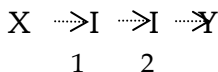
$X \text{-----} 1 \text{-----} Y$
 $\begin{array}{ccc} & A & \\ & / \quad \backslash & \end{array}$ “jika lingkungan baik (X), maka belajarpun akan tenang (I), dengan demikian penguasaan ilmupun tercapai (Y).

$X \text{-----} 1 \text{-----} 2 \text{-----} Y$ “jika manajemen universitas baik (A: *antecedent variabel*) maka kualitas dosen tinggi

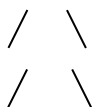
(X) dan kepandaian mahasiswa tinggi (Y) dan karena kualitas dosen tinggi (X) maka kepandaian mahasiswa tinggi.



“makin tinggi tingkat penerapan teknologi (X), makin tinggi pula produktivitas usaha (I₁) dan menyebabkan pendapatan meningkat (I₂, maka tingkat kesejahteraan meningkat (Y).



- A = innovativeness
- X =penerapan teknologi
- I₁ =produktivits usaha
- I₂ = pendapatan
- Y = kebutuhan hidup
- A = penerapan teknologi
- A₂ = nilai-nilai sosial
- A₃ = tanggung jawab



- X = produktivitas
- I = pendapatan
- Y = kesejahteraan dan sebagainya

b) Selain bentuk hubungan yang mensyaratkan proposisi hipotesis itu juga merupakan persyaratan adalah *ketegasan (linkage)* hubungan tegas dan ada hubungan *tegas bersyarat*. Berdasarkan hal itu terdapat 10 macam bentuk ketegasan hubungan variabel, yang merupakan lima pasang. Kelima pasang ketegasan proposisi kausalitas itu adalah :

- ❖ Reversible and Irreversible Proposition
- ❖ Deterministic and Stochastic Proposition
- ❖ Coextensive and Sequential Proposition
- ❖ Contingency and Sufficient Proposition
- ❖ Necessary and Substitutable Proposition
 - ❖ Reversible and Irreversible Proposition
 - Reversible Proposition, yaitu proposisi yang berkedudukan variabelnya dapat bolak-balik, determinan menentukan result, dan juga result dapat menentukan determinan.
"Jika pandai maka kaya" dapat juga dibalikkan jika kaya maka pandai".
 - Irreversible Proposition, yaitu proposisi dimana kedudukan variabel determinan dan result itu tidak dibolak-balik, variabel determinan hanya menentukan variabel result.
"Jika terang bulan muda-mudi berpacaran", tetapi jika muda mudi berpacaran maka tidak terang bulan".
- ❖ Deterministic and Stochastic Proposition
 - Deterministic Proposition, yaitu proposisi dimana ketegasan hubungan variabel-variabelnya menyatakan kepastian/sudah barang tentu /selalu.
"Jika X maka pasti/sudah barang tentu/selalu Y", semua logam jika dipanaskan pasti/sudah barang tentu/selalu memuai".
 - Stochastic Proposition, yaitu proposisi dimana ketegasan hubungan variabel-variabelnya tidak menunjukkan kepastian, melainkan bersifat kemungkinan atau kecenderungan.
"Jika X maka mungkin cenderung Y".

“Jika lingkungan buruk mungkin/cenderung anak-anak akan berandal”.

❖ Coextensive and Sequential Proposition

- Coextensive Proposition, yaitu proposisi dimana ketegasan hubungan variabel-variabelnya menyatakan dengan sendirinya.

“Jika X maka dengan sendirinya Y”.

“Jika rajin belajar maka dengan sendirinya akan pandai”.

- Sequential Proposition, yaitu proposisi ketegasan hubungan variabel determinant menentukan result/kelak nantinya atau waktu yang akan datang.

“Jika X maka nanti/kelak akan Y”.

“Jika semasa kecil anak dimanja maka nanti/kelak akan kurang percaya diri”.

❖ Contingency and Sufficient Proposition

- Contingency Proposition, yaitu proposisi yang ketegasan hubungan variabel-variabelnya memerlukan sesuatu syarat (result terjadi karena determinant dengan suatu syarat).

“Jika X maka Y jika Z”.

“Jika lingkungan buruk maka anak-anak akan berandal, jika kurang perhatian orang tua”.

- Sufficient Proposition, yaitu proposisi yang ketegasan hubungan variabel-variabelnya memerlukan syarat, artinya determinant tanpa syarat dapat menentukan result (sudah cukup).

“Jika X (tanpa syarat/sudah cukup) maka Y”.

“Jika perhatian orang tua kurang (meski lingkungan baik) maka anak-anak akan berandal”.

❖ Necessary and Substitutable Proposition

- Necessary and Substitutable Proposition, yaitu proposisi yang ketegasan hubungan variabel-variabelnya menyatakan keharusan/seharusnya.

“Jika X maka seharusnya Y”.

“Jika menerapkan teknologi baru maka seharusnya produksinya meningkat”.

- Substitutable Proposition, yaitu proposisi yang ketegasan hubungan variabel-variabelnya determinannya dapat diganti oleh variabelnya.

“Jika X maka Y, juga jika Z maka Y”, jadi variabel X dapat diganti oleh variabel Z.

“Jika bayi lapar maka ia akan menangi”; juga

“Jika popoknya basah maka bayi akan menangis”

Jadi lapar dapat diganti dengan popok basah.

Dari ketentuan-ketentuan tentang ketegasan hubungan kausalitas antara variabel determinan (antiseden) dan result (konsekuen), ternyata dependensinya dinyatakan dengan kata-kata tertentu, yang menggambarkan derajat ketegasannya itu. Dengan demikian kemahiran menghayati kata-kata tersebut dalam merumuskan hipotesis itu sangat diperlukan.

- c) Hal lain yang harus diperhatikan dalam merumuskan hipotesis itu adalah nilai informatif dependensi proposisinya. Sebagai hasil berfikir deduktif (ataupun induktif), proposisi itu

mempunyai nilai informatif yang bervariasi dari rendah (low informative value) sampai tinggi (high informative value). Hal ini disebabkan karena keluasan dari cakupan pengertian konsep-konsep yang ditetapkannya. Suatu fakta (berbentuk proposisi) yang mencapai nilai informatif tinggi yang disebut dalil (hukum) dan propoisinya disebut "theoretical Proposition".

Suatu proposisi yang derajat keberlakuannya tergantung pada suatu waktu atau tempat tertentu (dan atau kondisi lain), pada umumnya bernilai informative rendah. Sebagai contoh proposisi yang bernilai informative rendah misalnya :

"Jika status sosial tinggi, maka selalu taat pada norma-norma sosial". Pada kenyataannya banyak orang yang berstatus sosial tinggi itu tidak taat terhadap norma-norma (tergantung kepada situasi dan kondisi). Letak kelemahan proposisi itu (oleh karena itu disebut nilai informatifnya rendah), disebabkan karena cakupan pengertian dari konsep-konsep status dan norma-norma sosial, bahkan juga konsep selalu taat itu, sangat luas. Seperti diketahui bahwa status sosial mengandung banyak dimensi (atau ukuran) misalnya atas dasar kekayaan, tetapi tidak semua yang pintar berpangkat; demikian pula banyak orang pintar tetapi tidak kaya. Selain itu, konsep norma-norma sosial banyak macam dan berbeda dengan konsep taat, juga ungkapn selalu (*deterministik*), apakah bukan seharusnya (*stochastik*), atau dengan syarat tertentu (*contingency*) dan seterusnya. Terjadinya kelemahan tersebut disebabkan kerangka pikiran (dalam proses *conceptioning*, *judgement* dan *reasoning* itu). Jika proposisi contoh itu ditelaah,

maka ternyata makin luas cakupan pengertian konsep-konsepnya tinggi nilai informatif proposisi itu. Dengan demikian upaya untuk mempertinggi nilai informatif ini, kita perlu kembali pada konseptualisasi fenomena, terutama dalam pengkajian mendasar yang sampai pada variabel-variabelnya itu. Selain itu dapat pula dilakukan dengan penelusuran deskripsi hasil pendekatan teksonomikalnya (dengan anggapan bahwa penelitian verifikasinya merupakan kelanjutan atau didasarkan pada penelitian deskriptifnya), maka ketelitian diagnosis pada prinsip taksonomi-nya, akan mempertinggi nilai informatifnya.

Setelah meninjau persyaratan proposisi bagi hipotesis atau hal lain yang harus diperhatikan adalah bentuk-bentuk dari hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis ini didasarkan pada masalah-masalah yang hendak dijelaskannya atau hendak diexplamasinya. Berdasarkan hal ini terdapat empat bentuk *hipotesis deskriptif*, *hipotesis argumentatif*, *hipotesis kerja* dan *hipotesis nul*.

Hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis yang menunjukkan dugaan sementara tentang mengapa (*whay*) suatu peristiwa, benda-benda atau variabel itu terjadi. Hipotesis ini merupakan pernyataan sementara yang diatur dengan sistematis, sehingga salah satu pernyataannya merupakan konsekuensi (kesimpulan) dari pernyataan lainnya (*antecedent*);

Terjadinya Y disebabkan karena X Z

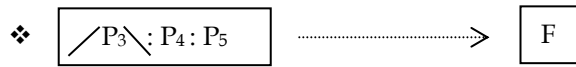
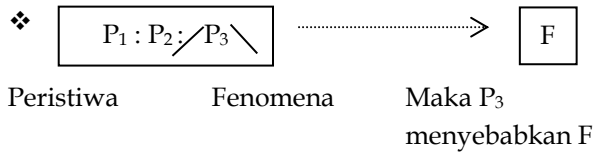
Hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang menjelaskan ramalan akibat-akibat dari suatu variabel penyebabnya, jadi hipotesis ini menjelaskan ramalan jika sebuah variabel berubah maka variabel tertentu berubah pula.

Hipotesis nul atau hipotesis statistik, yaitu hipotesis yang bertujuan untuk memeriksa ketidak

benaran suatu teori, yang selanjutnya akan ditolak menurut bukti-bukti yang sah. Karena hipotesis ini mempergunakan perangkat matematik atau statistik, maka disebut hipotesis matematik atau hipotesis statistik.

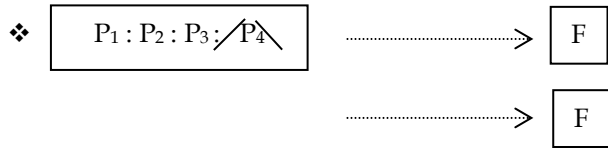
Untuk lebih jelasnya diiktisarkan sebagai berikut, yaitu yang disebut "*Method of Agreement*", "*Method of Difference*" dan "*Method of Concomitant Variation*". Keterangan dari ketiga macam metode itu sebagai berikut :

"*Method of Agreement*" : Jika dalam dua atau lebih peristiwa, pada suatu fenomena timbul satu (dan hanya satu) kondisi yang terjadi, maka kondisi itu dapat disimpulkan sebagai penyebab dari terjadinya fenomena itu.

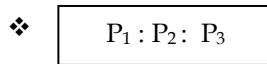


"*Method of Difference*" : Dalam dua peristiwa terdapat dua perbedaan dalam rangkaiannya (unsur) dan fenomena yang terjadi, jika serangkaian peristiwanya sama kecuali dalam satu faktor dimana peristiwa yang satu tidak memilikinya dan tidak menimbulkan fenomena, maka fenomena yang terjadi itu disebabkan

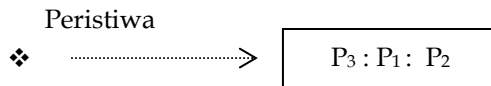
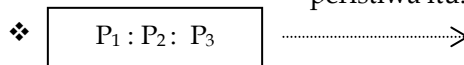
oleh faktor yang dimiliki peristiwanya.



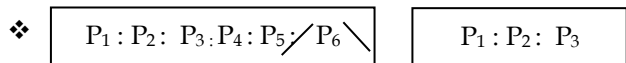
Peristiwa Fenomena Maka P₃ menyebabkan



“Method of Concomitant Variation” : Jika telah diketahui adanya faktor-faktor tertentu dalam suatu peristiwa yang menimbulkan bagian-bagian tertentu suatu fenomena, maka bagian-bagian lain dari fenomena ini adalah akibat dari faktor-faktor selebihnya yang terdapat dalam peristiwa-peristiwa itu.



F₂ disebabkan oleh P₄ dan P₅



F₃ disebabkan oleh P₆ dst.

Dengan ketiga metode itu sebagai pegangannya, maka untuk menguji hipotesis itu dapat ditentukan rencana pengujiannya. Namun sebelumnya perlu ditetapkan terlebih dahulu data atau informasi empirik apa yang diperlukan untuk menguji hipotesis itu. Data dan atau informasi itu dapat diketahui melalui operasionalisasi variabel yang terkandung didalam hiptesis. Operasionalisasi variabel ini adalah menentukan indikator (petunjuk) dari variabel-variabel itu. Indikator-indikator variabel itu ada yang masih berbentuk informasi ataupun yang telah berbentuk data. Misalnya akan diuji hipotesis *jika besi dipanaskan maka akan memuai*. Dipanaskan merupakan variabel penyebab (*determinant*) sedangkan memuai merupakan variabel akibat (*result*). Untuk operasionalisasinya variabel dipanaskan itu bagaimana, dengan kata lain apa indikator dari dipanaskan itu, demikian pula indikator dari variabel memuai apa itu? Tanpa diketahuinya indikator-indikator tidak dapat dibayangkan bagaimana peneliti akan menguji hipotesisnya itu. Misal dengan menguji hipotesis *jika lingkungan buruk, maka anak-anak akan berandal*. Lingkungan buruk adalah variabel penyebab, apa indikatornya, demikian pula berandal adalah variabel apa akibat indikatornya.

Di dalam menentukan indikator variabel-variabel itu (operasionalisasi) maka persoalan validitas (keabsahan) dan rehabilitas (ketepatan) memegang peranan penting, tidak sah dan tidak tepatnya indikator bagi variabelnya, akan menyebabkan kesalahan dalam pengujiannya.

Selain masalah operasionalisasi variabel, yang penting pula perannya adalah pengetahuan tentang sifat-sifat variabel itu. Tidak dipahaminya sifat-sifat dari variabel ini tidak dapat dibayangkan pula bagaimana peneliti akan dapat menetapkan rancangan uji mana yang akan ditetapkannya.

Pengujian hipotesis dalam penelitian terakhir mempergunakan metode matematik/statistik, dengan mempergunakan rancangan-rancangan uji hipotesis yang telah tersedia. Dengan kata lain perkataan peneliti tinggal memilih rancangan uji mana yang tepat dengan hipotesisnya itu. Meskipun demikian jika tidak difahami sifat-sifat data/informasi (variabel) yang akan diukurnya akan sulit memilih rancangan uji statistiknya itu.

4. Membahas dan Menarik Kesimpulan

Membahas dan menarik kesimpulan ; adalah membahas sudah termasuk pekerjaan interpretasi terhadap hal-hal yang ditemukan dalam penelitian itu.

Dalam interpretasi, pikiran kita diharapkan pada dua titik pandang : *pertama*, kepada kerangka pikiran (logical construct) yang telah disusun, bahkan ini harus merupakan "frame work" pembahasan penelitian, *kedua*, pandangan diarahkan ke depan, yaitu mengkaitkan kepada variabel-variabel dari topik aktual. Pembahasan tidak lain adalah mencocokkan deduksi dalam kerangka pikiran dengan induksi dari empirik (hasil pengujian hipotesis), dan pula kepada induksi-induksi yang diperoleh orang lain (hasil penelitian orang lain) yang relevan. Bagaimana hasil dari mencocokkan ini, apakah cocok (paralel atau analog), atau sebaliknya (bertentangan atau kontradiktif). Apabila ternyata bertentangan atau tidak cocok, perlu dilacak, dimana letak perbedaan atau [ertentangan itu dan apa kemungkinan penyebabnya.

Hasil pembahasan tidak lain adalah kesimpulan. Memang demikian bahwa kesimpulan penelitian adalah penemuan-penemuan dari hasil interpretasi dan pembahasan, (jadi kesimpulan itu tidak jatuh dari langit...). Penemuan-penemuan dari interpretasi dan pembahasan itu harus merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian sebagai masalah, atau sebagai bukti dari penerimaan terhadap hipotesis yang diajukan.

Pertanyaan-pertanyaan didalam kesimpulan itu dirumuskan dalam kalimat yang tegas dan padat tersusun dari kata-kata yang baik dan pasti, sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan tafsiran-tafsiran yang berbeda (apa yang dimaksud oleh peneliti harus ditafsirkan sama oleh orang lain). Pertanyaan-pertanyaan tersusun sesuai dengan susunan dalam identifikasi masalah atau dengan susunan hipotesisnya.

C. Metode Penelitian

Para peneliti memilih berjenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya. Sudah terang, metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat yang digunakan dlm penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang digunakan. Karena itu, sebelum melaksanakan penelitian seseorang peneliti perlu menjawab tiga buah pertanyaan pokok sebagai berikut :

1. Urutan kerja apakah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian ?
2. Alat-alat apa yang digunakan dalam mengukur ataupun dalam mengumpulkan data ?
3. Bagaimana melaksanakan penelitian tersebut?

Prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. Teknik penelitian mengatakan alat-alat pengukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Sedangkan metode

penelitian memandu si peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan.

Jika suatu penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat dalam mengumpulkan data, maka yang dibicarakan adalah teknik penelitian. Jika seseorang berbicara tentang cara seorang peneliti melakukan percobaan lapangan, dia membagi kepada empat plot dilapangan untuk keperluan penelitian, maka yang dibicarakan disini adalah prosedur penelitian. Jika kita membicarakan bagaimana secara berturut suatu penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa n prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan, maka yang dibicarakan adalah metode penelitian.

Untuk dapat memberikan dengan jelas beberapa metode penelitian, maka penelitian dikelompokkan dalam lima kelompok umum sebagai berikut :

1. Metode Sejarah
2. Metode Deskripsi / Survei
 - a. Metode survei
 - b. Metode deskriptif berkesinambungan
 - c. Metode studi kasus
 - d. Metode analisis pekerjaan dan aktivitas
 - e. Metode studi komperatif
 - f. Metode studi waktu dan gerakan
3. Metode Eksperimental
4. Metode *Grounded Research*
5. Metode Penelitian Tindakan (*Action Research*)

BAB 4

KONSEP, TEORI, VARIABEL, DIMENSI, HIPOTESIS DAN PENGUKURAN

Seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ada seseorang berkomentar “Itukan hanya teori tetapi kenyataannya tidaklah begitu”. Betulkah ada pertentangan antara teori dan kenyataan? Sesungguhnya teori tidaklah bertentangan dengan kenyataan. Justru teori bertujuan untuk menjelaskan kenyataan yang ada. Lalu, apakah yang dimaksud dengan teori sosial? Teori sosial adalah terdiri dari pernyataan-pernyataan yang bersifat abstrak dan umum yang bertujuan untuk menerangkan (Bimana dan menapa) beberapa aspek dari pada kenyataan dalam bermasyarakat (Baik kenyataan itu dapat diketahui secara langsung maupun tidak).

Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak berteori. Baik itu dilakukan secara sadar maupun tidak. Misalnya, masih adanya sementara penduduk yang tidak mau berpartisipasi dalam keluarga berencana. Salah satu pertanyaan yang timbul adalah mengapa masih banyak orang yang tidak mau melakukan KB? Secara sadar atau tidak, kita akan mencoba memberi jawaban dari pertanyaan mengapa itu. Beberapa jawaban kita kembangkan. Kita memberikan alasan-alasan untuk mendukung jawaban tersebut. Jawaban-jawaban yang diperoleh kebanyakan juga berdasarkan fakta atau pengalaman yang mampu kita serap. Beberapa jawaban dibuang. Secara sadar atau tidak kita sedang berteori, mengembangkan teori. Jadi berteori adalah merupakan aktivitas mental untuk mengembangkan ide yang dapat menerangkan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Dalam kegiatan ilmiah, mengembangkan teori tidak berbeda dengan apa yang kita

temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada perbedaan hanyalah pengembangan teori ini dilakukan dengan lebih sistematis, lebih komprehensi, harus memenuhi turn dan mematuhi larangan, dan yang penting lagi, dilakukan dengan penuh kesadaran.

A. Defenisi Teori

Ada banyak ahli yang memberikan defenisi teori. Kaerlinger (1973) menyatakan teori adalah sekumpulan konsep, defenisi, dan proposisi yang saling kait mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan secara sfesifik hubungan-hubungan diantara variabel-variabel yang terkait dalam fenomena, dengan tujuan memberikan ekplnasi dan prediksi atas fenomena tersebut. Gibbs (1972) mendefenisikan teori sebagai suatu kumpulan tatemem yang mempunyai kaitan logis, merupakan cermin dari kenyataan yang ada tentang sifat-sifat atau ciri-ciri suatu khas, peristiwa atau sesuatu benda. Ahli lain Hage (1972) menyatakan bahwa teori harus mengandung tidak hanya konsep dan statemen tetapi juga defenisi, baik defenisi teoritis maupun defenisi operasional dan hubungan logis yang bersifat teoritis dan operasional antara konsep atau statemen tersebut. Konsep dan defenisi harus disusun kedalam "Primitive" dan "Derived", statemen dan hubungan harus disusun kedalam premis dan persamaan.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa suatu teori harus : a. mengandung konsep, defenisi, dan proposisi, b. Ada hubungan logis antara konsep-konsep, defenisi-defenisi, dan proposisi-proposisi, c. Hubungan-hubungan tersebut menunjukkan atau meruapakan cermin fenomena sosial, d. Dengan demikian teori dapat digunakan untuk eksplanasi dan prediksi.

Proposisi merupakan suatu pernyataan yang mengandung dua konsep atau lebih. Sedangkan sesuatu bisa digunakan untuk ekplanasi dan prediksi atas sesuatu yang lain. Jikalau antara keduanya ada hubungan yang bersifat kausal.

Dengan demikian berdasarkan defenisi-defenisi diatas dapatlah dikembangkan suatu defenisi teori, yakni sekumpulan proposisi yang menunjukkan hubungan kasusal diantara konsep atau variabel-variabel yang terkandung dalam proposisi tersebut.

Suatu teori dapat diterima dengan dua kriteria a. Kriteria ideal dan b. Kriteria pragmatis (Black and champion, 1976). Kriteria ideal mengemukakan bahwa suatu teori akan dapat diakui apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sekumpulan ide yang dikemukakan mempunyai hubungan logis dan konsisten.
2. Sekumpulan ide-ide yang dikemukakan harus mencakup seluruh variabel yang diperlukan untuk menerangkan fenomena yang dihadapi.
3. Kumpulan ide-ide tersebut mengandung proposisi-proposisi dimana ide yang satu dengan yang lain tidak tumpang tindih.
4. Kumpulan ide-ide tersebut dapat dites secara empiris.

Sedangkan kriteria pragmatis mengemukakan bahwa ide-ide dikatakan sebagai teori kalau ide-ide tersebut memiliki :

1. Asumsi dan paradigma.
2. Frame reference, yakni kerangka fikir yang mengidentifikasi aspek-aspek kehidupan sosial yang akan diuji secara empiris.
3. Konsep-konsep, yakni abstraksi atau simbol sebagai ujud suatu ide.
4. Variabelm yakni penjabaran konsep yang mengandung dimensi.
5. Proposisi, yakni hubungan antara konsep.
6. Hubungan yang sistematis dan bersifat kausal diantara kosep-konsep dan proposisi-proposisi tersebut.

Teori sosial merupakan peceria dari keyataa sosial tetapi tidak perah atau jarag teori sosial tersebut cocok seratus persen dengan kenyataan. Kalau model dari realita itu cocok seratus persen dengan kenyataan maka kita membicarakan pengetahuan sosial, yakni suatu rangkuman dari hukum-hukum sosial

yang mendiskripsikan realita sosial. Teori sosial berusaha untuk bisa mendekati pengetahuan sosial, tetapi tidak akan bisa persis.

Kembali kepada pertanyaan, “Mengapa masih ada sementara penduduk yang tidak mau ber KB?” Kita bisa mengembangkan teori untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, tingkat pendidikan dan pendapatan penduduk mempengaruhi perilaku keluarga. Dengan pendidikan orang akan semakin sadar akan kebutuhan pendidikan dan mahal nya biaya pendidikan. Maka ia bisa mengantisipasi betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyekolahkan anaknya. Sebaliknya orang yang berpendidikan relatif rendah tidak akan berfikir sampai kesana. Oleh karenanya ia tidak mempertimbangkan jumlah anaknya yang seharusnya dimiliki. Maka ia merasa tidak perlu ikut KB. Betulkah jawaban ini bisa diterapkan diberbagai tempat dan waktu ? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Jawaban itu berlaku untuk tempat dan mungkin untuk waktu. Hal ini membedakan teori dengan hukum.

Hukum merupakan generalisasi yang bersifat universal, dimana keberlakuannya tidak terbatas oleh tempat dan waktu, mengandung informasi mendasar, serta memberikan deskripsi keberaturan suatu objek yang bersifat pasti. Sedang teori merupakan generalisasi yang merupakan kesimpulan informasi dalam bentuk abstrak dan umum, yang dapat digunakan untuk menerangkan atau memprediksi kenyataan tertentu yang tercakup dalam skope teori (Freese, 1986). Tidak berbeda dengan Freese, Faia (1987) mengemukakan bahwa setiap teori sosial terdiri dari serangkaian proposisi yang satu sama lain saling mengkait, yang dapat dibuktikan dengan fakta yang ada dan dinyatakan dalam bentuk abstrak. Fungsi teori adalah untuk :

1. Sistemasi pengetahuan.
2. Eksplanasi, Prediksi, dan kontrol sosial.
3. Mengembangkan hypothesis penelitian.

Teori perlu dinyatakan dalam bentuk abstrak agar bisa digeneralisir dalam kasus yang lebih luas, yang meliputi waktu dan tempat yang berbeda. Namun karena teori dinyatakan dalam bentuk abstrak maka perlu ada penafsiran yang sama tentang makna konsep yang abstrak tersebut dari para ilmuwan atau pembaca. Misalnya, proposisi yang menyatakan bahwa perkembangan industrialisasi erat hubungannya dengan kehidupan demokrasi suatu masyarakat. Para pembaca harus mempunyai kesamaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan industrialisasi dan demokrasi. Sebab dua istilah tersebut bisa ditafsirkan berbeda. Di samping itu, karena teori memiliki fungsi ekplanasi, prediksi dan mungkin sosial kontrol, maka setiap teori harus didukung oleh fakta. Ketiga hal tersebut, abstrak, penafsiran yang sama dan ditopang oleh fakta yang ada merupakan ciri-ciri dari teori.

B. Fungsi Teori

Sebagaimana telah disinggung di muka, teori memiliki, paling tidak tiga fungsi :

1. Untuk sistemisasi pengetahuan.
2. Untuk ekplanasi, Prediksi dan kontrol sosial dan
3. Untuk mengembangkan hipotesa. Masing-masing tersebut akan dibahas lebih detail satu persatu.

Sistemisasi pengetahuan

Kegunaan pertama dari teori adalah untuk sistmisasi pengetahuan atau disebut typologies. Setiap konsep dapat digunakan untuk kategorisasi dan klasifikasi. Misalnya individu dapat diklasifikasikan menurut tinggi badan, berat badan, kekuatan badan (ciri-ciri fisik), sikap, loyalitas dan sebagainya.

Kategorisasi dan klasifikasi dapat dilaksanakan dengan lewat beberapa cara, antara lain : Artikulasi, logika yang runtut dan tepat, pertimbangan situasi dan kondisi dan pertimbangan berfikir responden (Black and champion, 1976). Dengan artikulasi berarti informasi yang ada diklasifikasi dan dikategorikan menurut skopnya, dari yang bersifat umum

sampai kategori yang bersifat khusus. Dengan demikian, informasi yang ada bisa dengan cepat dikaji dan difahami. Logika yang tepat digunakan untuk menyusun klasifikasi informasi atau pengetahuan agar klasifikasi tersebut tidak tumpang tindih. Apabila objek sudah diklasifikasikan menurut beberapa aspek dalam waktu yang sama, maka setiap aspek harus memiliki kategori-kategori sendiri-sendiri. Dalam melaksanakan klasifikasi ini masalah situasi dan kondisi harus dipertimbangkan. Disamping dipertimbangkan kerangka fikir responden sehingga klasifikasi akan jelas dan tepat. Ekplanasi, prediksi dan kontrol sosial.

Kegunaan teori yang kedua adalah ekplanasi, prediksi dan kontrol sosial. Ekplanasi berhubungan dengan peristiwa yang telah terjadi, prediksi berhubungan dengan peristiwa yang akan terjadi, dan kontrol sosial berhubungan dengan usaha untuk menguasai atau mempengaruhi peristiwa yang akan terjadi tersebut. Kegunaan ketiga teori adalah sebagai dasar untuk membangun hipotesis penelitian.

Ekplanasi mempunyai arti umum yakni menjadikan sesuatu menjadi jelas atau lebih jelas. Untuk mengawali pembahasan tentang ekplanasi, kiranya perlu dibahas hubungan antara ekplanasi dan korelasi.

Ekplanasi erat hubungannya dengan konsep korelasi dan konsep statistik lain. Suatu koefisien korelasi adalah angka yang menunjukkan seberapa besar dan bagaimana arah hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Hubungan positif berarti kenaikan atau penurunan pada satu variabel secara sistematis ada hubungannya dengan perubahan pada variabel yang lain dengan arah yang sama. Misalnya perubahan posisi atau pangkat dengan pendapatan. Hubungan negatif berarti perubahan pada satu variabel secara sistematis ada hubungannya dengan perubahan pada variabel yang lain dengan arah yang berlawanan. Kuat lemah lemahnya hubungan antara dua variabel ditunjukkan oleh besar kecilnya nilai koefisien. Nilai koefisien bergeser dari 0 dan 1 baik plus maupun minus. Adanya korelasi tidaklah berarti memberikan

ekplanasi. Namun, setiap ekplanasi pasti mengandung korelasi. Kita bisa mengatakan suatu variabel yang mempengaruhi variabel lain kalau diantara kedua variabel tersebut mempunyai korelasi, baik positif maupun negatif, linear maupun non linear. Tanpa adanya korelasi tidak mungkin ada ekplanasi. Misalnya suatu kelompok murid, sebut grup A, memiliki nilai rata-rata tinggi dari kelompok murid grup B, "Karena murid pada kelompok A lebih banyak menggunakan waktu untuk belajar". Kalau dalam penelitian tidak diketemukan korelasi antara waktu yang digunakan untuk belajar dan prestasi belajar, maka ekplanasi yang kita berikan adalah salah. Namun bukan korelasi yang penting. Sebab korelasi hanya merupakan statemen bahwa jam belajar ada hubungannya dengan prestasi. Tetapi korelasi tidak mengatakan apa-apa tentang mengapa. Singkatnya tidak adanya korelasi bisa menggugurka ekplanasi, namun korelasi bukan ekplanasi atau membuktikan adanya ekplanasi.

Ada dua hal yang menyebabkan korelasi tidak mesti menunjukkan adanya ekplanasi. Pertama, hubungan seringkali bersifat spurious (palsu). Yakni adanya korelasi antara dua variabel dikarenakan ada variabel lain yang mempengaruhinya. Misalnya, langganan surat kabar berkorelasi dengan prestasi anak. Karena dengan berlangganan surat kabar dan prestasi anak menjadi akan terangsang untuk membaca, sehingga anak berarti praktek membaca. Disamping itu pengetahuan anak didik bertambah luas. Namun demikian, ada variabel yang menyebabkan hubungan antara berlangganan surat kabar dan prestasi anak menjadi hubungan yang bersifat spurious (palsu). Yakni latar belakang keluarga. Ada keluarga yang orang tuanya selalu mendorong dan membantu anak-anak mereka dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Sedangkan adapula keluarga yang tidak mau tahu tentang pekerjaan sekolah anaknya. Jadi variabel keterlibatan orang tua tersebut mempengaruhi hubungan antara langganan surat kabar dan prestasi sekolah diatas. Kedua, satu korelasi hanya menyatakan bahwa diantara kedua variabel terdapat hubungan

yang sistematis. Korelasi tidak menyatakan satu variabel berpengaruh atau menjadi sebab atas perubahan pada variabel lain.

Menurut Chavetz (1978) dan Bailey (1978), ada beberapa macam bentuk ekplanasi a. Ekplanasi bersifat keharusan, b. Ekplanasi terpenuhi faktor cukup, c. Ekplanasi fungsional, d. Ekplanasi genetik, e. Ekplanasi niat, f. Ekplanasi disposisi, g. Ekplanasi analisis, h. Ekplanasi lewat penelitian empiris, i. Ekplanasi berdasarkan teori formal.

Ekplanasi yang bersifat keharusan artinya adanya satu variabel merupakan keharusan untuk terjadinya variabel yang lain. Tetapi adanya variabel itu tidak mesti menjadikan adanya variabel yang kedua. Misalnya, adanya hujan pasti ditunjukkan terdapat mendung sebelum hujan turun. Tetapi kalau ada mendung berarti tidak pasti turun hujan.

Ekplanasi yang bersifat terpenuhi faktor cukup. Ekplanasi yang mencakup unsur adalah suatu ekplanasi dimana variabel lain yang bisa menyebabkan terjadinya variabel tergantung tersebut. Misalnya, gigitan ular kobra menyebabkan seseorang sakit, dan kalau tidak tertolong lagi bisa mati, tetapi kematian seseorang bisa juga disebabkan oleh hal yang lain.

Ekplanasi yang bersifat genetik memberikan penjelasan atas suatu fenomena dengan menelusuri riwayat perkembangan dan asal mula fenomena. Misalnya, di Amerika Serikat, mengapa orang-orang negro berbakat menyanyi? Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh-tokoh penyanyi atau musisi yang berkulit hitam. Para ahli akan menjelaskan fenomena ini dengan mengkaji asal mula dan perkembangan kelompok Negro ini. Teori akan menjelaskan pada masa lampau di Amerika orang Negro didatangkan budak-budak dari Afrika. Karena unsur sosialisme tinggi maka budak ini merupakan masyarakat yang paling rendah. Konsekuensi ini masyarakatnya tidak boleh dan diberikan kesempatan untuk belajar oleh karena itu tidak saja sekolah untuk negro tidak ada, bahwa memberikan pelajaran kepada orang Negro tidak

diperbolehkan dan bagi yang melanggar akan mendapat hukuman termasuk juga orang negro tidak diperbolehkan belajar agama. Namun demikian bagi para rohanian larangan ini tidak sepenuhnya ditaati. Mereka ingin mengajar orang Negro belajar agama karena dilarang maka para rohanian memberikan pelajaran kepada orang negro dengan perantaraan kegiatan bernyanyi, dimana nyanyian ini merupakan pujian-pujian kepada Tuhan. Oleh karena satu-satunya alat belajar hanya hanya orang-orang Negro betul-betul menghayati nyanyian tersebut. Penghayatan dan rasa menyatu dengan nyanyian ini sampai sekarang masih menjadi ciri-ciri orang Negro.

Ekplanasi intention (niat) merupakan penjelasan sesuatu masalah atau perilaku berdasarkan niat yang ada. Biasanya ekplanasi ini diterapkan pada ojek individual. Jadi ekplanasi bentuk ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat yang dimiliki orang yang bersangkutan. Oleh karena kalau ada perilaku seseorang yang aneh misalnya seseorang yang membuat mengeluarkan isu bendaharawan suatu universitas, katakan universitas X menaikkan harga pembelian tanah yang dibeli oleh universitas tersebut dari harga semula harga Rp. 2.000 menjadi harga Rp. 10.000. kalau berita itu benar ataupun tidak benar kita bisa mempertanyakan apakah motif ia mengeluarkan isu tersebut, dimana jelas-jelas adanya isu tersebut menyebabkan keresahan dikalangan mahasiswa dan pimpinan universitas dan segenap pegawainya. Ekplanasi orang tersebut akan didasarkan niat yang bersangkutan mengeluarkan isu.

Dalam hal level aplikasinya, ekplanasi sikap atau disposisi sama dengan ekplanasi intention, yakni level individual. Ekplanasi ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan sikap atau kecendrungan yang bersangkutan akan sesuatu hal. misalnya, mengapa A merokok Gudang Garam mengapa tidak Bentol. Perilaku tersebut bisa dijelaskan dari sikap A terhadap merek rokok yang ada.

Ekplanasi analisis ingin menjelaskan sesuatu masalah atau perilaku dengan mendasarkan pada alasan-alasan tertentu. Alasan ini mirip dengan ekplanasi sikap dan ekplanasi intention. Malahan dua bentuk ekplanasi terakhir bisa dicakup pada ekplanasi alasan. Alasan yang dikemukakan bersumberkan pada pengalaman hidup dan kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh diri seseorang mandiri.

Ekplanasi yang berskope individual, yakni ekplanasi intention, ekplanasi disposition, dan ekplanasi alasan, tidak banyak banyak manfaatnya untuk memberikan jawaban akan problema sosial yang mempunyai level makro. Sedangkan ekplanasi genetik mesti juga bersifat individual, masih mempunyai arti yang penting dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Misalnya mengapa ada seseorang menjadi ekstrim, sehingga begiru berani membajak pesawat udara dan menembak penumpang dengan sadis. Seseorang melakukan penelitian dibidang gerakan ekstrim ini mungkin akan muncul dengan ekplanasi genetik penelitian akan memberikan penjelasan bahwa orang-orang ekstrim pada masa kecil sudah dididik dengan kekerasan. Orang tuanya sering bertengkar, dan malahan berkelahi didepan anak. Anak sejak kecil sudah biasa menerima pukulan tangan baik dari ayah maupun dari Ibu. Sehingga anak dirumah tidak memiliki rasa aman dan perlindungan. Menginjak remaja anak tersebut sudah kenal dengan kelompok-kelompok yang sebaya yang beraliran keras sehingga anak-anak tidak kenal rasa takut dan rasa belas kasihan. Sebab ia sendiri tidak pernah mendapatkan rasa kasihan, apalagi kasih sayang dari orang lain. Anak semacam ini pada dasarnya ingin mendapatkan pengakuan. Maka ketika ada pihak-pihak yang membakar dan mempengaruhinya ia dengan mudah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan ekstrim. Alasan ini masih bisa untuk digeneralisir dan untuk menganalisis masalah sosial secara makro. Ekplanasi intention, akan memberikan penjelasan bahwa tindak ekstrim seseorang pemuda pada dasarnya erat kaitannya dengan niat seseorang untuk dikenal secara luas dan

mendapat prediket “pemberani”. Ekplanasi disposisi (kecendrungan) akan menjelaskan bahwa seseorang yang ekstrim memang memiliki kecendrungan yang keras dan sadis terhadap seseorang yang dianggap mendukung tindak korupsi. Oleh karenanya ia tidak segan-segan berbuat yang menurut dirinya merupakan usaha untuk memberantas usaha korupsi. Sedang, ekplanasi alasan akan menjelaskan bahwa seseorang melakukan tindakan ekstrim karena pada dasarnya tindakan ekstrim pasti hadir setiap masa.

Pada dasarnya, dalam penelitian sosial peneliti bermaksud untuk mengetahui secara umum atau dengan kata lain apa alasan yang dikemukakan bisa diberlakukan secara umum. Namun, ekplanasi yang bersifat genetik, disposition dan ekplanasi alasan sangat bersifat individual. Oleh karenanya sifat ekplanasi tersebut sulit untuk digeneralisir. Sehubungan dengan kelemahan ekplanasi tersebut diatas, para peneliti cenderung menggunakan ekplanasi yang dapat digunakan pada masyarakat atau paling tidak sekelompok orang sebagai unit analisis. Untuk keperluan ini ekplanasi fungsional, “formal deductive theory” dan induksi empirik dapat digunakan. Kadangkala penggunaan berbagai ekplanasi tersebut bisa dikombinasikan.

Ekplanasi teori formal bermaksud memberikan penjelasan dengan berdasarkan aksioma yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Dengan kata lain ekplanasi teori formal ini mempunyai asumsi bahwa aksioma yang digunakan sebagai dasar pengembangan ekplanasi adalah suatu merupakan suatu kebenaran yang tidak perlu di uji lagi. Misalnya, jika ada A akan ada B, jika ada B akan ada C, jika ada A kemudian ada C.

Kebenaran statemen pertama dan kedua sudah tidak perlu didebatkan lagi, karena merupakan asumsi yang harus diikuti. Contoh lain misalnya :

A = fungsi (B)

B = fungsi (C)

Jadi A = fungsi (C)

Ekplanasi fungsional merupakan salah satu fungsi ekplanasi yang sering digunakan. Untuk memahami ekplanasi ini perlu kita fahami konsep sistem, umpan balik (*Feed back*) dan keseimbangan (*equilibrium*). Suatu sistem adalah suatu interaksi dari serangkaian faktor atau variabel, dimana adanya perubahan pada suatu variabel atau faktor akan mengakibatkan adanya perubahan pada faktor atau variabel lain. Dalam khazanah ilmu sosial, sistem ini bisa bersifat terbuka dan tertutup. Sistem tersebut tertutup apabila seluruh faktor yang mempengaruhi variabel tergantung dapat diwujudkan dalam sistem tersebut. Sedangkan siste, disebut terbuka apabila tidak seluruh variabel mempengaruhi variabel dapat dirangkum dalam sistem. Para ilmuan sosial sadar bahwa masih ada variabel yang mempengaruhi terhadap fenomena yang dihadapi, tetapi mereka tidak sanggup meng indentifikasikan. Dan memang ini merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipecahkan dalam penelitian-penelitian sosial. Suatu contoh tentang penelitian tentang mengapa ada murid yang berhasil dalam studi dengan baik dan cemerlang sementara ada murid ada murid yang sedang-sedang saja dan bahkan ada murid yang gagal dalam studinya. Penelitian telah banyak mengungkapkan variabel-variabel yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan anak dalam belajar. Karena masih saja ada variabel yang mempengaruhi yang belum dapat diidentifikasi. Dengan kata lain varian dari keberhasilan belajar tersebut belum seratus persen dapat dijelaskan oleh variabel yang ada. Dengan istilah statistik masih ada residual atau koefisien determinasi belum bisa 1, lain kalau dibidang penelitian natural science dilaboratorium, dimana faktor penyebab dapat diidentifikasi dan dikendalikan sepenuhnya. Dan inilah salah satu kelemahan penelitian sosial.

Umpan balik (*feed back*) adalah perubahan yang terjadi pada suatu variabel penyebab akan memberikan dampak yang mempengaruhi variabel penyebab tersebut. Sehingga proses yang terjadi bisa berupa sebab akibat yang berganda. Misal, suatu proses penerimaan masyarakat terhadap program

keluarga berencana. Proses ini dimulai dengan adanya informasi atau pesan yang diterima individu-individu sebagai anggota masyarakat.

Informasi ini oleh individu akan diolah dengan berdasarkan informasi dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam pikirannya akan muncul suatu kesimpulan apa akibat yang timbul apabila ia ikut keluarga berencana sebagaimana pesan yang ia peroleh. Disamping itu ia akan mempunyai evaluasi atau penilaian tentang akibat dari keikutsertaannya dalam KB tersebut. Dengan kata lain, informasi atau pesan yang diterima akan menimbulkan "keyakinan" atau *believe*.

Tahap berikutnya, disposisi setuju atau tidak setuju ataupun netral terhadap partisipasi dalam program KB akan menimbulkan niat tertentu (*intention*). Kalau ia setuju untuk ikut KB. Sebaliknya seseorang yang bersikap ragu-ragu atau tidak setuju terhadap keikutsertaan dalam program KB dalam dirinya tidak akan muncul niat untuk ikut KB.

Adanya niat pada diri seseorang akan menimbulkan pada diri yang bersangkutan untuk tidak atau berperilaku tertentu sesuai dengan niatnya. Niat untuk ikut KB yang ada pada seseorang akan menimbulkan partisipasi aktif dari yang bersangkutan dalam KB. Hubungan tersebut akan timbul dengan asumsi bahwa individu yang bersangkutan bertindak secara rasional, artinya segala perilaku dilaksanakan tidak dengan keterpaksaan tetapi betul-betul berdasarkan keyakinan diri dalam diri sendiri.

Perlu dicatat, bahwa pengalaman dalam ikut program KB senang atau susah, manis atau pahit, akan memberikan pengaruh balik terhadap keyakinan dan sikap terhadap keikutsertaan dalam program KB tersebut. Pengaruh balik itu disebut "*feed back*". *Feed back* yang timbul mendatangkan dua kemungkinan. Pertama, memperkuat keyakinan dan sikap untuk terus ikut KB. Dengan kata lain, *feed back* bisa bersifat positif atau negatif. Investasi yang ditanamkan akan menentukan output industri. Secara sistematis semakin besar

modal yang ditanam dalam satu industri, semakin besar output yang dihasilkan. Output tersebut tidak semua akan digunakan untuk keperluan konsumsi, tetapi sebagian akan dikembalikan untuk ditamankan kembali sebagai investasi baru, dengan kata lain sebagai output merupakan feed back positif terhadap investasi. Sebaliknya, modal yang ditanamkan mengalami penyusutan baik karena pabriknya semakin tua ataupun ada inflasi sehingga penyusutan tersebut akan mengurangi besaran nilai investasi. Penyusutan ini berarti menimbulkan adanya feed back negatif.

Keseimbangan (*equalibrium*) adalah satu keadaan dimana dalam satu sistem adakecendrungan timbul kontra aksi dari timbul aksi yang menstabilisir keadaan yang ada. Contoh yang banyak dikemukakan adalah air condition yang bersifat optimis. Apabila mesin pendingin dihidupkan dan udara sudah mencapai suhu tertentu, maka secara otomatis mesin pendingin akan berhenti. Nanti kalau suhu kembali panas sampai pada titik tertentu mesin pendingin akan hidup kembali. Banyak ahli ilmu sosial menyetujui dan banyak pula yang menolak konsep keseimbangan pada sistem sosial. Ekplanasi fungsional menjelaskan sesuatu yang lain misalnya, mengapa harga saham dipasar di New York merosot jatuh ? ahli ekonomi moneter bisa menjelaskan bahwa kejatuhan harga saham dipasar modal karena Bank di Amerika menaikkan suku bunga. Sehingga bagi masyarakat dengan tingkat suku bunga yang tinggi itu orang akan lebih untung untuk menanamkan uang di Bank dari pada menanamkan uang di pasar modal. Di samping itu nilai dolar terus menerus turun. Hal ini berarti nilai uang yang miliki merosot terus. Oleh karenanya masyarakat menjual saham yang ia miliki untuk kemudian uangnya ditanamkan didalam bank dalam wujud mata uang asing yang kuat. Kalau yang menjual saham tidak banyak tidak menjadi masalah baru menjadi masalah karena semua orang bermaksud menjual saham tersebut. Oleh karenanya orang berlomba-lomba menjual sahamnya. Akibatnya antara penawaran dan permintaan tidak imbang. Penawaran saham

jauh lebih tinggi dari permintaan saham. Akibatnya, jelas harga saham merosot drastis. Ambil contoh lain, mengapa solidaritas masyarakat Iran tinggi? Orang bisa menjawab karena Iran terus menerus menghadapi konflik. Adanya konflik menyebabkan masyarakat membutuhkan rasa aman. Rasa aman diperoleh dengan mengembangkan solidaritas.

Ekplanasi induksi empiris adalah penjelasan suatu problema yang dihadapi lewat suatu penelitian empiris. Jadi jawaban dikembangkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Menurut Chafetz (1973) dalam ekplanasi di temui dua kejanggalan tautologi dan teleologi. Tautologi adalah suatu ekplanasi menerangkan keadaan, tetapi pada hakekatnya ekplanasi tersebut hanya mengulang apa yang sudah ada. Memang pernyataan tersebut secara defenisi betul hal tersebut tidak bisa dibantah lagi sehingga ekplanasi yang diberikan nampak berputar-putar tidak menjawab permasalahan. Misalnya, mengapa, si Guntur naik kelas ? jawabnya : sebab nilai raport nya baik. Jawaban tersebut tidak salah. Ekplanasi yang bersifat teleologi adalah ekplanasi yang sebenarnya menggunakan keadaan yang menggunakan keadaan yang diinginkan terjadi dimasa yang akan datang. Misalnya mengapa si Mega rajin belajar. Jawabnya "biar naik kelas". Sesungguhnya naik kelas itu merupakan keadaan yang akan terjadi dimasa yang akan mendatang yang merupakan antisipasi dari rajin belajar.

Kegunaan lain dari teori adalah untuk prediksi. Prediksi adalah suatu statement tentang apa yang terjadi diwaktu mendatang berdasarkan suatu teori. Konsep yang mirip dengan prediksi adalah konsep ekstrapolasi. Yakni pernyataan keadaan yang akan terjadi diwaktu yang akan datang sebagai kelanjutan trend yang sudah berlangsung. Misalnya, dengan adanya data data pertumbuhan penduduk selama waktu yang telah lalu, katakanlah pertumbuhan penduduk dari tahun 1950 sampai tahun 1970, kita bisa memperkirakan jumlah penduduk pada tahun 1990 dengan ekstra polasi.

Berbeda dengan ekstra polasi, prediksi didasarkan atas pengetahuan yang kita miliki, dibalik tren yang ada. Jadi kita memperkirakan pertumbuhan penduduk dimasa depan berdasarkan trend dan alasan-alasan terdapatnya trend tersebut. Misalnya, pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1970 pertumbuhan penduduk tinggi karena pendidikan penduduk masih rendah, fasilitas kesehatan masih terbatas, pekerjaan wanita diluar rumah tangga masih sempit. Oleh karenanya, adanya pengetahuan tentang perubahan untuk memprediksikan pertumbuhan penduduk dimasa depan. Adanya perubahan-perubahan pada variabel tersebut akan menyebabkan perubahan pula pada fertilitas dan mortalitas. Yang seterusnya akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Oleh karenanya, ketepatan prediksi akan banyak ditentukan oleh asumsi-asumsi yang melandasi prediksi tersebut. Biasanya, prediksi tidak hanya terdiri dari satu model, tetapi terdiri dari berbagai model.

Apakah prediksi mesti selamanya tepat. Jelas tidak, namanya saja prediksi. Ilmuwan sosial selamanya tidak bisa mengontrol semua variabel yang diteliti. Oleh karenanya, prediksi dalam ilmu sosial sering disebut "stochastic", yang artinya mirip dengan probabilitas.

Prediksi dalam ilmu sosial memang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terjadi diluar dugaan. Kadang kala faktor tersebut berupa interaksi antara fenomena yang ada pada saat waktu dan tempat tertentu. Hal itu memang sulit untuk diduga.

Teori dugaan digunakan untuk mengadakan kontrol sosial. Suatu teori dalam banyak hal mempunyai hubungan yang erat dengan fenomena sosial. Berdasarkan hubungan itu manusia bisa bertindak sebagai "men of action", mempengaruhi atau memanipulasi variabel untuk mempengaruhi variabel yang lain kearah yang diinginkan. Dalam kaitan ini, para ilmuwan dibidang sosial lebih untung bila dibandingkan dengan ilmuwan dibidang geologi atau astronomi yang menghadapi fenomena alam, misalnya gempa

bumi. Para ahli geologi saat ini bisa meramalkan gempa yang akan terjadi, berapa kekuatannya, luas daerah dan pusat gempa. Tetapi ahli geologi tidak bisa mempengaruhi, mencegah atau menunda terjadinya gempa. Paling-paling para ahli geologi hanya bisa memberikan peringatan agar masyarakat bersiap-siap untuk meninggalkan daerah gempa.

C. Konsep dan Pengembangannya

Ilmu sosial banyak sekali menggunakan abstraksi-abstraksi yang dibuat secara umum yang dinamakan konsep. Konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas. Umumnya konsep dibuat dan dihasilkan oleh ilmuwan untuk keperluan ilmiah yang khas dan tertentu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa konsep mengungkap pentingnya suatu fenomena. Agar fenomena yang dimaksud jelas bagi pengamat dan dapat dikaji secara sistematis, maka fenomena tersebut harus diisolasi dari interaksi dengan fenomena yang lain pada suatu saat tertentu. Ambil contoh, *group*, *power*, *demokrasi*, *stratifikasi sosial*, *status sosial*, *norma*. Masing-masing kata tersebut bisa disebut suatu konsep, dan memiliki banyak aspek yang mempunyai makna untuk suatu tujuan tertentu.

Konsep dibangun dari defenisi. Suatu defenisi adalah sistem terminologi, seperti kalimat, simbol atau rumus matematik, yang menunjukkan fenomena sebagaimana dimaksudkan oleh konsep. Sebagai contoh konsep konflik. Salah satu defenisi konflik adalah interaksi yang terjadi diantara kelompok-kelompok masyarakat dimana kelompok yang satu berusaha agar kelompok yang lain tidak berhasil mencapai tujuannya. Dengan defenisi semacam ini memungkinkan pembaca untuk menggambarkan dalam benaknya fenomena yang dimaksud oleh konsep konflik. Pembaca akan memperoleh gambaran yang sama tentang konflik itu.

1. Ciri-ciri konsep

Konsep yang berguna untuk menggambarkan teori memiliki ciri pokok yakni konsep tersebut memberikan makna yang satu kepada semua pihak yang menggunakannya. Namun demikian, karena konsep seringkali dinyatakan dalam bahasa sehari-hari, sehingga sulit untuk menghindari penggunaan kata-kata yang bisa mempunyai arti bermacam-macam, sehingga menunjukkan fenomena yang berbeda pula. Belum lagi, seringkali kata-kata yang digunakan merupakan bentuk jargon-jargon. Oleh karenanya suatu konsep ilmiah hendaknya dikemukakan dalam bahasa yang netral atau teknis, seperti simbol sistematis. Dalam teori sosial konsep yang dikemukakan dalam bahasa yang jelas tidak hanya mungkin, tetapi juga sangat dikehendaki. Suatu konsep harus dikemukakan secara tepat sehingga pembaca memiliki tafsiran yang sama. Konsep yang digunakan membangun teori ini juga memiliki ciri lain yakni bersifat abstrak. Beberapa konsep menunjukkan fenomena yang konkrit waktu dan tempat tertentu. Konsep yang lain lebih abstrak menunjukkan fenomena yang tidak ada kaitannya dengan waktu dan tempat secara konkrit. Perlu dicatat, bahwa konsep memiliki problema yakni bagaimana hal yang abstrak tersebut bisa cocok dengan kenyataan yang ada sehari-hari dalam masyarakat? Dalam teori sosial, konsep abstrak harus diiringi dengan apa yang disebut dengan definisi operasional. Yakni prosedur menunjukkan kepada peneliti bagaimana cara melihat dan menafsirkan konsep yang abstrak kedalam wujud yang konkrit dan riil.

Salah satu pengembangan teori dimulai dengan menemukan konsep. Sebab teori adalah merupakan pernyataan-pernyataan, dimana masing-masing pernyataan-pernyataan mengandung dua konsep atau lebih. Oleh karenanya apabila seseorang ingin mempelajari suatu aspek dalam kehidupan dan kemudian mengembangkan teori yang berkaitan dengan aspek yang dipelajari, maka yang

bersangkutan harus menemukan konsep-konsep yang menunjukkan apa yang sesungguhnya ia hadapi.

Dalam mengembangkan teori, konsep dapat dikelompokkan kedalam konsep kategori dan konsep dimensi. Pengelompokan lain, konsep dapat disebut konsep khusus non variabel dan konsep variabel. Konsep khusus non variabel merupakan sekumpulan konsep kategori yang secara sederhana hanya menunjukkan label suatu fenomena. Misalnya, group, kelas sosial, fundamentalis, kapitalis, demokrasi, birokrasi. Sedang konsep variabel adalah konsep yang menunjukkan fenomena dalam berbagai tingkat yang berbeda. misalnya, pendidikan, umut, kepadatan penduduk.

Ciri dari konsep kategori atau “spesifik non variabel adalah konsep tersebut bisa mempunyai makna yang berbeda-beda bagi masyarakat yang berbeda-beda. Atau bahkan makna tersebut bisa berbeda bagi satu orang dengan yang lain. Sebutlah sebagai contoh konsep demokrasi bagi masyarakat Amerika dan juga berbeda bagi masyarakat Cina. Tetapi bukanlah, derajat demokrasi tersebut dapat diukur, sehingga bisa dikatakan satu masyarakat lebih demokrasi, sebenarnya seseorang sudah mulai mengukur derajat demokrasi, atau dikatakan sudah mulai memasuki konsep variabel atau konsep dimenasi. Misalnya, tingkat partisipasi dalam pemilu, tingkat kebebasan untuk berbicara.

Pada dasarnya konsep variabel mempunyai banyak keuntungan daripada konsep “spesifik non variabel”. Misalnya, konsep spesifik non variabel dikemukakan dalam suatu hipotesis “Industrialisasi mengantarkan masyarakat kepada revolusi sosial”. Hipotesis tersebut sangat abstrak dan tidak dapat diukur generalisir. Tetapi kalau digunakan konsep variabel hipotesis tersebut akan menjadi “tingkat kompleksitas masyarakat akan meningkatkan tingkat konflik”. Jadi konsep variabel lebih jelas dan dapat diukur kemudian digeneralisir. Namun, memang setiap teori dalam

banyak hal mengandung kedua konsep diatas. Dan juga, konsep spesifik non variabel bisa diubah menjadi konsep variabel.

Hage (1972) mengemukakan adanya keuntuga apabila kita egguaka kosep dimensi atau konsep variabel dibandingkan kalau kita menggunakan konsep non variabel atau kategori, yaitu :

- a. Konsep variabel atau konsep dimensi dapat diterapkan untuk budaya manapun juga dan memungkinkan seseorang untuk menemukan teori yang relatif universal
- b. Klasifikasi yang kita buat menjadi lebih tepat, mantap, dan cocok konsep variabel lebih muda dipahami dan dibahas.

Tetapi dalam pengembangan teori sosial tidak selamanya kita berhadapan dengan konsep dimensi. Tidak jarang kita berhadapan dengan konsep non variabel atau kosep kategori. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk edapatka kosep variabel tersebut? Ada beberapa cara :

- 1) pertama kita dapat menstransfer konsep kategori :
 - a) Laki-laki
 - b) Wanita

Berdasarkan kaji teoritis dapat kita diidentifikasi dimensi yang menyangkut jenis kelamin, antara lain : inteligensi, emosional, kemampuan matematik, rasa seni. Beberapa dimensi ini kalau diterapkan untuk jenis kelamin ada kecendrungan.

Laki-laki :Lebih intelijen, kurang emosional, lebih mampu matematika dan kurang tajam rasa seninya.

Wanita :Kurang intelijen, lebih emosional, kurang mampu matematika dan rasa seni tajam.

Dengan berdasarkan dimensi ini kita bisa mengembangkan konsep teks dalam kaitan dengan dimensi-dimensi diatas.

Contoh lain, variabel agama dengan kategori :

- a. Protestan
- b. Katholik
- c. Yahudi

Dari konsep atau variabel agama yang bersifat kategori kita bisa merubah ke variabel dimensi dengan identifikasi dimensi-dimensi yang terkait dalam konsep kategori tersebut. Dalam kaitan taori bunuh diri, bisa kita identifikasi berapa banyak ajaran-ajaran ketiga agama tersebut yang menyangkut bunuh diri.

Berdasarkan dimensi-dimensi seks dan agama diatas, Durkheim mengembangkan teori bunuh diri. Ditinjau dari emosi maka dapat dinyatakan secara teoritis bahwa semakin besar emosi semakin besar kecendrungan bunuh diri. Jadi perempuan lebih besar kecenderungannya untuk bunuh diri dibandingkan dengan laki-laki. Demikian juga, ditinjau dari ajaran agama, dapat dinyatakan semakin banyak ajaran agama yang membahas bunuh diri, semakin kecil kemungkinan penganut agama tersebut melakukan bunuh diri. Karena agama Yahudi paling banyak mengandung ajaran melarang bunuh diri, maka pengikut Yahudi yang melakukan bunuh diri sangat kecil sekali, dibandingkan dengan penganut dua agama yang lain. Dari apa yang dikemukakan diatas, dapat dilihat bahwa variabel seks diubah menjadi variabel dimensi yakni dimensi emosional. Sedang variabel kategori agama diubah menjadi variabel ajaran yang mengandung bunuh diri. Jadi perubahan konsep kategori menjadi dimensi erat kaitannya dengan permasalahan yang perlu dijelaskan.

- 2) Memeras beberapa variabel menjadi satu variabel

Pengurangan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara :

- a) Zetterberg (1965) memberikan cara untuk mengurangi variabel dengan mengembangkan konsep yang lebih umum untuk menggantikan

beberapa konsep yang lebih spesifik. Misalnya, variabel grup, organisasi/administrasi, masyarakat, diperas dan disubstitusi menjadi variabel yang lebih umum, yaitu kolektifitas sosial.

b) Analogi

Cara ini mengambil proses yang semacam dengan proses yang sudah ada, misal konflik erat kaitannya dengan variabel intensitas konflik perseorangan atau bentrokan dalam suatu grup. Jadi konflik bisa langsung maupun tidak langsung. Konflik ini bisa dianalogikan dengan persaingan anak dimana yang satu dengan yang lainnya ingin mendapatkan kemenangan, atau persaingan harga. Jadi, pada intinya, konflik bisa dianalogikan dengan kompetisi.

c) membandingkan konsep-konsep untuk mengembangkan konsep yang baru.

Cara ini dapat dilaksanakan lewat beberapa langkah :

Pertama, kembangkan secara spesifik unit-unit analisis termasuk definisi yang jelas. Kedua, berikan masing-masing sebanyak mungkin contoh. Misal, definisi norma, dengan contoh-contoh :

- a) Kebanyakan garam tidak mematikan
- b) Jangan tidur dengan istri selagi anak belum tidur
- c) Gunakan helm
- d) Jangan merokok
- e) Berjalanlah disebelah kiri, berhentilah pada waktu tanda merah menyala, Ketiga berikan sokre untuk masing-masing norma dengan meletakkan dua nilai ekstrim di dua buah kutub

Sulit sekali melakukan pembicaraan teori apabila peneliti menggunakan simbol yang memiliki makna dan mencakup masalah-masalah yang erat kaitannya dengan emosi teori-teori sosial yang akan diuji secara empiris memerlukan konsep-konsep yang memiliki arti jelas dan satu, khususnya kesatuan penafsiran antara peneliti dan

pembaca laporan penelitian tersebut konsep-konsep yang mengandung dan mengundang emosi seyogyanya dihindari. Hal ini diperlukan dalam rangka mencapai obyektifitas pandangan seseorang. Kalau sekiranya konsep yang menyangkut nilai-nilai dan sikap memang diperlukan, maka seyogyanya hal tersebut dimasukkan kedalam asumsi. Namun perlu dicatat bahwa dalam teori-teori banyak diketemukan konsep yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang memiliki makna ganda. Oleh karena itu untuk menghadapi hal seperti ini, Chafetz (1978) menganjurkan dua hal, (a) Konsep yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari diberikan defenisi-defenisi yang jelas dan konsep tersebut hanya digunakan sebagaimana telah didefenisikan, (b) Mengembangkan kata atau istilah baru untuk membedakan dari konsep yang sudah ada.

Dua cara untuk memecahkan problema diatas banyak digunakan dalam pengembangan teori sosial. Namun demikian, dalam prakteknya tetap saja, menimbulkan problema. Penulis sudah memberikan defenisi yang jelas atas suatu konsep, tetapi saja para pembaca akan memberikan makna yang berbeda atas konsep tertentu yang dikemukakan oleh peneliti atau penulis, menurut arti umum yang berlaku. Sedangkan, kalau penulis mengembangkan konsep baru, dalam banyak penulis tidak bisa menghindarkan diri sepenuhnya dari kecendrungan untuk menggunakan jargon-jargon. Disamping itu, dengan adanya konsep baru juga menimbulkan kebingungan menyebabkan komunikasi tidak lancar. Akhirnya perlu dicatat disini, banyak konsep-konsep yang dikemukakan, karena terlalu sering, menjadikan konsep tersebut kehilangan makna sesungguhnya.

Para ilmuwan yang menggeluti ilmu sosial cenderung lebih banyak menggunakan kata-kata dari pada menggunakan simbol-simbol matematik. Kata-kata

memang sekedar simbol yang dalam banyak hal tidak mempunyai arti riil. Dalam kaitan ini perlu dicatat dua hal. Pertama, seringkali orang melakukan pemborosan yang sia-sia, apabila secara berlebih-lebihan mereka berdebat tentang makna suatu konsep. Ambillah contoh perdebatan yang dilakukan ilmuwan sosial tentang makna kata "sekularisasi" ataupun dikalangan umat islam konsep tuhan dalam kalimat Syahadat : Tiada Tuhan selain Allah atau tiada Tuhan selain Tuhan. Jadi mereka berpolemik tentang makna konsep-konsep yang bisa kategorikan sebagai pemborosan. Sebab polemik tersebut sebenarnya tidak perlu diperpanjang atau berkepanjangan. Kita sebenarnya bisa menemukan persetujuan tentang sesuatu apapun juga dengan tidak perlu bertele-tele. Sebab, pada dasarnya makna itu hanya suatu kebersamaan dalam melihat suatu simbol yang dihadapi bersama yang ini bisa berubah menurut kondisi, situasi maupun waktu. Memang konsensus sangat penting perannya dalam memberikan makna suatu simbol guna melancarkan arus komunikasi. Lebih-lebih perlu dipahami, dewasa ini banyak konsep yang bisa mempunyai arti yang berbeda-beda dalam proses komunikasi yang berbeda. Sebagai contoh kata sikap dalam proses komunikasi tidak ditentukan suatu konsensus maka proses komunikasi tidak ditentukan suatu konsensus maka proses seseorang menafsirkan sikap sebagai suatu yang mencakup kognitif, afeksi dan kognasi. Dipihak lain seseorang mengartikan konsep ini hanya sebagai afeksi belaka. Dua penafsiran tersebut bisa menimbulkan perbedaan yang tajam. Oleh karenanya perlu diketemukan konsensus apa yang dimaksud "sikap" tersebut.

Hal kedua yang perlu pula mendapatkan perhatian adalah bahwa kata atau terminologi hanya simbol. Kalau sampai simbol yang bersifat abstrak kita perlakukan seolah-olah sesuatu yang riil maka kita akan

mengambil langkah yang salah. Bagaimanapun perlu juga dipahami bahwa konsep hanyalah merupakan sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan fenomena secara konkrit, tetapi konsep tersebut tidak bisa diperlakukan sebagai sesuatu yang konkrit. Misalnya suatu pembahasan tentang keseimbangan. Manusia merupakan suatu kesatuan sistem, oleh karenanya dalam tubuh manusia terdapat suatu sistem keseimbangan secara teratur. Masyarakat merupakan suatu kesatuan sistem. Oleh karenanya menurut golongan fungsional, masyarakat itu mempunyai sistem keseimbangan otomatis. Sudah barang tentu hal ini jelas sepenuhnya tidak benar. Apa yang perlu mendapatkan perhatian dari contoh diatas adalah adanya pembahasan yang berbeda dengan memberikan makna yang sama.

Pada pembahasan tentang konsep, kita bisa mengidentifikasi konsep yang berdimensi tunggal (unidimensional) dan konsep yang berdimensi jamak (multi dimensional). Hampir dalam setiap penelitian cenderung menggunakan konsep yang berwajah tunggal. Hage (1972) mengemukakan bahwa dalam pengembangan teori konsep yang berdimensi tunggal lebih mempunyai manfaat dari pada konsep yang berdimensi banyak. Namun, untuk menjelaskan fenomena yang sangat kompleks, konsep yang bersegi banyak sangat penting perannya. Sebagai contoh, konsep demokrasi bisa memiliki banyak dimensi. Misalnya, dimensi struktur politik, dimensi proses politik, dimensi budaya politik. Dalam banyak hal konsep yang berwajah majemuk ini dipecah belah menjadi konsep yang lebih sederhana yang memiliki wajah tunggal. Dengan demikian dimensi struktur politik dalam demokrasi dapat berdiri sendiri sebagai suatu konsep.

Dalam kehidupan sosial, banyak sekali kita temui fenomena sosial yang sangat kompleks. Misalnya birokrasi, bentuk sistem politik, bentuk sistem ekonomi.

Suatu fenomena yang kompleks dimata peneliti bisa menjadi jelas apabila sesuatu yang kompleks tersebut diubah menjadi banyak bentuk yang kecil-kecil dan berwajah tunggal. Sebuah pohon akan mudah diamati dan kita pelajari dari pada kalau kita mengamati hutan. Namun, dalam hal-hal tertentu, meski kita tahu betul tentang sebuah pohon, kadang-kadang tidak besar maknanya tanpa pengetahuan tanpa hutan. Oleh karenanya pengetahuan tentang hutan tersebut diperlukan. Dengan kata lain, konsep yang berdimensi majemuk juga perlu dipahami. Kapan konsep yang berwajah majemuk atau berwajah tunggal kita pergunakan ? Jawabannya adalah tergantung pada kondisi dan situasi. Kalau seorang peneliti ingin mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh maka sebaiknya ia menggunakan konsep yang berwajah tunggal. Tetapi apabila peneliti ingin mendapatkan gambaran yang mendalam dari suatu obyek yang kecil maka seyogyanya konsep berwajah majemuk digunakan.

Pada umumnya teori-teori sosial bertujuan untuk memahami fenomena yang bersifat umum dari pada sesuatu yang bersifat khusus. Oleh karenanya, dalam mempelajari fenomena sosial penggunaan konsep berwajah tunggal lebih mendapatkan prioritas dari peneliti. Konsep yang berdimensi majemuk tepat apabila digunakan untuk suatu studi sejarah atau antropologi. Konsep yang berdimensi banyak ini kaya akan diskripsi dan mendetail. Dalam kaitan dengan bentuk data. Konsep yang berdimensi banyak ini dikategorikan ke dalam data nominal. Misal, konsep demokrasi dapat dikategorikan kedalam klasifikasi demokrasi dan non demokrasi atau totaliter. Bagaimana menyusun kategori dalam konsep yang berwajah majemuk ini ? Setidaknya dalam mengembangkan kategori ini peneliti harus memenuhi dua syarat. Pertama, kategori yang dikembangkan menampung semua kasus yang ada.

Misalnya, kalau seseorang ingin menyusun kategori untuk pendidikan misalnya, klasifikasi yang dikembangkan harus bisa menampung dari orang yang buta huruf sampai yang lulus doktor. Kedua, klasifikasi yang dikembangkan tidak bisa suatu kasus yang sudah ditampung oleh kategori yang lain atau tidak ada kasus yang bisa ditampung oleh dua kategori variabel dan pengukuran.

D. Variabel dan Dimensi

Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut dari seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. pendapat lain menyatakan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Badan, misalnya adalah konsep dan bukan variabel, karena badan tidak mempunyai keragaman nilai. Namun besar badan, tinggi badan adalah variabel, karena adanya keragaman nilai, bisa 45 KG atau 40 Kg, 160 cm atau 170 cm. Seks adalah variabel yaitu laki-laki dan perempuan, status perkawinan dan tingkat pendapatan pegawai juga contoh suatu variabel. Tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja, merupakan atribut dari setiap orang. Berat, ukuran, bentuk dan warnamerupakan atribut dari objek.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dirumuskan bahwa variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang maupun objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Demikian pula dengan dimensi. Hanya saja dimensi lebih spesifik lagi atau bagian dari variabel.

Umumnya variabel dibagi atas 2 jenis, yaitu variabel kontinu dan variabel diskrit. Variabel dapat juga dibagi sebagai variabel dependen (variabel terikat), variabel independen (variabel bebas), variabel moderator, variabel intervening dan variabel kontrol.

1. Variabel kontinu adalah variabel yang dapat kita tentukan nilainya dalam jarak jangkau tertentu dengan desimal yang tidak terbatas, misalnya berat atau tinggi badan.
2. Variabel deskrit adalah variabel yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal dibelakang koma. Misalnya jenis kelamin atau status perkawinan.
3. Variabel independen adalah merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.
4. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi sebab akibat, karena adanya variabel bebas.
5. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen), disebut juga variabel independen kedua.
6. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diukur.
7. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan dibuat konstan sehingga peneliti dapat melakukan penelitian yang bersifat membandingkan.

E. Pengembangan Hipotesis

Suatu penelitian yang merupakan serangkaian-serangkaian kegiatan, mulai dari menemukan problema sampai menarik kesimpulan, pada dasarnya bertujuan untuk mengetes suatu hipotesis. Dalam suatu penelitian hipotesis dibangun berdasarkan teori-teori yang telah ada. Sehingga tanpa adanya teori sulit untuk bisa mengembangkan hipotesis penelitian yang baik. Dengan hipotesis, si peneliti mempertanyakan keabsahan suatu teori dengan kenyataan yang ada. Kalau hipotesis cocok dengan kenyataan, maka hipotesis tersebut akan menjadi teori baru yang lebih mantap atau lebih luas dari teori yang digunakan untuk mengembangkan hipotesis, dan memang inilah hakekat suatu penelitian.

Sebagai contoh fungsi teori, misalnya teori transisi demografi, yang menerangkan sebab-sebab perbedaan dan penurunan fertilitas. Perkembangan suatu masyarakat dapat dibagi dalam tiga tahap : tahap masyarakat tradisional, masyarakat transisi, masyarakat modern. Pada masyarakat tradisional angka pertumbuhan penduduk rendah. Sebab angka kelahiran tinggi dan angka kematianpun tinggi. Sedangkan pada masyarakat modern, angka pertumbuhan penduduk juga rendah, tetapi dengan penyebab yang berbeda, yakni angka kelahiran rendah dan juga angka kematian rendah. Diantara keduanya pada bentuk masyarakat transisi, angka pertumbuhan penduduk tinggi, sebab angka kelahiran tinggi, sedangkan angka kematian rendah. Perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik menyebabkan mortalitas menurun. Dalam keadaan fertilitas tetap, mortalitas turun akan maka angka pertumbuhan penduduk meningkat. Perubahan kondisi sosial ekonomi akan meningkatkan urbanisasi. Perubahan kondisi sosial ekonomi akan meningkatkan aspirasi harapan pendidikan untuk generasi baru. Perubahan kondisi sosial ekonomi akan memberikan kesempatan pada wanita untuk berpartisipasi dalam pekerjaan diluar rumah tangga. Pola kehidupan yang semakin maju menyebabkan biaya untuk memelihara anak dan pendidikan anak semakin tinggi. Pendidikan penduduk yang semakin tinggi akan menurunkan angka fertilitas. Keterlibatan wanita pada pekerjaan diluar rumah tangga akan menurunkan fertilitas. Semakin tinggi biaya untuk memelihara dan menyekolahkan anak, orang tua cenderung mempunyai anak sedikit. Perubahan kondisi sosial ekonomi menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Kegunaan pertama teori ini adalah untuk klasifikasi sesuatu konsep. Misalnya, angka fertilitas rendah, tinggi dan sedang. Laju pertumbuhan cepat, sedang dan rendah. Negara maju dan sedang berkembang. Kegunaan kedua adalah ekplanasi, yakni merangkan suatu keadaan yang sudah terjadi. Mengapa di negara Cina, laju pertumbuhan penduduk cepat? Teori ini akan dapat memberikan uraian.

Teori ini juga bisa untuk memprediksi kalau kondisi sosial ekonomi negara semakin baik, maka angka laju pertumbuhan penduduk akan menurun. Demikian pula, berdasarkan teori transisi demografi ini bisa dikontrol perkembangan penduduk dimasa mendatang. Artinya, kalau suatu negara bermaksud untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk, maka negara yang bersangkutan harus ditingkatkan, partisipasi wanita dalam pekerjaan diluar rumah tangga harus diperluas, fasilitas kesehatan diperbaiki. Berdasarkan teori transisi ini, para peneliti juga mengembangkan banyak hipotesis yang menyangkut perkembangan sosial ekonomi dan kependudukan.

Suatu penelitian akan berhadapan dengan banyak problema dan data. Memecahkan problema dengan mengumpulkan data sebanyak-banyak tidak akan pernah selesai dan hasilnya tidak akan banyak berguna. Teori ini akan memberikan petunjuk pemecahan problema dan data apa yang diperlukan dan bagaimana data tersebut diorganisasi/ administrasikan. Lebih penting lagi teori ini akan memberikan petunjuk bagaimana data yang telah dikumpulkan tersebut diinterpretasikan. Chafetz (1978) menyatakan “.... *Fact never speak for themselves*”, *they are always recognized as worthy of notice and understood within some interpretive framework*. Apakah teori transisi demografi tersebut dapat digeneralisir pada seluruh negara? Jawabannya adalah belum tahu. Generalisasi teori sosial bersifat hipotekal. Teori sosial sering kali disebut “*hypothetical deductive system, because it states deductive connections among hypotheses. The premises of a theory are empirical hypotheses that explain the generalizations they employ*” (Brodbeck, 1986 : 457). Dalam kaitan inilah, maka teori sosial harus selalu diuji dan diperbaharui dan dikembangkan. Dari contoh teori transisi demografi ini dapat dilihat perbedaan antara teori dan hukum. Hukum permintaan dan penawaran, misalnya selama ada kebebasan jual beli dan masyarakat akan memperoleh informasi yang benar, maka hukum permintaan tersebut akan

tetap berlaku. Demikian pula hukum alam, misalnya yang menyatakan :

Jika volume gas tetap, meningkatnya temperatur akan menaikkan tekanan. Hukum ini dapat digeneralisir dimanapun juga. Dengan hukum ini dapat diterangkan mengapa ban sepeda pecah apabila sepeda tersebut diletakkan diterik matahari.

Namun demikian, karena kemajuan ilmu pengetahuan memungkinkan suatu hukum berubah menjadi teori. Misalnya, hukum grafiti bumi. Dimana setiap benda mendapatkan daya tarik dari bumi sehingga setiap benda apabila dilempar akan jatuh kebumi. Tetapi dengan kemajuan ilmu ke ruang angkasa, hukum grafitasi bumi ini tidak berlaku diruang angkasa. Artinya apabila diruang angkasa sesuatu benda dilempar, benda tersebut tidak akan jatuh ke bumi, melainkan tepat melayang-layang. Dengan dasar kemajuan ilmu ruang angkasa tersebut, kini sebagian ahli menyebut "teori grafitasi", tidak "hukum grafitasi".

F. Defenisi Operasional, Indikator, dan Pengukuran

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Setelah peneliti memberikan defenisi operasional kepada variabel tersebut, maka peneliti dapat memberikan cara mengukur variabel tersebut dengan menurunkan beberapa indikator, yang kemudian dari indikator dikembangkan beberapa item pertanyaan.

Pengukuran adalah penetapan / pemberian angka terhadap obyek atau fenomena menurut aturan tertentu.

Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mendapatkan data yang akurat, sedangkan dalam peneliian kualitatif peneliti lebih banyak menjadi instrumen untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam

dan data-data yang tidak dapat diukur. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Setiap instrumen akan mempunyai skala mengkuatifikasikan data dari pengukuran suatu variabel.

Macam-macam skala pengukuran :

1. Skala Nominal, yaitu mengkategorikan, memberi nama, dan menghitung fakta-fakta dari objek yang diteliti. Misalnya, nama suku, jenis kelamin dan jumlah barang.
2. Skala Ordinal, yaitu sudah melakukan pengukuran adalah skala berjenjang dimana sesuatu lebih atau kurang dari yang lain yang jarak antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Misalnya golongan gaji pegawai.
3. Skala Interval, yaitu sudah melakukan pengukuran adalah skala yang jarak antara satu dengan data lain sama tetapi tidak mempunyai nilai nol (0) absolut (artinya nol tidak ada artinya). Dan dalam skala interval tidak dapat dibuat untuk penjumlahan atau kelipatan. Misalnya 100 derajat celcius bukan berarti 50 derajat celcius + 50 derajat celcius atau 20 derajat celcius x 5
4. Skala Ratio, yaitu sudah melakukan pengukuran salah skala yang jarang antara satu dengan yang lain sama, tetapi mempunyai nilai nol absolut (artinya nilai nol ada). Misalnya gaji pegawai nilai nol rupiah berarti tidak mempunyai gaji sama sekali.

Berbagai Tipe Skala Pengukuran

Berbagai ahli ilmu sosial membedakan dua tipe skala menurut fenomena sosial yang diukur, yaitu :

1. Skala pengukuran untuk mengukur perilaku susila dan kepribadian.
2. Skala pengukuran untuk mengukur berbagai aspek budaya lain dan lingkungan sosial.

Yang termasuk yang pertama yaitu skala sikap, moral, karakter dan partisipasi sosial. Yang termasuk yang kedua yaitu skala untuk mengukur status sosial ekonomi, lembaga-

lembaga sosial, kemasyarakatan dan kondisi kerumah tanggaan.

Berbagai skala sikap yang sering digunakan ada 5 macam yaitu :

1. Skala Likert, yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala Likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi sub variabel (dimensi) kemudian dijabarkan menjadi komponen (indikator) yang dapat diukur. Komponen (indikator) ini dijadikan titik tolak untuk menyusun item pertanyaan. Jawaban setiap item pertanyaan mempunyai gradasi.

- a. Sangat setuju/ selalu/sangat positif diberi skor 5
- b. Setuju/seing/positif diberi skor 4
- c. Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor 3
- d. Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif diberi skor 2
- e. Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat negatif diberi skor 1

2. Skala Guttman

Skala pengukuran dengan tipe ini dapat berupa jawaban yang tegas ya atau tidak, benar atau salah, ada atau tidak ada. Misalnya apakah anda ke Kampus naik bus jawabnya ya atau tidak.

3. Semantic Defferensial, yaitu dalam suatu garis kontinum. Misalnya, beri nilai gara kepemimpinan pimpinan anda.

5 4 3 2 1

Bersahabat ←————→ tidak bersahabat

4. Ratis Scale, yaitu data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.

Misalnya seberapa baik tata ruang di kantor Walikota.

Jawabannya :

- 4 bila tata ruang sangat baik
- 3 bila tata ruang cukup baik
- 2 bila tata ruang kurang baik
- 1 bila tata ruang sangat tidak baik

Jawaban dengan melingkari nomor jawaban

G. Pengembangan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dapat dikembangkan dari indikator yang berisikan pertanyaan atau item yang akan diteliti untuk mengukur indikator, dimensi, sampai kepada variabel. Instrumen dapat berupa Kuesioner, Daftar Pedoman Wawancara,, dan Daftar Pedoman Observasi. Namun suatu instrumen yang baik harus diuji coba dulu dilapangan sehingga instrumen tersebut memenuhi validitas (mempunyai kemampuan yang baik untuk mengukur objek yang diukurnya) dan Reliabilitas (tingkat kepercayaan).

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian and Ramon, Tiar (2016) *Hukum Bisnis*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-56-3
- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2016) *MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN Hasil Penelitian Seri Kedua*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-54-9
- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2016) *Peran dan Dinamika Dewan Komisaris Bank Daerah*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-52-5
- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2015) *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-47-1
- Muchlis Adnan, Indra and Hamim, Sufian (2015) *Ideal dan Praktik Dalam Administrasi Negara*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-45-7
- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2015) *Ekologi Administrasi*. Trussmedia Grafika. ISBN 978-602-0992-43-3
- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2014) *Menuju Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir Visioner Prospek dan Tantangan*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-36-5
- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2014) *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-34-1
- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2014) *Sistem Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Kabupaten Rokan Hulu*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-32-7

- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2013) *Manajemen Strategis Pembangunan Daerah dan Pedesaan*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-26-6
- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2013) *Manajemen Strategis Dalam Organisasi*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-25-9
- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2013) *Administrasi, Organisasi dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep dan Aplikasi*. Trussmedia Grafika. ISBN 978-602-0992-28-0
- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2013) *Organisasi dan Manajemen*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-27-3
- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2012) *ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN Konsep, Pendekatan, Teori dan Aplikasi di Indonesia*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-38-9
- Adnan, Indra Muchlis and Hamim, Sufian (2012) *BUNGA RAMPAI ILMU-ILMU SOSIAL: Hasil Penelitian Seri Kesatu*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. ISBN 978-602-0992-40-2
- Brannen, Julia. 1997. *Memadu Metode Penelitian, Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamim, Sufian, Nurman, Nurman and Yusriadi, Yusriadi and (2022) *Development of Pluralism Education in Indonesia: A Qualitative Study*. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 9 (3). pp. 106-120. ISSN 2149-1291
- Hamim, Sufian and Vianda, Lolita and Ermayuna, Syarifah (2021) *Perencanaan Strategis Pengembangan Pantai Solop Pulau Cawan Sebagai Destinasi Objek Pariwisata Desa Nelayan Dan Hutan Mangrove Dunia*. Pascasarjana Ilmu

Administrasi Universitas Islam Riau. pp. 1-91.
(Unpublished)

Hamim, Sufian (2021) *Strategi Pengelolaan, Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Untuk Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Riau*. Biro Kesra Sekda Provinsi Riau. pp. 1-22.

Hamim, Sufian, Abdullah, Syapril and Ermayuna, Syarifah (2021) *Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir*. Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau. pp. 1-83. (Unpublished)

Hamim, Sufian (2021) *Visi Bakal Calon Rektor UIR (Periode 2021-2025) Universitas Islam Riau Masuk Sepuluh Universitas Terbaik Di Indonesia Dan Bangkit Menuju Berkelas Dunia Berbasis Iman Dan Taqwa*. Forum Pengurus YLPI. pp. 1-55. (Unpublished)

Hamim, Sufian and Adnan, Indra Muchlis and Kurniawan, Andri (2019) *A Feasibility Study of the Expansion of the Districts of Pelalawan Regency, South Riau, Indonesia*. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 10. pp. 41-57.

Hamim, Sufian and Indrastuti, Sri (2019) *The Open System of Strategic Planning for the Development of Rural Autonomy in Riau, Indonesia*. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 10.

Hamim, Sufian and Vianda, Lolita and Ermayuna, Syarifah (2019) *Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu Di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Industrialisasi Pengolahan Hasil Menjadi Pakan Ternak/Ikan Di Kabupaten Indragiri Hilir*. Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau. pp. 1-127. (Unpublished)

Hamim, Sufian and Nurman, Nurman (2006) *Studi Kelayakan Dan Proposal Pembukaan Program Studi S2 Ilmu Pemerintahan*

Pascasarjana Universitas Islam Riau. Pascasarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. pp. 1-60.

Hamim, Sufian (2009) *Konsep Model Gerakan Pengembangan Satu Juta Hektar Lahan Non Produktif Di Provinsi Riau (Gesaladuri) Pola Investasi dan Kemitraan.* PT Faristama Agro Raya. pp. 1-39.

Hamim, Sufian, Nurman Nurman and Suryandartiwi, Wiwik. (2021). *Strategi Planning Innovation Of Rural Development In Riau Province, Indonesia.* Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau. pp. 1-38. (Unpublished)

Hamim, Sufian and Nurman, Nurman. (2005). *Studi Kelayakan Dan Proposal Pembukaan Program Studi S2 Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau.* Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi UIR.

Hamim, Sufian (2005) *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Administrasi Perpajakan dan Manajemen Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.* In: *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FISIP UIR.* (Unpublished)

Hamim, Sufian. (1994). *Perencanaan Berdasarkan Situasi dan Kondisi Merupakan Salah satu Determinan Pokok Dalam Penentuan Target Pungutan dan Pendapatan Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kodya Pekanbaru.* Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Tesis. Tidak Dipublikasikan.

Moleong, Lexy J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Edisi III. Yogyakarta : Rake Sarasin.

Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.* Bandung : Tarsito.

- Nazir, Mohammad. (1985). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nehnevajsa, Jiri. (1972). *Methodological Issues in Institution Building Research. Institution Building and Development : From Concepts to Application*. Yoseph W Eaton, (ed.). London : Sage Publication.
- Ndraha, Taliziduhu. (1988). *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Rusidi. (1992). *Dasar-dasar penelitian Dalam Rangka Pengembangan Ilmu*. Bandung: Pascasarjana UNPAD.
- Saefullah, Asep Djadja. (1993). Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Lapangan : Khususnya Dalam Studi Kependudukan. *Jurnal Media Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran*. Bandung: UNPAD.
- Sugiyono. (1992). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Winardi. (1986). *Metodologi Research*. Bandung : Alumni.
- Sasmita, Y., S. (1993). *Filsafat Ilmu*. Bandung : Alumni.

TENTANG PENULIS

PENULIS 1

Prof. Dr. H. Sufian Hamim, M. Si



The first author obtained his Bachelor's degree in Constitutional Law at the Universitas Islam Riau in 1985-1989. He received a Master's degree in Public Administration from the Universitas Padjadjaran in 1992-1994, and obtained a Doctorate Degree in Public Administration from the Universitas Padjadjaran in 1998-2002. He has been a lecturer at the Faculty of Social and Political Sciences at the Universitas Islam Riau since 1990, and a lecturer teaching Public Administration at the Postgraduate Studies of the Universitas Islam Riau since 2007. His current research interests are Public Administration, Strategic Management and Development Planning.

email: sufianhamim@soc.uir.ac.id

SCOPUSID :

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213145366>

ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0001-5780-2870>

PENULIS 2

Dr. Dra. Wiwik Suryandartiwi A, MM



The second author obtained the Bachelor Degree from The Communication Study Program of Sebelas Maret State University in Solo, the Master Management in Atmajaya University in Yogyakarta, and the Doctoral Program at Tujuh Belas Agustus (Untag) University in Surabaya.

Now she is Rector of Awal Bros University in Pekanbaru, Indonesia.

email:

wiwik@stikesawalbrospekanbaru.ac.id

SCOPUS ID :

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091973576&origin=resultslist&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

**STRATEGI KERJASAMA TIM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENGEMBANGAN PROGRAM KETAHANANPANGAN
DIBIYAI DARI DANA DESA
DI DESA BARU KABUPATEN KAMPAR**

PROPOSAL TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Penyusunan Tesis Pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**



Oleh :

**NAMA : SYARIFAH ERNA YUNA
NOMOR MAHASISWA : 217121084
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'la yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini dengan Judul "Strategi Kerjasama Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pengembangan Program Ketahanan Pangan Dibiayai Dari Dana Desa di Desa Baru Kabupaten Kampar", dalam rangka memenuhi persyaratan penyusunan Tesis.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar Proposal Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditentukan oleh Program Pascasarjana. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah proposal tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sufian Hamim, M.Si dan Ibu Dr. Evi Zubaidah, S.Sos., I. MPA selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.

5. Kedua orang tua dan keluarga besar tersayang atas kasih sayang memberikan semangat dan kesabaran yang tak terhingga yang selalu menemani dalam setiap detik dan menit dalam menjalankan hidup ini.
6. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal Penulis di masa yang akan datang;
7. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Proposal Tesis ini;
8. Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang ikut andil dalam penelitian ini dan yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian;
9. Teman-teman seperjuangan Bidang Kajian Utama Administrasi Publik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Proposal Tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa proposal tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun ilmu pengetahuan, demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Pekanbaru, Agustus 2022

Penulis,

Syarifah Erna Yuna

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	19
1.3. Tujuan Penelitian	19
1.4. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERAGKA PIKIRAN.....	21
2.1. Tinjauan Pustaka	21
2.1.1. Teori Administrasi Publik.....	21
2.1.2. Teori Organisasi Publik	25
2.1.3. Teori Manajemen Publik.....	30
2.1.4. Teori Manajemen Stratgis Pembangunan.....	35
2.1.5. Strategi Pengembangan Usaha Ekonomi Pertanian Pedesaan.....	40
2.1.6. Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan di Pedesaan.....	47
2.1.7. Kerjasama Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	49
2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	66
Kerangka Pikiran.....	67
Konsep Operasional.....	67
Operasionalisasi Variabel.....	68
Teknik Pengukuran Variabel dan Indikator.....	70
BAB III METODE PENELITIAN	72
3.1. Jenis dan Tipe Penelitian	72
3.2. Lokasi Penelitian.....	72
3.3. Populasi dan Sampel.....	72
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	74
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	75
3.6. Teknik Analisis Data	76

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Lahan Menurut Ekosistem Kecamatan Siak Hulu Tahun 2021	11
Tabel 1.2	Luas Lahan Menurut Penggunaan Kecamatan Siak Hulu Tahun 2021	13
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Siak Hulu Menurut Pekerjaan T. 2021	14
Tabel 2.1.	Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan ..	52
Tabel 2.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian	69
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel Responden dan Informan Penelitian.....	73
Tabel 3.2	Jadwal Kegiatan Penelitian	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1. Model Organisasi Sebagai Sistem Terbuka dari	26
Gambar2.2. Model Manajemen Strategis Sektor Publik dan Bisnis (Sufian) ...	36
Gambar2.3. Proses Manajemen Strategis Sektor Publik dan	38
Gambar 2.4. Bisnis (Sufian) ... Kerangka Pemikiran Stratego Kerjasama Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	66

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Administrasi pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional khususnya negara-negara berkembang. Ruang lingkup disiplin tersebut bervariasi karena terdapat perbedaan dalam masalah dan lingkungan antara negara berkembang yang satu dengan negara yang lain. Hal ini dapat dilihat pada variasi bentuk reformasi administrasi yang ada, khususnya pada perencanaan administrasinya.

Berdasarkan diagnosis yang dilakukan Chenery (dalam Rondinelli, et all, 1990 : 69-77) menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan yang timbul akibat strategi pertumbuhan, menyarankan pada reorientasi kebijakan dalam metode perencanaan. Rondinelli, et all (1990 : 69-77) menunjukkan bahwa mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang dimaksud adalah kemauan politik, sikap dan perilaku birokratis, norma-norma budaya, struktur ekonomi serta sistem penataan ruang dan fisik. Dalam kenyataannya (Effendi, et all, 1989 : 4) menunjukkan bahwa faktor-faktor lingkungan tersebut jarang dipertimbangkan dalam formulasi perencanaan pembangunan dan desain kebijakan dan program-program pembangunan yang berpusat pada manusia yang dicetuskan adalah usaha peningkatan kualitas manusia itu sendiri. Manusia dimotivasi supaya tidak menjadi penerima pasif pelayanan publik, dan menjadi makhluk yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam memecahkan masalahnya sendiri dan menghadapi berbagai tantangan.

Hasil penelitian Sufian Hamim dan Sri Indrastuti (2019;27-40) menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi strategi pembangunan perdesaan di Provinsi Riau belum adanya reformasi administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan perdesaan terutama memperkenalkan perubahan-perubahan dasar manajemen publik melalui transformasi sistem perencanaan dan

implementasi strategi pembangunan kontekstual yang memberdayakan masyarakat berbasis potensi dan kearifan lokal.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa. Musrenbang Desa adalah forum rembung warga desa yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa.

Maksud dan tujuan dari Musrenbang desa berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa adalah supaya dilaksanakannya model perencanaan partisipatif di tingkat desa yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa/lembaga pemerintah lainnya yang ada di desa, sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya musrenbang desa adalah :

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pada tahun perencanaan/ tahun yang akan datang.
2. Menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan masalah yang menjadi kewenangan daerah yang berada di wilayah desa pada forum musrenbang kecamatan.

Dalam menentukan kesepakatan prioritas kebutuhan sebagaimana point nomor (1) di atas dihasilkan tiga kesepakatan yang akan menjadi prioritas yaitu :

1. Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari dana swadaya masyarakat dan atau dari pendapatan asli desa (PAD). Kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, namun kegiatan ini tidak dapat dibiayai dari dana ADD maupun Dana Desa, harus dimasukkan sebagai prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa

melalui swadaya masyarakat. Contoh kegiatan pembangunan mesjid/mushalla, penataan tempat pemakaman, pembangunan gapura desa dan lain-lain.

2. Menyetujui prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
3. Menyetujui prioritas masalah daerah yang ada di desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pusat dan akan pada musrenbang kecamatan untuk diusulkan menjadi kegiatan yang dibiayai APBD pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Contoh pembangunan jalan desa yang berstatus jalan kabupaten atau provinsi, pembangunan saluran irigasi tersier maupun sekunder yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Bagi Aparatur Pemerintah dari level desa sampai pemerintah pusat, awal tahun berarti siap melaksanakan perencanaan yang dibuat pada tahun sebelumnya dan harus memulai membuat perencanaan tahun mendatang.

Perencanaan ditingkat desa sampai tingkat pusat, intinya sama hanya berbeda ruang lingkup wilayah, waktu dan sebutan saja. Perencanaan tersebut terdiri dari :

1. Perencanaan Jangka Menengah (RPJM Desa, RPJMD/Kab-Kota, RPJMD/Provinsi dan RPJMN/Pemerintah Pusat. Perencanaan Jangka Menengah di desa berlaku untuk 6 (enam tahun), sedangkan bagi daerah dan Pemerintah Pusat berlaku untuk 5 (lima) tahun. Sesuai masa jabatan eksekutif ditiap tingkatan. Ditetapkan satu kali setiap periode pemilihan eksekutif, dan sudah harus ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah pejabat tersebut dilantik.
2. Perencanaan tahunan sebagai penjabaran perencanaan jangka menengah untuk periode tahunan juga wajib dibuat dari pemerintahan level desa sampai pusat. Rencana kerja tahunan ini akrab disebut RKP (Rencana Kerja Pemerintah). RKP disusun dan ditetapkan setiap tahun, pada tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun yang akan datang. Contoh RKP Desa untuk tahun pelaksanaan tahun Anggaran 2022 harus sudah

disahkan dengan Peraturan Desa paling lambat 31 September tahun 2021.

3. Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah dalam Anggaran dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBDesa s.d RAPBN), harus sudah disahkan paling lambat akhir tahun menjelang awal tahun pelaksanaan.

Pada awal tahun pemerintah pada level desa sampai pusat harus mengerjakan dua hal. Pertama yaitu mengerjakan perencanaan yang dibuat tahun sebelumnya.

Kedua, membuat perencanaan untuk tahun yang akan datang. Kedua sisi pekerjaan tersebut dilaksanakan bersamaan pada tahun yang sama. Pada kesempatan ini kita akan membahas sisi pekerjaan membuat perencanaan tahun yang akan datang.

Harus diingat bahwa perencanaan RKP berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Coba bayangkan kalau desa baru mulai mempersiapkan RKP bulan Juni misalnya, RKP di pusat mungkin baru ditetapkan bulan Desember, bagaimana penetapan APBN-nya bisa sangat terlambat dan berakibat fatal terganggunya kalender pembangunan.

Penyusun RKP pada dasarnya dimulai dari desa secara berjenjang sampai pemerintah pusat. Di desa paling lambat minggu ke-empat dilaksanakan musrenbang desa. Bulan Februari dilaksanakan musrenbang kecamatan. bulan Maret musrenbang Kabupaten dan provinsi menyelenggarakan musrenbang di bulan April, berakhir dengan musrenbang nasional pada bulan Mei. Jadi musrenbang pada bulan Januari ini adalah awal dan menjadi dasar penyusunan RKP.

Musrenbang merupakan bentuk perencanaan partisipatif dari bawah ke atas (*bottom up planning*). Dari sebuah proses yang namanya Musrenbang Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Tentang Musyawarah di Desa akan menghasilkan, yaitu :

1. Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang dibiayai melalui swadaya masyarakat.

2. Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).
3. Terinventarisirnya masalah yang menjadi persoalan/kewenangan daerah berupa usulan program/kegiatan yang akan diajukan pembiayaannya melalui APBD kabupaten maupun APBD Provinsi.

Semua keluaran musrenbang di atas dituangkan dalam bentuk administrasi tertulis. Dan dilaporkan ke tingkat kecamatan sebagai bahan tindak lanjut pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Format administrasi musrenbang desa yang harus dibuat dan dilaporkan ke kecamatan terdiri dari :

1. Berita Acara Musyawarah.
2. Format Daftar Prioritas Masalah.(Form A-1)
3. Format Prioritas Kegiatan (Form-B-1)
4. Format Daftar Usulan Kegiatan (Form C-1)

Pada dasarnya Musrenbang Desa dilaksanakan dengan tahapan yang terdiri dari :

1. Tahap Persiapan / Pra-musrenbangdes
2. Tahap Pelaksanaan dan
3. Tahap Pasca Pelaksanaan.

Pelaksanaan Musrenbang Desa dilaksanakan setiap tahun paling lambat minggu ke IV bulan Januari. Hal yang dilakukan pada tahap Pra-musrenbang Desa sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) terdiri dari 3-5 orang ditetapkan dengan SK Kepala Desa. TPM bertugas mengorganisir keseluruhan proses musrenbang dari tahap persiapan/pramusrenbang, pelaksanaan sampai dengan tahap pasca pelaksanaan musrenbang. Karena hasil musrenbang ini akan dijadikan dasar penyusunan RKP Desa maka nantinya anggota TPM juga dilibatkan sebagai bagian dari Tim Penyusun RKP Desa. Ketua TPM biasanya Sekretaris Desa yang juga otomatis karena jabatannya menjadi ketua Tim Penyusun RKP Desa. Sedangkan Kepala Desa sebagai pelindung dan pembina TPM.

2. Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbangdesa serta menginformasikan kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan.
3. Merangkum berita acara musrenbang Desa dan menyusun laporan pelaksanaan musrenbang Desa dilengkapi; berita acara, daftar hadir, dokumentasi, dan rekapitulasi daftar usulan program dan kegiatan yang harus disampaikan ke tingkat kecamatan.
4. Memastikan pelaksanaan musrenbang Desa berjalan sebagaimana mestinya.

Bukan hanya sebagai acara seremonial, atau parade pidato tetapi harus benar-benar memberi ruang dan waktu bagi musyawarah warga yang partisipatif dan berkualitas. TPM harus mampu menjadi pemandu musyawarah yang baik.

Pada hari yang ditentukan sesuai undangan yang telah disebar, musrenbang desa dilaksanakan. Proses pelaksanaan musrenbang Desa sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh Kepala Desa (singkat paling lama 5-10 menit).
2. Penjelasan teknis pelaksanaan musyawarah, pembacaan agenda dan tata-tertib musrenbang desa. (5-7 menit)
3. Pemaparan-pemaparan dari Kepala Desa tentang evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Camat atau aparat kecamatan yang mewakili (kasi pemberdayaan masyarakat dan desa) menyampaikan perkiraan pagu indikatif desa dan pagu indikatif wilayah kecamatan serta pembangunan sektoral dari kabupaten/provinsi yang akan dilaksanakan di desa pada tahun tersebut, dan konsep kebijakan pembangunan wilayah kecamatan (misalnya kerjasama antar desa). Bagian akhir dari pemaparan dibuka tanggapan-tanggapan dari peserta musyawarah. Pada sesi ini pemaparan dan tanggapan paling lama 30 menit. Penting setiap sesi dibatasi waktu karena bukan parade pidato. Berikan waktu yang luas untuk sesi musyawarah.
4. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Berikan waktu seluas-luasnya pada sesi ini, setidaknya 90 menit. Yang dimusyawarahkan intinya yaitu ; Perumusan

prioritas masalah dan prioritas usulan kegiatan. Menyepaksti nama-nama dari peserta musyawarah sebagai delegasi desa dalam forum musrenbang kecamatan untuk memperjuangkan usulan desa. Tim/ delegasi terdiri dari 3-5 sekurang-kurangnya 30% dari unsur perempuan.

5. Pembacaan berita acara musrenbangdes dan penndatangan oleh wakil peserta dan pembacaan nama-nama peserta yang menjadi delegasi desa.
6. Penutupan oleh Kepala Desa.

Setelah selesai musrenbangdes dilaksanakan TPM menyusun laporan. Adapun format dan bentuk administrasi yang harus dibuat dan dilaporkan ke tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Musrenbang Desa
2. Surat Mandat Musrenbang Desa
3. Format Prioritas masalah Musrenbang
4. Format Prioritas Kegiatan Musrenbang
5. Format Daftar Usulan Musrenbang

Selanjutnya, hasil penelitian Sufian Hamim dan Lolita (2019:206-216) menunjukkan strategi pembangunan kontekstual terpadu sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan industrialisasi tidak hanya diperuntukkan ketahanan pangan manusia, akan tetapi juga untuk diolah menjadi pakan ternak dan ikan.

Perpres Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan Nasional mempertegas arah kebijakan Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sektor petanian menempati posisi yang semakin sentral dan dapat memenuhi pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia. Pembangunan pertanian harus kita seriusi secara detil dan berbasis sekala luas, salahsatu sumber pendanaan adalah dana desa.

Dirjen Perimbangan Keuangan menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Kemendes PD TT telah menetapkan Permendes Nomor 7

Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 salahsatunya yaitu pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan.

Hasil penelitian Eka, dkk (2021:9) menunjukkan bahwa organisasi dan kelembagaan desa di Desa Baru Kabupaten Kampar dalam Permusyawaratan.

Desa kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi organisasi. Sufian Hamim dan Lolita (2019:206-216) menegaskan penguatan kelembagaan desa dalam penyusunan perencanaan desa harus memiliki data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang potensi sosial dan alam desa sehingga mempermudah dalam perumusan rencana pembangunan desa.

Strategi kerjasama tim musrenbang desa tidak saja pada Tahap Persiapan atau Pra-musrenbang desa, juga pada Tahap Pelaksanaan dan pada Tahap Pasca Pelaksanaan.

Kerjasama tim musrenbang desa di Desa Baru sangat diperlukan, termasuk dengan unsur kelembagaan masyarakat yaitu Lembaga Adat Melayu Riau yang masih cukup kuat yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan desa.

Efektifnya suatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diperlukan juga kerjasama tim dari semua unsur yang terkait. Telah banyak riset membuktikan bahwa kerjasama secara kelompok mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.

Keith Davis dan John W. Newstrom (1977) membagi indikator kerjasama tim antara lain: (1) Tujuan yang sama, (2) Antusiasme, (3) Peran dan tanggung jawab yang jelas, (4) Komunikasi yang efektif, (5) Resolusi konflik, (6) Pembagian kekuasaan, dan (7) Keahlian yang dimiliki.

Penguatan kelembagaan desa dalam penyusunan perencanaan desa harus memiliki data dan informasi yang lengkap dan akurat yang dapat mempermudah petugas perencana dalam menyusun dan menyiapkan rencana pembangunan desa secara efektif. Data dan informasi yang dimaksud dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan desa meliputi: (1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) Organisasi dan tatalaksana pemerintahan desa, (3)

Kuangan desa, (4) Profil desa dan (5) Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian Eka, dkk (2021) menunjukkan bahwa organisasi dan kelembagaan desa di Kabupaten Kampar yaitu Pemerintah Desa dalam Permusyawaratan Desa kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan tugas, pokok serta fungsi organisasi secara baik dan benar. Dan hal ini yang menyebabkan tujuan dan sasaran pembangunan tidak diperkuat dengan pemahaman aparatur dalam berorganisasi.

Selanjutnya potensi lahan berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa baru, hasil penelitian Nana Sudiana (2021) menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar memiliki 5 (lima) tipe lahan gambut, yaitu Sikladipanjang (SLP) 125.920,92 ha, Benjah Bekasih (BBK) 17.960,79 ha, Gambut (GBT) 19.829,41 ha, Klaru (KLR) 9.120,14 ha, dan Mendawai (MDW) 18.532,15 ha. Sebaran lahan gambut tersebut berdasarkan lokasi administrasi dibagi menjadi 5 Klaster Kawasan Gambut yaitu: Siak Hulu (17.191,40 ha), Perhentian Raja (63.290,70 ha), Kampar Kiri Hilir (8.162,05 ha), Tambang (26.766,16 ha) dan Tapung (75.953,11 ha).

Hasil penelitian Tibrani (2021) menunjukkan bahwa produksi netto pangan sereal sebanyak 45.310,92 ton, angka ketersediaan pangan per kapita per hari sebesar 164,71 gr/kapita/hari dan ketersediaan pangan berada dalam kondisi sangat tahan dengan indeks sebesar 0,07. Indikator terhadap akses pangan menunjukkan nilai didapat indeks sebesar 0,16, berarti bahwa bila ditinjau dari aspek akses terhadap pangan berada dalam kondisi cukup tahan. Indikator penyerapan pangan menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi sebesar 12,35, persentase balita yang mengalami gizi buruk adalah sebesar 0,00% (0 jiwa), persentase bayi yang tidak diimunisasi secara lengkap adalah sebesar 1,43% (213 jiwa), persentase rumah tangga tanpa akses air bersih adalah sebesar 33,76% (6.182 dari 16.273 keluarga yang diperiksa), dengan nilai pada indikator-indikator tersebut maka didapat indeks sebesar 0,16, berarti bila ditinjau dari aspek penyerapan pangan berada dalam kondisi cukup tahan. Berdasarkan gabungan semua indeks indikator ketahanan pangan,

maka diperoleh indeks ketahanan pangan sebesar 0,12 berarti bahwa Kabupaten Kampar berada dalam kondisi cukup tahan pangan.

Kecamatan Siak Hulu memiliki lahan yang sangat luas, luas lahan menurut ekosistemnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Luas Lahan Menurut Ekosistem Kecamatan Siak Hulu Tahun 2021

No	Desa	Luas Lahan Menurut Ekosistem (Ha)							Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Pangkalan Baru	-	174	-	444	305	-	10	933
2.	Buluh Cina	-	99	-	166	285	-	26	576
3.	Desa Baru	-	125	-	75	1275	-	-	1475
4.	Tanah Merah	-	23	-	20	1345	-	-	1388
5.	Pandau Jaya	-	15	-	25	1315	-	-	1355
6.	Kubang Jaya	-	150	-	15	925	-	-	1090
7.	Teratak Buluh	-	110	-	140	1205	-	25	1480
8.	Lubuk Siam	-	115	-	160	750	-	35	1060
9.	Tanjung Balam	-	80	-	152	267	-	25	524
10.	Kepau Jaya	-	130	-	144	247	-	-	520
11.	Buluh Nipis	-	50	-	285	138	-	10	483
12.	Pangkalan Serik	-	125	-	132	147	-	22	426
	Total	-	1.196	-	1.758	8.204	-	153	11.310

Sumber : Data Monografi dan Database Kecamatan Siak Hulu, 2021

Catatan :

- (1) Irigasi
- (2) Tadah hujan
- (3) Pasang surut
- (4) Lahan basah
- (5) Lahan kering
- (6) Pantai
- (7) Perairan umum

Berdasarkan tabel di atas, total luas lahan tadah hujan di Kecamatan Siak Hulu seluas 1.195 Ha, luas lahan basahnya seluas 1.757,5 Ha, luas lahan kering seluas 8.204,3, perairan umum seluas

153 Ha, keseluruhan total luas lahan Kecamatan Siak Hulu seluas 11.309,8 Ha.

Kecamatan Siak Hulu memiliki lahan yang sangat luas, luas lahan menurut penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Luas Lahan Menurut Penggunaan Kecamatan Siak Hulu Tahun 2021

No	Desa	Luas Lahan Menurut Penggunaan (Ha)									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Total
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Pangkalan Baru	253	208	80	-	12	-	1000	120	250	1923
2.	Buluh Cina	85	60	42	-	11	650	750	151	-	1749
3.	Desa Baru	219	460	-	-	15	-	-	35	45	774
4.	Tanah Merah	875	322	-	-	-	5	15	-	-	1217
5.	Pandau Jaya	1182	225	18	-	25	200	-	5	-	1655
6.	Kubang Jaya	169	5	-	-	3	75	15	3	5	275
7.	Teratak Buluh	210	17	-	-	2	250	125	25	15	644
8.	Lubuk Siam	250	100	150	-	3	400	198	500	52	1653
9.	Tanjung Balam	626	120	-	-	2	-	405	1.100	-	2252
10.	Kepau Jaya	15	25	10	-	2	265	5000	1545	-	16862
11.	Buluh Nipis	22	117	200	-	2	150	3000	1125	7107	11723
12.	Pangkalan Serik	11	15	150	-	5	1100	1500	3.675	25	6481
	Total	3.917	1.674	650	-	82	3.095	12.008	18.284	7.499	47.206

Sumber : Data Monografi dan Database Kecamatan Siak Hulu, 2021

Catatan :

- (1) Pekarangan / tanah untuk bangunan dan halaman
- (2) Tegal / kebun / ladang / huma
- (3) Padang rumput
- (4) Tambak
- (5) Kolam / tebat / empang
- (6) Tanah yang sementara tidak diusahakan
- (7) Tanah untuk tanaman kayu-kayuan
- (8) Perkebunan (negara / swasta)
- (9) Sawah

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa keseluruhan luas lahan di Kecamatan Siak Hulu menurut penggunaannya seluas 47.205,4 Ha. Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2015 berdasarkan luas panen area 60 Ha dengan Produksi 237,00 ton (BPS Kampar, 2017).

Jumlah penduduk di Kecamatan Siak Hulu Tahun 2021 berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Siak Hulu Menurut Pekerjaan T. 2021

No	Desa	Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan (orang)					Total
		Petani	Pekebun	Peternak	Nelayan	Lain-lain	
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	Pangkalan Baru	227	130	73	50	618	1.098
2.	Buluh Cina	215	265	43	225	137	875
3.	Desa Baru	125	95	88	-	1.152	1.460
4.	Tanah Merah	565	125	320	-	1.865	2.875
5.	Pandau Jaya	725	716	125	-	31.534	33.100
6.	Kubang Jaya	150	30	20	20	18.021	18.241
7.	Teratak Buluh	257	85	80	83	3.865	4.370

8.	Lubuk Siam	156	133	91	390	251	1.021
9.	Tanjung Balam	81	115	15	138	249	598
10.	Kepau Jaya	76	400	175	46	148	845
11.	Buluh Nipis	504	206	95	12	91	908
12.	Pangkalan Serik	98	216	25	316	412	1.067
	Total	3.179	2.506	1.150	1.280	58.343	66.458

Sumber: Data Monografi dan Database Kecamatan Siak Hulu, 2021

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk di Kecamatan Siak Hulu yang bekerja sebagai petani berjumlah 3.179 orang, penduduk yang bekerja sebagai pekebun berjumlah 2.506 orang, penduduk yang bekerja sebagai peternak berjumlah

1.150 orang, penduduk yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 1.280 orang, dan jumlah penduduk yang bermata pencaharian lainnya sebanyak 58.343 orang.

Berdasarkan pra-survei yang dilaksanakan pada lokasi penelitian di Desa Baru (April-Mei 2022), Wawancara dengan Tokoh masyarakat (Kabir, dkk. Mei 2022) dapat ditangkap beberapa fenomena terkait :

Bahwa maksud dari Musrenbang desa adalah supaya dilaksanakannya model perencanaan partisipatif di tingkat desa yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa/ lembaga pemerintah lainnya yang ada di desa. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya musrenbang desa adalah:

- a. Menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pada tahun perencanaan/ tahun yang akan datang.
- b. Menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan masalah yang menjadi kewenangan daerah yang berada di wilayah desa pada forum musrenbang kecamatan.

Namun ada indikasi bahwa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum semua komponen masyarakat,

lembaga kemasyarakatan dan swasta dilibatkan pada kegiatan musrenbang desa dan sering mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan (seharusnya bulan Januari setiap tahunnya).

Dalam menentukan kesepakatan prioritas kebutuhan sebagaimana point (a) di atas seharusnya menghasilkan tiga kesepakatan yang akan menjadi prioritas yaitu :

- a. Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari dana swadaya masyarakat dan atau dari pendapatan asli desa (PAD). Kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, namun kegiatan ini tidak dapat dibiayai dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), harus dimasukkan sebagai prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa melalui swadaya masyarakat. Contoh kegiatan pembangunan mesjid/ mushalla, penataan tempat pemakaman, pembangunan gapura desa dan lain-lain.
- b. Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
- c. Menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pusat dan akan pada musrenbang kecamatan untuk diusulkan menjadi kegiatan yang dibiayai APBD pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Contoh pembangunan jalan desa yang berstatus jalan kabupaten atau provinsi, pembangunan saluran irigasi tersier maupun sekunder yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Siak Hulu Dalam Angka 2021, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu memiliki potensi luas lahan Kecamatan yaitu: Tadah Hujan 125 Ha, Pasang Surut 75 Ha, Lahan Basah 1.275 Ha, Total 1.475 Ha. Luas lahan yang sudah digunakan/ diperuntukkan : Total 774 Ha. Apabila luas lahan yang tersedia 1.475 Ha dikurangi luas lahan yang sudah diusahakan maka

tersedia lahan seluas 701 Ha yang belum di garap atau menjadi lahan terlantar.

Disisi lain jumlah penduduk yang menggambarkan angkatan kerja Tahun 2021 (Siak Hulu Dalam Angka, 2021) : Petani 125 orang, Pekebun 95 orang, Peternak 88 orang, Lain-lain 1.152 orang, Total 1.460 orang. Jumlah penduduk sebagai angkatan kerja kebanyakan pekerja lepas akan produktif, apabila anggaran dana desa sebahagiannya direncanakan dalam Musrenbang desa untuk program dan kegiatan pemberdayaan kelompok-kelompok tani, dalam mengusahakan lahan terlantar untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sektor pertanian, maka akan tercapai ketahanan pangan desa untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Berikatan dengan lahan seluas 701 Ha yang belum di garap atau menjadi lahan terlantar dan jumlah penduduk yang menggambarkan angkatan kerja di Desa Baru, Kebijakan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan Nasional, Kebijakan Dirjen Perimbangan Keuangan menegaskan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Selanjutnya kebijakan Kemendes PDTT telah menetapkan Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 salahsatunya adalah pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan.

Pra-Survei Penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat (Kabir, dkk. Mei 2022) mengindikasikan bahwa Musrenbang Desa Baru belum menyepakati prioritas kegiatan program ketahanan pangan desa yang berkelanjutan yang akan dilaksanakan oleh desa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD).

Berdasarkan fenomena yang ditangkap dari berbagai sumber informasi melalui pra-survei :

1. Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terindikasi belum semua komponen masyarakat, lembaga

- kemasyarakatan dan swasta dilibatkan pada kegiatan musrenbang desa.
2. Musrenbang desa sering mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan (seharusnya bulan Januari setiap tahunnya).
 3. Terindikasi belum ada kerjasama Tim Musrenbang desa untuk menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pada tahun perencanaan tahun yang akan datang yang dikaitkan dengan potensi desa.
 4. Ada indikasi program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat yang akan dibiayai dari Dana Desa (DD) berdasarkan potensi alam desa terutama program ketahanan pangan belum dijadikan prioritas, sesungguhnya potensi SDM petani dan lahan yang tersedia cukup luas.
 5. Musrenbang Desa belum menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria perencanaan yang baik yang memiliki kejelasan antara lain:
 - a. Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahunan,
 - b. Pelaksana Kegiatan,
 - c. Waktu Kegiatan,
 - d. Lokasi dan Tempat Kegiatan,
 - e. Prosedur kegiatan,
 - f. Anggaran kegiatan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan mengangkat judul “Strategi Kerjasama Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pengembangan Program Ketahanan Pangan Dibiayai Dari Dana Desa di Desa Baru Kabupaten Kampar”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Strategi Kerjasama Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pengembangan Program Ketahanan Pangan Dibiayai Dari Dana Desa di Desa Baru Kabupaten Kampar.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : Menganalisis dan Menjelaskan Strategi Kerjasama Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pengembangan Program Ketahanan Pangan Dibiayai Dari Dana Desa di Desa Baru Kabupaten Kampar.

Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya gambaran masalah dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu Administrasi Publik dari dimensi konsep kerjasama Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan pengembangan Program Ketahanan Pangan Desa.

2. Manfaat Akademis :

Diharapkan bermanfaat untuk literatur sumber bacaan dan pengutipan untuk penelitian lanjutan Peneliti dan Peneliti lainnya.

3. Manfaat Praktis :

Diharapkan bermanfaat untuk bahan masukan bagi Pemerintahan Desa Baru Kabupaten Kampar dalam Kerjasama Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pengembangan Program Ketahanan Pangan Dibiayai Dari Dana Desa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERAGKA PIKIRAN

Tinjauan Pustaka

Teori Administrasi Publik

Ilmu Administrasi lahir karena dibutuhkan oleh masyarakat, dan lahirnya ilmu ini tidak dengan sendirinya tetapi melalui perjuangan yang cukup lama oleh para pencintanya. Selanjutnya agar ilmu ini dapat berkembang sepanjang masa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ilmu ini memerlukan pembinaan dan pengembangan. Sudah pasti bahwa orang-orang yang menjadi pembina dan pengembang ilmu administrasi ini adalah orang-orang yang telah menspesialisasikan dirinya dalam bidang ilmu administrasi, berikut orang-orang yang membutuhkannya atau masyarakat pada umumnya (Mahmudi, 2010:89).

Secara etimologis perkataan Indonesia "Administrasi" yang bahasa Inggrisnya "*Administration*", berasal dari kata Latin, yaitu : "*Ad + ministrare*" dan "*Administratio*". *Ad + ministrare* berarti melayani, membantu atau memenuhi (Gie, 2010:56). Sedangkan *Administratio* berarti pemberian bantuan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan (Atmosudirdjo, 2010:21). Administrasi pada hakekatnya adalah usaha untuk menolong, usaha untuk membantu, usaha untuk memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal proses kenaikan pangkat maka administrasi ini memiliki fungsi sebagai sebuah proses administrasi pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kenaikan pangkat pegawai. Siagian (2011:133) menegaskan Administrasi merupakan rangkaian kegiatan (proses) yang wujudnya:

merencanakan, memutuskan, menyusun, mengatur, memimpin, mengurus, mengarahkan, membimbing, menselaraskan, mengendalikan, mengawasi, menyempurnakan dan kegiatan-kegiatan semacam itu. Untuk ringkasnya kegiatan-kegiatan semacam itu tercakup dalam suatu istilah yaitu yang disebut "menata" atau "penataan". Oleh karena itu kegiatan-

kegiatan yang termasuk dalam pengertian Administrasi adalah rangkaian kegiatan penataan (Robbins, 2010:155). Hendry Fayol (dalam Sufian dan Indra M.A.,2016: 34) membedakan antara prinsip dan unsur manajemen. Prinsip-prinsip umum dan unsur-unsur manajemen terdiri dari: (1) pembagian kerja; (2) otoritas dan tanggung jawab, (3) disiplin (4) kesatuan komando, (5) kesatuan pengarahan, (6) mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan perorangan, (7) Upah/gaji, (8) sentralisasi, (9) rantai scalar, (10) tata

tertib, (11) keadilan, (12) stabilitas masa jabatan, (13) inisiatif, (14) semangat korps. Sedangkan unsur-unsur manajemen sebagai fungsi manajemen terdiri dari: merencanakan, mengorganisasi, memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan.

Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha (pemerintah) agar tujuan tercapai. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan sifat terpakai dari Ilmu Administrasi sebagai berikut :

1. Administrasi merupakan kegiatan manusia dan berlangsung berupa proses pengendalian interaksi antara dua orang atau lebih dalam bentuk kerja sama. Interaksi yang disebut kerja sama itu adalah gejala sosial, yang bilamana dikendalikan dengan mempergunakan administrasi, akan berlangsung efektif dan efisien. Dengan demikian berarti langkah-langkah yang dirumuskan Ilmu Administrasi harus bersifat terpakai bagi perwujudan kerja sama yang efektif dan efisiensi dalam mencapai satu atau lebih tujuan (Moekijat,2011:90).
2. Administrasi merupakan proses pengendalian yang sadar tujuan. Dengan demikian berarti langkah-langkah yang dirumuskan Ilmu Administrasi harus bersifat terpakai bagi perwujudan kegiatan yang berkualitas, sehingga menjadi kegiatan yang tinggi produktifitasnya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Administrasi tidak bermaksud menghasilkan kegiatan kerja sama yang tidak produktif dalam mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain Administrasi merupakan ilmu terapan untuk meningkatkan produktivitas

dalam mencapai tujuan melalui kerja sama sejumlah orang (Pace, 2011:3).

3. Administrasi berlangsung untuk mempersatukan gerak langkah sejumlah manusia. Dengan demikian berarti langkah-langkah pengendalian yang akan dilaksanakan harus bersifat terpakai dalam mewujudkan kesatuan gerak sejumlah manusia dalam melaksanakan tugas-tugas bersama. Gerak yang serentak dan tidak saling menjegal itu tidak saja dilakukan secara perseorangan, tetapi juga oleh kelompok-kelompok kecil atau unit-unit kerja di dalam sebuah organisasi. Dengan demikian kata lain Administrasi harus bersifat terpakai dalam menghilangkan pengkotakan kerja, agar menjadi satu kesatuan kerja yang saling menunjang secara kompak (Rivai, 2010:9).
4. Administrasi merupakan ilmu yang terpakai dalam merangkai suatu harapan di dalam perencanaan dengan usaha berupa realisasi kegiatan sesuai perencanaan dan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kesenambungan mengandung makna bahwa administrasi terpakai dalam mengembangkan kegiatan secara terarah dan mampu menghindari penyimpangan-penyimpangan sebelum terjadi agar tidak merugikan organisasi (Nitisemito, 2010:43).

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Definisi lainnya yang dapat diajukan adalah kegiatan implementasi kebijakan¹. Publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Administrasi publik dapat berperan positif dalam mengawal pembangunan suatu negara sampai pada tujuan yang dicita-citakan. Dengan kata lain, administrasi publik bukan saja berurusan dengan cara-cara yang efisien untuk melakukan proses

pembangunan, melainkan juga mempunyai kemampuan dalam menentukan tujuan dari proses pembangunan itu sendiri, terutama dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif sebagai wujud dari penjaminan hak-hak konstitusional seluruh warga.

Menurut Wiliam Dunn (2013;80) ada beberapa isu atau permasalahan penting yang sering dibahas dalam ilmu administrasi publik, antara lain :

- 1) Pelayanan Publik, sebagai proses administrasi untuk publik, pada hakekatnya adalah memberi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan demokrasi yang mana masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menerima pelayanan dari pemerintah. Dalam masalah ini yang terpenting adalah bagaimana pemerintah/negara memberikan pelayanan yang baik, cepat dan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat.
- 2) Motivasi Pelayanan Publik. Dalam masalah ini isu terpenting adalah membahas motivasi seperti apa yang dimiliki oleh administrator dalam memberikan pelayanan publik. Ada yang berdasarkan norma, rasional dan perasaan.
- 3) Mal-Administrasi. Mal-administrasi merupakan kesalahan dalam praktek administrasi. Pembahasan teori administrasi publik juga akan membahas masalah kesalahan-kesalahan tersebut sebagai kajian utama, seperti lambannya birokrasi, rutinitas dan formalitas pelayanan.
- 4) Etika Administrasi Publik. Masalah penting lainnya dalam administrasi publik adalah etika administrasi. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah nilai baik dan buruk. Apakah pelayanan atau prosedur administrasi publik dinilai baik atau buruk oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk korupsi menjadi bahasan utama.
- 5) Kinerja dan Efektivitas. Seringkali masalah kinerja dan efektivitas menjadi isu sentral dari administrasi publik. Hal tersebut dipahami karena administrasi sebagai proses mencapai tujuan, maka persoalan pencapaian dan cara mencapai tersebut menjadi penting. Oleh karena itu bagaimana cara kerja

(kinerja) yang dijalankan apakah sudah baik sehingga tujuan dapat tercapai (efektif).

- 6) Akuntabilitas Publik Administrasi publik yang dijalankan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga. Ada kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikontrol, diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada warga/publik. Hal tersebut merupakan masalah pokoknya.

Teori Organisasi Publik

Organisasi sistem terbuka hasil penelitian (Barnard, 1938; Wiener, 1948; Bertalanffy, 1951) menunjukkan bahwa dapat diartikan sebagai suatu kelompok elemen yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Organisasi sebagai sistem terbuka, menurut hasil penelitian Hicks dan Gullet (1987:347) secara umum terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik dari lingkungan. Proses organisasi yang demikian hasil penelitian Kast dan Rosenzweig (1985:112) menunjukkan bahwa *the organization receives inputs from the society in the form of people, materials, money, and information; it transforms these into outputs of products, service, and rewards to the organizational members participation*. Dengan demikian organisasi sebagai sistem terbuka, mencakup organisasi itu sendiri dan juga hubungan-hubungannya dengan kelompok-kelompok di luar. Organisasi harus berfungsi dua arah secara serentak. *Pertama*, organisasi harus menemukan cara-cara untuk melestarikan diri, untuk memancing dukungan, energi, dan kerjasama dari anggota-anggotanya. *Kedua*, organisasi harus berusaha melindungi diri dari tekanan-tekanan yang terdapat dalam lingkungannya, menghimpun sumber-sumber daya, dan dukungan dari pihak-pihak lain. Model organisasi sebagai sistem terbuka, diilustrasikan pada gambar 2.1.

FEEDBACK LINGKUNGAN

Gambar 2.1. Model Organisasi Sebagai Sistem Terbuka dari

Sumber: Barnard, 1938, Wiener, 1948, Bertalanffy; 1951, Katz dan Kahn, 1987; Hicks dan Dullet, 1987)



Organisasi pemerintahan perdesaan sebagai sistem terbuka dalam pencapaian tujuannya merupakan kelembagaan yang harus ditata secara rasional. Sedangkan manajemen pemerintahan perdesaan menjadi perantara kedua fungsi tersebut, menentukan berapa banyak out put yang dihasilkan, siapa yang menjadi sasaran dan bagaimana sistem pelayanan yang diterapkan.

Studi Organisasi adalah studi mengenai cara orang memandang obyek-obyek, juga studi mengenai obyek-obyek itu sendiri (Pace dan Faules, 2011:2). Banyak pemikiran dari para ahli yang membahas mengenai organisasi. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang perlu dilakukan untuk melakukan tugastugas, sedemikian rupa memberikan saluran terbaik untuk melakukan pemakaian yang efisien, sistematis, positif dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Hal serupa juga dikemukakan oleh Banard (2010:56), yaitu organisasi adalah suatu system tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih, sesuatu yang tak terwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan.

Dalam kata-kata yang lebih sederhana, organisasi adalah sekelompok orang yang bersatu padu bekerja untuk suatu tujuan bersama dibawah kepemimpinan bersama dengan alat-alat yang tepat. Sedangkan Sutarto (2012:40) menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, organisasi adalah sistem saling mempengaruhi antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga dapat dikatakan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif didefinisikan dan bekerja secara terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan ini dikemukakan oleh Robbins (2010:144).

Adapun ciri-ciri dari organisasi adalah :

- 1) Adanya komponen (atasan dan bawahan)
 - 2) Adanya kerja sama (cooperative yang berstruktur dari sekelompok orang)
 - 3) Adanya tujuan
 - 4) Adanya sasaran
 - 5) Adanya keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati
 - 6) Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas.
- (Robbins, 2010:146)

Dalam buku “Komunikasi Organisasi” milik R. Wayne Pace dan F. Faules dikatakan bahwa suatu organisasi, merupakan sebuah wadah yang menampung orang-orang dan obyek-obyek, orang-orang dalam organisasi yang berusaha mencapai tujuan bersama. Bila organisasi sehat, bagian-bagian yang interdependen bekerja dengan cara yang sistematis untuk memperoleh hasil yang diinginkan (Pace dan Faules, 2011 :17).

Menurut Robbins (2010:150) Organisasi memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu :

- 1) Sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama
Organisasi merupakan suatu wadah atau tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya organisasi menjadi saat bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerja sama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan.
- 2) Proses kerja sama sedikitnya antar dua orang
Suatu organisasi, selain merupakan tempat kerja sama juga merupakan proses kerja sama sedikitnya antar dua orang.
- 3) Jelas tugas kedudukannya masing-masing
Dengan adanya organisasi maka tugas dan kedudukan masing-masing orang atau pihak hubungan satu dengan yang lain akan dapat lebih jelas, dengan demikian kesimpulan double pekerjaan dan sebagainya akan dapat di hindarkan.
- 4) Ada tujuan tertentu
Betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi seorang manajer. Suatu perencanaan yang kurang baik tetapi

organisasinya baik akan cenderung lebih baik hasilnya dari pada perencanaan yang baik tetapi organisasi tidak baik.

Secara harfiah, organisasi berarti perpindahan dan bagian-bagian yang satu sama lain saling tergantung. Charles I. Bernard mendefinisikan organisasi sebagai sistem dari kegiatan manusia yang bekerjasama. Kemudian Everett M. Rogers dan Rehak Agarwala-Rogers dalam (Wijayanti, 2010:97) menyatakan organisasi adalah sistem yang mapan dari orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, melalui suatu jenjang kepangkatan dan pembagian kerja.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi adalah suatu bentuk perkumpulan dari individu-individu yang didalamnya terdapat jaringan-jaringan hubungan yang dipandang sebagai suatu sistem yang saling melengkapi kebutuhan satu sama lain sehingga tercapainya tujuan bersama.

Dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep "barang publik" (public goods), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu (Syafri, 2012:89). Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula. Beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Ciri-ciri organisasi publik menurut Robbins (2010:12) adalah sebagai berikut:

- 1) Organisasi publik tugas-tugasnya lebih kompleks dan ambigu

- 2) Organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusannya.
- 3) Organisasi publik mempekerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam
- 4) Organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada
- 5) Organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar
- 6) Organisasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar
- 7) Organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas
- 8) Organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan
- 9) Organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik
- 10) Organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi dari pada sektor privat.

Berdasarkan teori di atas, tampak bahwa organisasi publik memiliki karakteristik lingkungan yang lebih rumit dibandingkan dengan organisasi bisnis. Organisasi bisnis hanya memperhitungkan konsumen dan para pesaing. Sementara organisasi publik harus memperhitungkan berbagai komponen yang lebih luas.

Teori Manajemen Publik

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya: Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2010: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2010:1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Gulick dalam Wijayanti (2010:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

F.W. Taylor (dalam Sufian dan Indra, M.A., 2016: 35) menegaskan bahwa Prinsip-prinsip dasar manajemen yang mendasari pendekatan ilmiah terhadap manajemen, adalah sebagai berikut: (1) Menggantikan cara yang asal-asalan dengan ilmu; (2) Mengusahakan keharmonisan dalam gerakan kelompok, dan bukannya perpecahan; (3) Mencapai kerjasama manusia, dan bukannya individualisme yang kacau; (4) Bekerja untuk output yang maksimum, dan bukannya output yang terbatas; (5) Mengembangkan semua pekerja sampai taraf yang setinggi-tingginya untuk kesejahteraan maksimum mereka sendiri dan perusahaan mereka.

Setiap kegiatan organisasi dituntut adanya suatu manajemen yang baik agar kelangsungan hidup organisasi dapat terus terjamin. Manajemen yang baik merupakan hasil cipta, rasa, karsa, pikiran, dan perbuatan manusia yang dapat menolong manusia dalam mencapai tujuannya. Manajemen yang baik adalah hasil pikiran dan karya manusia, sekalipun manusia didukung oleh peralatan dan keuangan yang memadai, tetapi yang menentukan baik buruknya manajemen adalah cara berfikir dan bertindak. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu.

Mahmudi (2010:36) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat. Suprihanto (2013:11) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau

pebarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usahausaha yang telah dilakukan.

Menurut Nawawi (2010:18) mengemukakan bahwa: Manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaransasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), memimpin (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*). Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan.

Untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional. Untuk itu diperlukan langkahlangkah kegiatan dengan perumusannya secara jelas dan tegas, agar tujuan program yang dimaksudkan dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Pengertian manajemen menurut Handoko (2012:8) menjelaskan bahwa: Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Secara prinsip dapat dilihat bahwa pada kenyataannya manajemen merupakan kombinasi ilmu dan seni dan tidak dalam proporsi yang tetap, tetapi dalam proporsi yang bermacam-macam. Konsep manajemen merupakan suatu konsep yang mencerminkan adanya kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dalam organisasi.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi- fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari berbagai unsur (Gibson, 2010:211) yakni *man, money, method, machine, market, material dan information*.

- 1) *Man* : Sumber daya manusia;
- 2) *Money* : Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
- 3) *Method* : Cara atau sistem untuk mencapai tujuan;
- 4) *Machine* : Mesin atau alat untuk berproduksi;
- 5) *Material* : Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;
- 6) *Market* : Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi;
- 7) *Information* : Hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan.

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta :

- 1) Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam

pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.

- 2) Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
- 3) Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- 4) Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
- 5) Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
- 6) Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
- 7) Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Pada pendekatan manajerialisme, fungsi-fungsi strategik seperti perumusan strategi, perencanaan strategik, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik. Manajerialisme sektor publik berorientasi pada pemenuhan tujuan, pencapaian visi dan misi organisasi yang sifat pemenuhannya jangka panjang (Mahmudi, 2010:37). Untuk mewujudkan perubahan menuju sistem manajemen publik yang

berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel, Alison dalam Mahmudi (2010:37) mengidentifikasi ada setidaknya tiga fungsi manajemen yang secara umum berlaku di sektor publik maupun swasta, yaitu:

1. Fungsi strategi, meliputi :
 - a) Penetapan tujuan dan prioritas organisasi;
 - b) membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan.
2. Fungsi manajemen komponen internal, meliputi :
 - a) Pengorganisasian dan penyusunan staf;
 - b) pengarahan dan manajemen sumber daya manusia;
 - c) pengendalian kinerja.
3. Fungsi manajemen konstituen eksternal, meliputi:
 - a) Hubungan dengan unit eksternal organisasi;
 - b) Hubungan dengan organisasi lain;
 - c) Hubungan dengan pers dan publik.

Konsep manajemen publik dalam penelitian ini dipaparkan dalam 3 paradigma, yaitu sebagai berikut :

- a. *Old Public Administration.*
- b. *New Public Managemen*
- c. *New Public Service*

Dari paradigma-paradigma di atas, telah dikemukakan perubahan konsep manajemen publik di masing-masing periode. Pada hakikatnya menurut Islamy (2013:56) manajemen publik memiliki karakter antara lain :

- a. Manajemen publik merupakan bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga lembaga publik;
- b. manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (nonprofit sector);

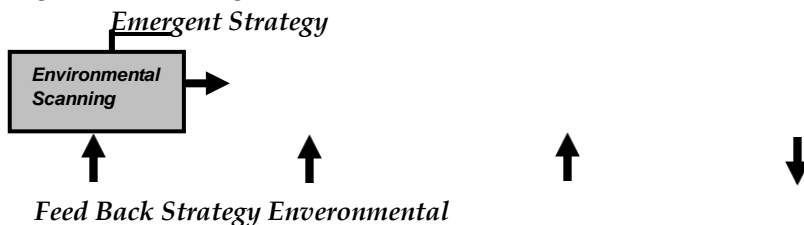
- c. manajemen publik memfokuskan atau mengarahkan administrasi publik sebagai suatu profesi dan manajernya sebagai praktisi dari profesi tersebut;
- d. manajemen publik berkaitan dengan kegiatan internal (internal operations) dari organisasi pemerintahan maupun sektor non pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung;
- e. manajemen publik secara spesifik menyuarakan tentang bagaimanakah organisasi (organizational how to) publik melaksanakan kebijakan publik;
- f. manajemen publik memanfaatkan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti memfokuskan diri pada the managerial tools, techniques, knowledges and skills yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program.

Teori Manajemen Strategis Pembangunan

Penjelasan masalah penelitian secara teoritis dijelaskan dari konsep, teori dan pendekatan manajemen strategis dan teori pembangunan lain yang relevan.. Konsep, model dan proses manajemen strategis, Hunger dan Wheelen (1996), mengemukakan manajemen strategis didefinisikan sebagai *“that set of managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a corporation. It includes environmental scanning, strategy formulation (strategisc or long-range planning), strategy implementation, and evaluation and control”*. Kemudian, Ia mengemukakan bahwa suatu poroses dari manajemen strategis melibatkan empat elemen dasar yang saling berhubungan: 1) *environmental scanning*, 2) *strategy formulation*, 3) *strategy implementation*, and 4) *evaluation and control*.

Berlandaskan pada konsep, model dan proses manajemen strategis tersebut telah mengembangkannya melalui berbagai penelitian empirik, model yang dikembangkan dapat digunakan selain untuk mengurus/mengelola suatu organisasi publik maupun bisnis, dapat pula ddijadikan kerangka acuan dalam menganalisis, merumuskan dan mengimplementasikan suatu

strategi dan kebijakan publik atau bisnis, sebagaimana pada gambar 2.2. sebagai berikut.



Gambar 2.2. Model Manajemen Strategis Sektor Publik dan Bisnis (Sufian) Sumber: Sufian Hamim (IJICC, 2019)

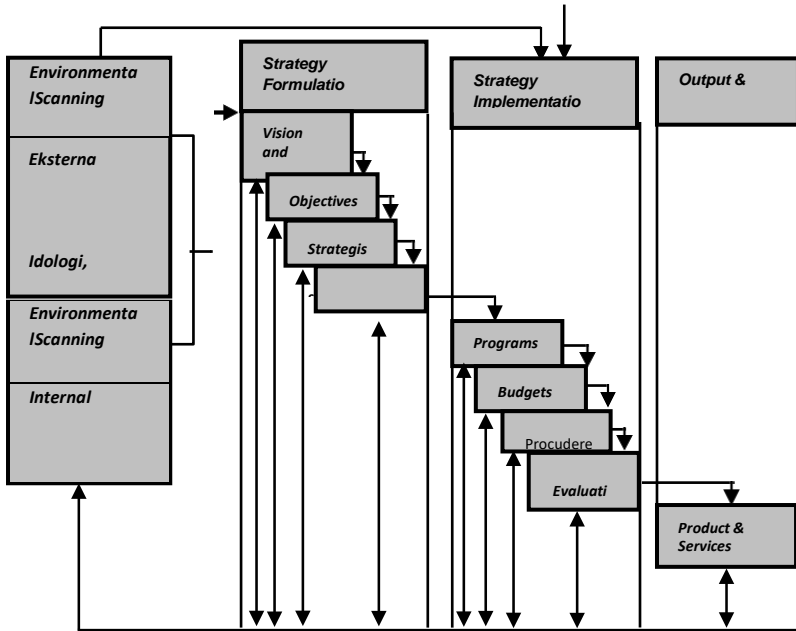
Berdasarkan gambar 2.2. dijelaskan bahwa model manajemen strategis tersebut di atas adalah suatu model manajemen yang sangat aktual dan muktahir sebelum ada pengembangan terbaru dalam menjawab permasalahan kesulitan dan bagian dari kelemahan kita untuk memprediksi kejadian masa depan dan dalam mengakomodir tuntutan lingkungan strategis yang setiap saat selalu berubah. Ada beberapa hal yang kami anggap telah dikembangkan dari model sebelumnya merupakan pengembangan terbaru, antara lain :

1. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang dan menjawab tuntutan lingkungan strategis yang setiap saat selalu berubah. Data dan informasi yang akurat dan setiap saat selalu dapat diakses sebagai bahan pengamatan lingkungan strategis (*Environmental Scanning*) harus dijadikan pedoman untuk perumusan strategi (*Strategy Formulation*) dan dijadikan pedoman pula disaat strategi di implementasikan (*Strategy Implementation*). Dengan demikian aktivitas pengumpulan data dan informasi yang akurat yang tertuang dalam data base adalah suatu prasyarat yang mutlak dan dianggap penting. Pernyataan ini sebagai gugatan terhadap daerah yang mengabaikan arti pentingnya pengembangan kelembagaan data dan informasi elektronik serta penciptaan sistem data base yang dapat menggambarkan kondisi riil daerah sesungguhnya yang dapat membantu pimpinan dalam penetapan dan mengimplementasikan kebijakan.

2. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan adalah bagian dari perumusan strategi (*Strategy Formulation*) dan merupakan rencana Jangka Panjang, Menengah dan Jangka Pendek sebagai esensi yang harus diwujudkan. Visi sebagai rencana jangka panjang bukanlah sekedar mimpi yang tidak membumi, tetapi sebagai mimpi yang harus menjadi kenyataan. Pernyataan ini sebagai kritik terhadap visi Provinsi Riau dalam jangka waktu 20 tahun kedepan menjadi pusat perekonomian di Asia Tenggara dianggap tidak berdasar dan tidak realistis, karena tidak berdasarkan kemampuan yang telah dicapai saat ini. Ini harus dipahami bahwa proses pembangunan melalui tahapan yang berkesinambungan.
3. Evaluasi dan pengendalian merupakan fungsi pengawasan dijadikan bagian dari implementasi strategi dan bukan salah satu elemen dasar tersendiri dari manajemen strategis. Hal ini untuk mengingatkan kita akan kekeliruan pemahaman yang selama ini kita peraktekkan bahwa sering kita melakukan evaluasi dan pengendalian setelah kegiatan berakhir. Seharusnya evaluasi dan pengendalian telah dilakukan disaat atau ketika kegiatan telah dimulai, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian yang tidak diinginkan.
4. Keluaran dan hasil dari proses pencapaian tujuan harus dijadikan umpan balik melalui proses pengamatan lingkungan strategis berikutnya dan dijadikan sebagai landasan untuk perumusan strategi dan implementasi strategi selanjutnya. Karena itu proses kerja manajemen strategis diilustrasikan sebagai suatu model yang bergerak siklus dan linier sebagai perubahan yang menuju kepada kondisi yang lebih baik.

Untuk dapat lebih memahami konsep dan model manajemen strategis ini, penjabarannya diilustrasikan pada gambar 2.3. berikut ini.

Emergent Strategy



Feed Back Strategy Enveronmental

Gambar 2.3. Proses Manajemen Strategis Sektor Publik dan Bisnis (Sufian) Sumber: IJICC (Sufian Hamim, 2019)

Berdasarkan gambar 2.3. dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, Pengamatan Lingkungan Starategis (*Strategy Environmental Scanning*), terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal ditujukan pada variabel-variabel (*Opportunitiesand Threats Organization*) terdiri dari : idiologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Sedangkan Analisis lingkungan internal ditujukan pada variabel (*Strengths and Weaknesses Organization*) terdiri dari : struktur oarganisasi, budaya oarganisasi dan sumber-sumber daya organisasi, terdiri dari : manusia, uang, mesin, bahan, metode dan masyarakat/pasar.

Kedua, Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*) adalah membangun rencana-rencana jangka panjang untuk efektivitas manajemen dari peluang dan tantangan lingkungan organisasi, dalam memperjelas dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi, meliputi perumusan visi, misi-misi, tujuan-tujuan, strategi- strategi, dan kebijakan-kebijakan. Visi adalah tujuan mendasar yang ingin dicapai atau pembicaraan tentang keberadaan organisasi, mau dijadikan apa dan diarahkan kemana. Misi organisasi biasanya menceritakan “*Who we are and what we do*”. Skop besar misi aktivitas organisasi meliputi banyak tipe dari produk dan pelayanan. Tujuan adalah hasil atau akibat yang ingin dicapai dari aktivitas rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Strategi adalah suatu bentuk rencana yang menyeluruh keadaan bagaimana organisasi akan menyelesaikan atau mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah pengaliran dari strategi, memberi kebijakan sebagai pedoman umum untuk mengambil keputusan dalam proses keluaran atau mencapai tujuan organisasi.

Ketiga, Implementasi Strategi (*Strategis Implementation*) adalah suatu proses yang mana kelompok manajemen strategis menterjemahkan strategi dan kebijakan ke dalam proses tindakan implementasi program, anggaran, dan prosedur. Program adalah suatu pernyataan dari aktivitas atau langkah-langkah keinginan untuk menyelesaikan satu bagian dari rencana jangka pendek yang tertuang dalam berbagai kegiatan, dan membuat strategi tindakan nyata. Anggaran adalah suatu pernyataan atau uraian rincian biaya program dan kegiatan, yang bermanfaat bagi kelompok manajemen strategis dalam perencanaan dan pengawasan. Prosedur adalah suatu sistem langkah-langkah berikutnya atau teknik yang menguraikan secara rinci terutama bagaimana suatu tugas yang diserahkan kepada seseorang atau pada suatu bagian untuk dapat diselesaikan.

Evaluasi dan Pengendalian adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap: menetapkan standar pekerjaan, membandingkan pekerjaan dengan standar dan menentukan

perbedaannya, jika ada, segera mengoreksi penyimpangan yang tidak diinginkan melalui tindakan penanggulangan.

Dari uraian penjelasan penjabaran mekanisme kerja manajemen strategis tersebut yang dapat dijadikan kerangka acuan pembangunan nasional dan daerah, suka atau tidak suka sadar atau tidak sadar kita setiap saat dalam beraktivitas sehari-hari telah melaluinya. Hanya saja tingkat pemahaman dan pelaksanaannya jelas berbeda. Katakanlah ketika kita menyusun atau merumuskan dan mengimplementasikan Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDA), Visi Daerah, Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) atau Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (PPJP) Daerah, menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), dan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Daerah (APBD) yang berbasis kinerja, sebenarnya kita telah menggunakan konsep dan model manajemen strategis ini. Hanya saja tingkat kebenaran dan keakuratannya belum optimal sebagaimana yang diharapkan.

Strategi Pengembangan Usaha Ekonomi Pertanian Pedesaan

Dalam kerangka acuan pembangunan nasional, pembangunan yang memberdayakan masyarakat di pedesaan harus menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab bersama. Membangun masyarakat pedesaan berarti pula membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Selain memiliki potensi sumber daya manusia, pedesaan juga memiliki potensi sumber daya alam.

Dengan demikian pembangunan masyarakat pedesaan Indonesia harus menjadi pusat perhatian yang lebih serius, terencana, terpadu dan berkesinambungan, serta dipercepat prosesnya, sebagaimana telah ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999–2004 sebagai TAP MPR No. IV/ MPR /1999 (huruf G angka 1. d), bahwa perlu percepatan pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan

program prasarana, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pendekatan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat yang berdasarkan situasi kondisi internal dan eksternal merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan, antara lain berupa potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, tidak dapat diabaikan.

Strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan potensi yang ada di perdesaan, tentunya tidak efisien, mengingat pada kenyataannya perdesaan di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik antara satu Desa dengan Desa yang lain.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa rencana maupun program pembangunan ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, dan lain-lain harus disesuaikan dengan potensi sosial dan potensi alam setempat yang ada di desa serta didukung oleh pengusaha besar, kemudian dikaitkan pula dengan peluang-peluang pasar lokal, regional, nasional dan pasar internasional.

Untuk mewujudkan rencana dan program yang demikian dibutuhkan dukungan sumber dana dan manusia dari berbagai pihak : Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Perusahaan Besar, Perbankan, Balai Pelatihan, Koperasi, BUMDES, LSM dan lain sebagainya dalam rangka pembinaan masyarakat tani dan nelayan di perdesaan.

Sebenarnya peruntukan Dana Desa, merupakan bagian dari penyediaan dukungan dana dari Pemerintah Pusat, seharusnya juga sinergik dengan dana yang disediakan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten. Pemanfaatan dana ini konsepnya harus jelas dan sangat mengawatirkan jika diserahkan langsung kepada petani, apabila tanpa pengarahan dan pembinaan kepada petani tersebut. Berdasarkan pengalaman masa lalu dana PEK dan IDT, dana ini dapat beralih dari tujuan semula produktif menjadi konsumtif, bahkan terjadi kebocoran di tingkat birokrasi. Pendamping yang dipilih sebaiknya menggunakan Lembaga

Perguruan Tinggi, LSM yang memiliki integritas bekerjasama dengan instansi terkait.

Dukungan dana dan pembinaan diperlukan masyarakat tani dan nelayan terutama ditujukan pada manajemen usaha, pengolahan lahan, efisiensi dan efektivitas berusaha, dan bantuan teknologi termasuk pembinaan memasarkan produk. Semuanya itu dilakukan dalam rangka proses pembelajaran dan pemberdayaan dalam rangka kemandirian masyarakat tani dan nelayan.

Untuk tahap awal, sebelum program ini diperuntukkan untuk semua desa, diperlukan suatu pelaksanaan program untuk desa-desa percontohan. Tahap pertama dilakukan kajian analisis potensi alam dan potensi masyarakat setempat untuk membuat suatu proyek desa percontohan dalam rangka mengembangkan jenis-jenis usaha apa saja yang perlu dikembangkan yang dilakukan secara terintegral dan terpadu dan memerlukan dukungan dana dan pembinaan dari perguruan tinggi, LSM, swasta perkebunan besar, dan instansi terkait.

Pada tahap berikutnya disediakan, modal kerja dalam bentuk sarana produksi yang dibutuhkan petani, setelah itu dilakukan pembinaan, yaitu : melakukan pemilihan usaha yang berbasis potensi desa dan dikaitkan dengan peluang pasar (*market*); melakukan pelatihan terhadap SDM petani, memberikan dukungan finansial, pengolahan lahan secara mekanik dalam skala luas, pembinaan lembaga Koperasi, dan penerapan teknologi. Kesemuanya itu diharapkan melahirkan suatu desa yang dapat dijadikan contoh dalam pengembangan usaha pertanian terpadu yang memiliki efek ganda (*multi efec*) dalam rangka pengurangan tingkat kemiskinan dan kebodohan.

Ada beberapa hal penting yang harus dianalisis apabila akan mengembangkan usaha di desa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan dan kebodohan (Sufian H., 2020) antara lain :

1. Apa potensi alam dan sosial suatu komunitas masyarakat atau desa; Jenis usaha apa saja yang perlu dikembangkan dikaitkan dengan potensi alam dan sosial pada suatu komunitas setempat atau pada suatu desa yang dikaitkan dengan peluang pasar;

2. Bagaimana pembinaan yang harus dilakukan terhadap petani atau masyarakat miskin dalam berusaha;
3. Bagaimana mengoptimalkan dukungan finansial dari pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat sehingga penggunaan dana tidak konsumtif, tetapi memiliki nilai ganda dalam rangka penyediaan modal kerja, pembinaan SDM petani dan penerapan teknologi pertanian.

Dari potensi, kelemahan, peluang dan tantangan pengembangan usaha masyarakat di desa tersebut di atas, apabila dikaji karakteristik pengembangan usaha di Provinsi Riau dapat saja berupa pembukaan perkebunan dalam skala luas dengan kebijakan redistribusi asset kepada petani dan nelayan atas dasar dukungan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat dan pertimbangan karakteristik potensi alam dan berorientasi kepada pasar (*market*).

Salah satu strategi yang diterapkan adalah seluruh kegiatan perkebunan dan pertanian dipusatkan pada suatu KUD sebagai pusat lembaga perekonomian dan seluruh peserta program wajib menjadi anggotanya. Ini adalah merupakan proses pemberdayaan masyarakat. Dimana pada suatu ketika masyarakat sudah mampu mengrus usahanya maka KUD beserta assetnya akan diserahkan. Hal ini atas dasar konsep (Sufian H., 2020) bahwa pemberdayaan masyarakat akan terjadi apabila :

1. Dalam jangka waktu tertentu masyarakat harus mampu berusaha sendiri;
2. Pada tahap awal diberikan modal dan pembinaan; Pemerintah, Lembaga perguruan Tinggi, Pengusaha (investor) dan LSM, bertindak sebagai agen perubahan (pembangunan) dengan menyediakan kebutuhan usaha masyarakat, berupa:
 - a. investasi dan modal kerja dengan cuma-cuma atau kredit lunak tanpa bunga;
 - b. Bantuan dan Penyediaan mekanisasi pertanian, teknologi (bibit unggul, pupuk dan racun hama penyakit, dsbnya);
 - c. Tenaga ahli sebagai pembina/pendamping;
 - d. Membantu proses terbentuknya Organisasi/Lembaga Ekonomi berupa KUD;

- e. Memberikan pelatihan dan keterampilan secara cuma-cuma;
- f. Memberi motivasi dan etos kerja;
- g. Membantu dalam memasarkan hasil produksi.
- h. Pemerintah, perguruan tinggi dan LSM, berkewajiban menjembatani pola kemitraan (saling menguntungkan) antara petani dengan pengusaha perkebunan, tanaman pangan dan perikanan, petani sebagai pelaksana pengadaan bahan baku dan Perusahaan menyediakan pabrik pengolahan (agro industri).

Usaha yang dapat dilakukan dapat berupa perkebunan kelapa sawit atau jenis tanaman perkebunan apapun dalam skala luas yang sesuai dengan kondisi lahan dan budaya bertani masyarakat lokal yang diminta pasar lokal, domestik, nasional dan internasional (ekspor), diharapkan sebagai penghasilan untuk jangka panjang. Sedangkan usaha lain sebagai tumpang sari atau melengkapi, misalnya ternak ayam potong, tanaman sayuran dan buah-buahan merupakan penghasilan jangka pendek.

Dasar pemikirannya adalah sambil menunggu 4-5 tahun sawit berproduksi, penghasilan tanaman tumpang sari dan ternak ayam potong atau kolam ikan diharapkan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau konsumsi masyarakat lokal. Selain itu pupuk kandang ayam potong dapat bermanfaat untuk pupuk kandang perkebunan kelapa sawit.

Namun demikian setelah 4-5 tahun, apabila tanaman perkebunan jangka panjang sudah menghasilkan maka masyarakat sebagai peserta program sekarang harus mengembalikan biaya atau modal yang telah diterimanya kepada KUD dengan cara mencicil perbulan tanpa dikenakan biaya bunga dalam jangka waktu yang sangat meringankan. Ikatan ini dilakukan dalam suatu surat perjanjian, dengan jaminan kebunnya. Kemudian dana yang terkumpul di koperasi setelah 8-10 tahun selain untuk pengembangan usaha digulirkan kembali kepada masyarakat yang belum menerima program dengan pelaksanaan program menggunakan sistem yang sama.

Organisasi pengembangan usaha Desa (Sufian H., 2020) terdiri dari :

1. Organisasi Pembina adalah Pemerintah, Perguruan Tinggi, BUMDES dan LSM, sedangkan Pelaksana Utamanya Koperasi Unit Desa (KUD) Desa. Segala kebutuhan dan hasil produksi pertanian terpusat di KUD, dan setiap anggota penerima program wajib menjadi anggotanya.
2. Organisasi Pembina Pendamping adalah :Dinas Daerah Terkait, dalam hal ini sebagai tenaga teknis dan penyuluh lapangan, antara lain misalnya : Dinas Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, Pertanahan, Kimpraswil, Pasar, Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
3. Organisasi Pengawas adalah Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan Bawasda adalah sebagai pengawas program.
4. Peserta yang menerima program adalah masyarakat miskin yang berada di Desa.

Pemilihan dan penunjukan yang menjadi peserta program dilakukan dengan penyebaran Instrumen, wawancara dan pengamatan langsung terhadap masyarakat berupa aktivitas dan tempat tinggalnya. Proritas yang menerima program adalah masyarakat yang miskin yang sudah berkeluarga dan sudah menetap minimal 5 tahun, selain tidak memiliki usaha yang tetap, pendapatan rendah, tempat tinggal yang kurang memadai, juga dipertimbangkan mereka yang memiliki semangat kerja cukup tinggi. Atas dasar kriteria tersebut disusun daftar nama yang menerima program, dan tidak begitu perlu pemetaan kemiskinan yang datanya tidak akurat kalau hanya dibuat dalam 2-3 bulan.

Daftar nama tersebut akan di cek lagi secara faktual di lapangan apakah benar- benar masyarakat miskin, jika masih ada masyarakat yang lebih berhak menerima bantuan program ini maka namanya akan diganti pada calon peserta yang lebih berhak menerimanya.

Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan di Pedesaan

Dengan mengacu pada beberapa teori pertumbuhan ekonomi dari berbagai aliran (Sufian Lolita, 2020: 12), maka setidaknya-tidaknya ada beberapa faktor yang harus ada selalu tersedia dan berfungsi pada masyarakat perdesaan, diantaranya :

1. Tenaga kerja yang terampil dan sehat, pembentukan melalui peningkatan sumber daya manusia.
2. Petani yang memiliki tanah (lahan) melalui kebijakan *landreform* dan redistribusi asset.
3. Dana untuk investasi dan modal kerja, melalui penyediaan kredit jangka panjang dan kecil tingkat suku bunga yang disediakan bank pemerintah atau koperasi desa.
4. Seperangkat aturan yang mencegah terjadinya monopoli /persaingan yang tidak sehat dan iklim sosial politik yang kondusif.
5. Jaminan distribusi dan pemasaran hasil-hasil usaha di perdesaan.
6. Teknologi tepat guna (yang disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik sosial ekonomi desa).
7. Pembagian kerja (usaha) secara lokal, regional dan nasional, melalui perkembangan spesialisasi produksi yang sesuai dengan sumber-sumber setempat.
8. Dukungan kebijakan dan kemampuan politik dari pemerintah.
9. Berfungsinya lembaga-lembaga dalam masyarakat.

Diperlukan beberapa strategi pembangunan pedesaan untuk ketahanan pangan (Sufian Lolita, 2020: 13) antara lain perlu keterpaduan dan saling mengisi pembangunan semua sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan industrialisasi, hulu dan hilirisasi yang terintegrasi ke dalam suatu pusat pengembangan kawasan pembangunan dengan manajemen pembangunan strategis, terintegrasi dan holistik. Pemantapan manajemen produksi, proses dan pemasaran hasil. Setelah pasca panen petani diharapkan juga mampu melaksanakan usaha pasca panen dengan proses kemasan dan pengolahan produk lanjutan,

misalnya pakan ternak dan pakan ikan, sehingga lebih ekonomis dan memiliki nilai tambah.

Perlu mengarahkan masyarakat melakukan kegiatan pertanian sesuai kondisi lahan dan kondisi permintaan pasar. Tidak jarang masyarakat perdesaan kurang memahami bagaimana bertani yang produktif dan efisien. Ini harus diakui karena kita menyadari masyarakat perdesaan kurang pengetahuan dan teknologi pertaniannya. Melalui pembinaan kepada masyarakat formal dan informal dan akhirnya akan diikuti masyarakat lainnya di desa, melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, dll yang harus selalu produktif dan efisien harus selalu diterapkan. Misalnya pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan, misalnya: tanah yang berawa tidak mungkin cocok untuk tanaman untuk daerah dataran tinggi. Termasuk disini iklim dan curah hujannya. Konsekuensinya supaya menghindari pemborosan tenaga, biaya dalam mengolah pertanian. Logikanya tanaman akan subur dan berkembang dengan baik jika ditanam ditempat yang disukai. Dan selain dari itu juga diprioritaskan tanaman yang ditanam atau usaha yang dilakukan dalam kegiatan pertanian mengacu kepada permintaan pasar. Artinya jika suatu hasil pertanian yang sudah selalu tersedia di pasar dan berlebih-lebihan janganlah memilih atau memprioritaskan hasil pertanian yang sudah selalu tersedia di pasar dan berlebih-lebihan janganlah memilih atau memprioritaskan hasil pertanian seperti ini. Karena akan mengakibatkan menurunnya harga penjualan, karena menurut hukum pasar, apabila barang selalu tersedia sementara permintaan berkurang maka harga akan turun (atau sebaliknya). Jika harga produksi pertanian turun maka niscaya akan mempengaruhi tingkat pendapatan pertanian. Selain itu juga para petani harus diarahkan menanam tanaman yang tumbal sulam, artinya ada kombinasi antara tanaman keras (perkebunan) dan tanaman palawija, pangan, tanaman hortikultura atau tanaman sebagian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan petani sehari-hari, misalnya jagung, ubi, kacang-kacangan, buah-buahan, kunyit, halia, lengkuas, tomat, cabe, dll sebagainya. Selain itu juga peternakan: ayam, itik, kambing, dll sebagainya.

Kerjasama Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Salah satu persoalan yang sering kali muncul ketika pembangunan daerah menjadi prioritas dan ketika otonomi daerah menjadi keharusan adalah “masalah interaksi” antar instansi maupun antar Daerah Otonom itu sendiri. Selama ini akibat dari ciri strategi pembangunan yang bersifat “*Executive Planning*”, instansi-instansi pembuat rencana dan kebijakan pembangunan lebih cenderung mengembangkan jalur-jalur vertikal, ketimbang mengembangkan koordinasi horizontal antar instansi atau antar pemerintahan pada level pemerintahan yang sama.

Pemerintah Kabupaten / Kota cenderung lebih senang membangun hubungan ke atas (Pemerintah Pusat) atau ke bawah (Kemerintah Kecamatan) di wilayahnya. Sedangkan hubungan yang bersifat horizontal, antar Pemerintah Kabupaten / Kota seringkali terabaikan. Padahal dalam berbagai kegiatan pembangunan banyak contoh menunjukkan dimana Kabupaten / Kota seringkali tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Artinya agar pembangunan di suatu Daerah berlangsung optimal, daerah yang bersangkutan membutuhkan suatu hubungan strategis dengan daerah lainnya, khususnya yang berada dalam suatu kawasan. Sehingga potensi-potensi yang dimiliki masing-masing daerah bisa saling mendukung untuk kemajuan bersama.

Untuk efektifnya suatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diperlukan kerjasama tim yang terkait. Kerjasama dilakukan oleh sebuah tim lebih efektif daripada kerja secara individual. Menurut West (dalam Hatta, 2017) telah banyak riset membuktikan bahwa kerja sama secara kelompok mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dan hal ini sangat berbeda dengan kerja yang dilaksanakan secara perorangan. Menurut Andrew Carnegie (dalam Kaswan, 2017) kerjasama tim ialah kemampuan bekerja sama mencapai visi bersama. Kemampuan mengarahkan pencapaian individual terhadap tujuan organisasi. Kerjasama tim merupakan bahan bakar yang memungkinkan orang bisa mencapai hasil yang luar biasa. Selain

itu menurut *New American Webster's Dictionary* mengatakan kerjasama tim atau teamwork tidak berbeda dengan collaboration atau kolaborasi. Karna itu, kata teamwork/ kerjasama tim dan collaboration/kolaborasi digunakan secara bergantian. Menurut Linden (dalam Kaswan, 2017) esensi kolaborasi ditunjukkan oleh kata itu sendiri. Collaboration adalah tentang co-labor (kerja sama), tentang joint effort (usaha bersama) dan ownership (kepemilikan). Kolaborasi terjadi ketika orang dari organisasi (unit dalam organisasi) yang berbeda menghasilkan sesuatu secara bersama-sama memulai usaha, sumber daya, dan pengambilan keputusan bersama, dan berbagai kepemilikan produk atau jasa akhir. Sebagaimana yang dinyatakan Bachtiar (dalam Hatta, 2017) kerjasama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang mengantarkan pada kesuksesan.

Menurut Manzoor (dalam Devina, 2018) kerjasama tim adalah kumpulan individu yang saling bergantung pada tugas dan bersama-sama bertanggungjawab atas hasil yang diperoleh. Menurut Sriyono dan Farida (dalam Devina, 2018) teamwork merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. Sedangkan Harris dan Harris (dalam Safitri, 2012) menjelaskan bahwa tim memiliki tujuan bersama atau tujuan dimana anggota tim dapat mengembangkan keefektifan dan hubungan timbal balik untuk mencapai tujuan tim.

Menurut Ancona dan Caldwell (dalam Aldi, 2003) kerjasama tim terdiri dari berbagai fungsi yang disatukan dalam satu pimpinan untuk melakukan sesuatu yang mendukung kegiatan keseluruhan organisasi. Kerjasama juga dapat menstimulasi seseorang berkontribusi dalam kelompoknya, sebagaimana yang dinyatakan Davis (dalam Hatta, 2017) bahwa kerjasama adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggungjawab pencapaian tujuan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa teamword adalah sekelompok orang dengan kemampuan, talenta, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai satu tujuan.

Sedangkan Menurut Keith Davis dan John W. Newstrom (1977) Indikator kerjasama tim antara lain : 1) Tujuan yang sama, 2) Antusiasme, 3) Peran dan tanggung jawab yang jelas, 4) Komunikasi yang efektif, 5) Resolusi konflik, yaitu kesepakatan dalam menyelesaikan konflik, 6) Share power (pembagian kekuasaan), dan 7) Keahlian yang dimiliki.

Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini disajikan perkembangan hasil penelitian terdahulu yang relevan variabel dan atau objek penelitiannya sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti, Tahun, Sumber	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu dan Perbedaan dengan Penelitian ini
01	Fajar Eko Anton dan Keziah Cahya Virdayanti, 2018 Jurnal Kertas Kerja Bappenas (BWP) Vol 1 No 1 (2018): Edisi April 2018	Isu Terpilih dalam Perencanaan Strategis Sektor Publik di Indonesia	Perencanaan Strategis Sektor Publik	Kuantitatif dan Kualitatif	Perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi penting pemerintah dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Kemajuan suatu negara tergantung pada kualitas perencanaan

	<p>DOI: https://doi.org/10.47266/bwp.v1i1</p>			<p>pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (sektor publik), yang akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Masalah-masalah perencanaan pembangunan melekat pada sistem perencanaan pembangunan itu sendiri. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam perencanaan strategis di sektor publik seperti: perencanaan sebagai proses legal-formal; kesalahan dalam penetapan</p>
--	--	--	--	--

				<p>tujuan; kesulitan dalam memprediksi masa depan; proses perencanaan partisipatif yang kurang strategis; kesulitan dalam merumuskan indikator kinerja yang sistematis dan berjenjang; kesulitan dalam mengukur kinerja dampak dan manfaat; dan kesulitan dalam penentuan prioritas dalam pemrograman dan penganggaran. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada Antusiasme dan Resolusi konflik, yaitu kesepakatan dalam menyelesaikan konflik,</p>
--	--	--	--	---

02	<p>Andi Ariadi, 2019</p> <p>Meraja Journal Vol. 2, No. 2, Juni 2019</p> <p>file:///C:/Users/acer/Desktop/54-Article%20Text-74-1-10-20190613%20(2).pdf</p>	Perencanaan Pembangunan Desa	Perencanaan Pembangunan Desa	Kuantitatif dan Kualitatif	<p>Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan</p>
----	---	------------------------------	------------------------------	----------------------------	---

					<p>Desa, arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sekaligus dengan penganggarnya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>dokumen ini - RKP Desa dan APB Desa merupakan hasil (output) dari Musrenbang tahunan. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sekaligus syarat, yaitu sebagai berikut: Pemberdayaan . Partisipatif. Berpihak pada Masyarakat, Terbuka. Akuntabel, Selektif, Efisien dan Efektif. Keberlanjutan, Cermat, dan Proses Berulang. Perbedaan dengan penelitian pada Peran dan tanggung jawab yang jelas, dan Komunikasi yang efektif.</p>
--	--	--	--	--	---

03	<p>Agustina Setiawan, Utang Suwaryo, Mudiyati Rahmatunnisa, 2020</p> <p>Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020):</p> <p>DOI: https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.197</p>	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan-an Desa di Kabupaten Bandung	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan-an Desa	<p>Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif sehingga instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yang dilengkapi dengan wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan kunci dan membuat catatan lapangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prosedur formal perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang hanya berupa kehadiran fisik dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang hanya mengambil bentuk partisipasi ide dan gagasan saja dengan mengabaikan</p>
----	---	---	--	--	--

				tentang peristiwa yang peneliti temui di lapangan.	partisipasi dalam kehadiran fisik. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada Peran dan tanggung jawab yang jelas, Share power (pembagian kekuasaan)
04	<p>Muhammad Badri, 2016</p> <p>Jurnal RISALAH, Vol. 27, No. 2, Desember 2016: 62-73</p> <p>62</p> <p>DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v27i2.2514</p>	<p>Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) GDM lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung top down dengan program pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, penerapan teknologi tepat guna serta perlindungan warga</p>

					<p>desa; 2) Paradigma pembangunan pedesaan yang dijalankan GDM berbasis TIK dengan mengoptimalkan aplikasi sistem informasi desa dan internet pedesaan; 3) Permasalahan pengembangan TIK berkaitan dengan rendahnya infrastruktur TIK di pedesaan dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan yang diselesaikan dengan strategi pelatihan dan pendampingan; 4) Media komunikasi</p>
--	--	--	--	--	--

					pedesaan yang dikembangkan adalah website desa dengandom ain desa.id, pengembangan aplikasi open source, dan interkoneksi desa. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada komunikasi yang efektif menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami penuh kekeluargaan.
05	<p>Carmen Sirianni, 2010</p> <p><i>Journal of the American Planning Association (JAPA)</i></p> <p>Volume 73- Issue 4</p> <p>https://doi.org/</p>	<p><i>Neighborhood Planning as Collaborative Democratic Design The Case of Seattle</i></p>	<p><i>Perencanaan sebagai Desain Demokratik Kolaboratif</i></p>	<p>Studi kasus pendekatan perencanaan lingkungan Seattle, berdasarkan wawancara semi-terstruktur dengan</p>	<p>Mendeskripsikan dan menganalisis contoh bagaimana pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dan pembangun</p>

	g/10.1080/0 1 9443607089 78519			33 perencana dan mantan, pejabat lain, dan aktivis lingkung n, dan tinjauan dari dokumen perencana an lainnya dan liptan surat kabar tentang proses perencana an.	kapasitas untuk perencanaan yang kolaboratif dan akuntabel di antara pemangku kepentingan lingkungan dan pemerintah kota. Hasil dan kesimpulan: Kota Seattle mengemban gkan seperangkat alat dan sumber daya untuk memberday akan warga lokal dalam proses perencanaan sambil juga meminta pertanggung jawaban mereka atas tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai luas yang ditentukan dan target perencanaan
--	--------------------------------------	--	--	---	--

					<p>. Ini, bersama dengan investasi besar kota dalam staf perencanaan lingkungan, yang berfungsi sebagai penyelenggara relasional dan perantara kepercayaan, sangat penting untuk keberhasilan perencanaan lingkungan dan munculnya budaya tata kelola kolaboratif di antara asosiasi masyarakat yang sangat beragam dan sering diperdebatkan, bisnis kepentingan, departemen kota, dan dewan kota. Perbedaan dengan penelitian</p>
--	--	--	--	--	--

					ini, yaitu pada Resolusi konflik, yaitu kesepakatan dalam menyelesaikan konflik, dan Share power (pembagian kekuasaan),
06	Eilola, Salla,. Niina Käyhkö, Andrew Ferdinands , 2019 <i>Journal landscape and urban planning</i> Volume 190 October 2019 https://doi.org/10.1016/j. .landurbpla n.2019.103 596	<i>A bird's eye view of my village – Develo ping particip atory geospat ial method ology for local level land use plannin g in the Souther n Highla nds of Tanzan ia</i>	<i>Pemeta an partisip atif dan sistem informa si geograf is partisip atif (PGIS) dalam proses perenca naan formal penggu naan lahan pedesaa n</i>	Aplikasi pemetaan partisipatif dan sistem informasi geografis partisipatif (PGIS) dalam proses perencanaan formal penggunaan lahan pedesaan di Global South. Menyajikan pemetaan partisipatif dan metodologi perencanaan yang telah di kembang	Kami menunjukkan bahwa metode pemetaan partisipatif dengan gambar georeferensi adalah alat yang ampuh untuk menangkap pengetahuan spasial lokal dari berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan kualitas dan kepercayaan dalam perencanaan tata ruang. Sebagai bantuan

				<p>kan bersama untuk proses perencanaan penggunaan lahan desa resmi di Tanzania. Menjelaskan 11 kriteria berbasis literatur untuk mengintegrasikan pemetaan partisipatif ke dalam proses perencanaan tata ruang . Penilaian meliputi analisis peta dan observasi rencana penggunaan lahan desa (VLUP), serta wawancara dan diskusi kelompok</p>	<p>visual, gambar georeferensi mendukung pertimbangan dan pemeriksaan lanskap secara rinci, meningkatkan pemahaman spasial dan pembelajaran tentang lanskap desa. Selain menghasilkan data spasial lokal, kami menunjukkan bahwa metode geospasial partisipatif mendukung kapasitas pengambilan keputusan peserta, yang penting untuk efektivitas metode dalam proses perencanaan penggunaan lahan formal.</p>
--	--	--	--	---	--

				dengan peserta dan fasilitator proses perencanaan	Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada Tujuan yang sama, dan Peran serta tanggung jawab yang jelas antara kelompok masyarakat terutama peran lembaga adt.
07	<p>Sufian Hamim dan Sri Indrastuti, 2019</p> <p><i>International Journal of Innovation, Creativity and Change</i></p> <p>Volume 10 (4): 27-40. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213145366</p>	<p><i>The Open System of Strategic Planning for the Development of Rural Autonomy in Riau, Indonesia</i></p>	Sistem Terbuka Perencanaan Strategis	Kuantitatif Path Diagram Structural Equation Modeling (SEM) Desa di Riau	<p>Pengamatan lingkungan strategis tidak saja bermanfaat untuk perumusan rencana strategis, melainkan juga diperlukan disaat implementasi strategis. Dengan demikian perencanaan strategis akan efektif dan efisien apabila perumusan rencana strategis</p>

					mendekati situasi dan kondisi lingkungan sosial dan alam yang sebenarnya atau kontekstual di pedesaan. Perbedaan dengan penelitian ini, pada tujuan yang sama yaitu kerjasama tim pembangunan kontekstual, partisipatif dan aspiratif.
08	John M. Bryson, Lauren Hamilton Edwards & David M. Van Slyke, 2018 <i>Journal Public Management Review</i> Volume 20(3): 317-339. https://www.tandfonline .	<i>Getting strategic about strategic planning & research</i>	Perencanaan Strategis	Kuantitatif dan Kualitatif	Perencanaan strategis sektor publik bukanlah satu hal, melainkan seperangkat konsep, prosedur, alat, dan praktik yang harus diterapkan secara sensitif dan dalam situasi

	co m/doi/full/10 : 1080/1471903 7.2017.12851 11				<p>tertentu jika manfaat yang diperkirakan dari perencanaan strategis dapat tercapai untuk direalisasikan. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada kerjasama tim mencapai tujuan pada program yang dibutuhkan masyarakat.</p>
09	<p>Eka Eka,dkk, 2021</p> <p><i>Journal of Election and Leadership (JOELS)</i></p> <p>Volume 1 (2)</p> <p>https://journal.unilak.ac.id/index.php/joels/article/view/7562/3173</p>	<p>Pengembangan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa</p>	<p>Musyawarah Rencana Pembangunan Desa</p>	<p>Kualitatif dan Kuantitatif, Desa-desi di Kabupaten Kampar</p>	<p>Organisasi dan kelembagaan desa yaitu Pemerintah Desa dalam Permusyawaratan Desa kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan tugas, pokok serta fungsi organisasi</p>

					secara baik dan benar. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada keahlian yang dimiliki tentang perencanaan kontekstual.
10	<p>Mariano Werenfridus, Zainul Rahman, Krishno Hadi, 2021</p> <p><i>Public Administration Journal</i></p> <p>11 (2) Desember 2021 DOI: 10.31289/jap.v11i2.5486</p>	<p><i>Implementation Analysis of the Village Council Function in Donowarih Village Administration, Malang Regency</i></p>	<p>Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</p>	<p>Kualitatif, Nvivo, Desa Donowarih Kabupaten Malang</p>	<p>Ketiga fungsi BPD sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Donowarih kurang efektif disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: komposisi sumber daya manusia, fasilitas</p>

					penunjang kegiatan BPD, perbedaan pekerjaan utama setiap anggota BPD, Pimpinan BPD, dan minimnya tunjangan yang diterima anggota BPD. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi BPD di Desa Donowarih kurang maksimal
11	Zarkasi, A., dan Dimasrizal, D. 2019 <i>Unri Conference Series: Community Engagement Vol 1 (2019)</i> DOI: https://doi.org/10.31258/unricsce.1.652-657	Pola kerjasama kepala desa Dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa	Kemampuan Kerjasama Kepala Desa Dengan BPD	Kualitatif (FGD). Desa Petajen Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari	Kurangnya pengetahuan antara Kepala Desa dengan Badan permusyawaratan Desa dalam hal pembangunan desa, dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta tidak adanya bimbingan teknis yang

					<p>diberikan oleh pemerintah daerah kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut dalam peningkatan kemampuan kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkatkan pembangunan desa. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada keahlian yang dimiliki</p>
--	--	--	--	--	---

					anggota tim berkaitan dengan pembangunan ketahanan pangan.
12	<p>Sufian Hamim dan Lolita Vianda, 2019</p> <p>PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik</p> <p>5 (2): 206-216. DOI : https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4291</p>	<p>Strategi Perencanaan Pembangunan Kontes tual Terpadu Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Industrialisasi Pengolahan Menjadi Pakan Ternak dan Ikan</p>	<p>Strategi Perencanaan Pembangunan Kontes tual</p>	<p>Kuantitatif dan Kualitatif (FGD), Desa Kabupaten Indragiri Hilir</p>	<p>Diperlukan strategi keterpaduan dan saling mengisi pembangunan semua sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan industrialisasi, hulu dan hilirisasi yang terintegrasi ke dalam suatu pusat pengembangan kawasan pembangunan dengan manajemen pembangunan strategis, terintegrasi dan holistik. Setelah pasca panen petani diharapkan juga mampu melaksanaka</p>

					n usaha pascapanen dengan proses kemasan dan pengolahan produk lanjutan, misalnya pakan ternak dan pakan ikan, sehingga lebih ekonomis dan memiliki nilai tambah. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada tujuan yang sama, dan keahlian yang dimiliki dalam membangun kerjasama tim.
13	Sufian Hamim, Syafril Abdullah, dan Lolita Vianda, 2022 <i>Researchgate.net/Publication</i>	<i>Crops Agricultural Development Strategy on Peatlands in</i>	Strategi Pemanfaatan Pertanian Tanaman Pangan	Kuantitatif dan Kualitatif (FGD), Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri	Luas lahan dan produktivitas pemanfaatan lahan pertanian gambut di desa Pulau Palas untuk tanaman

	<p>Februari 2022 https://www.researchgate.net/publication/358537445_Crops_Agricultural_Development_Strategy_on_Peatlands_in_Pulau_Palau_Village_Indragiri_Hilir_Regency_Riau-Indonesia</p>	<p>Pulau Palas Village Indragiri Hilir Regency Riau Indonesia</p>		<p>Hilir,Riau - Indonesia</p>	<p>pangan masih sangat rendah. Kondisi demikian dapat dilihat dari jumlah hasil produksi panen per tahun. Strategi pertanian Pola tumpang sari belum terlasana dengan baik, apabila teknologi tepat guna yang saling mendukung dengan teknologi sendiri berdasarkan tradisi dan kearifan lokal saling melengkapi, demikian juga kreativitas yang memadukan ekonomi usaha pertanian dengan agrowisata</p>
--	---	---	--	-------------------------------	--

					<p>belum menjadi inovasi yang meyakinkan petani. Perlu pembinaan dan pendampingan inovatif dari Pemerintah dan organisasi sosial lainnya. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada resolusi konflik, yaitu kesepakatan dalam menyelesaikan konflik, dan Keahlian yang dimiliki.</p>
14	<p>Oki Wijaya, 2017</p> <p><i>Journal of Agribusiness and Rural Development Research</i></p> <p>VOL 3 NO 1.</p>	<p>Strategi Pengembangan Komoditas Pangan Unggulan</p>	<p>Strategi Pengembangan Komoditas Pangan Unggulan</p>	<p><i>Location Quotient (LQ), (SWOT) dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM),</i></p>	<p>Komoditas pangan yang memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Batang adalah beras, jagung, dan ubi kayu.</p>

	DOI: https://doi.org/10.18196/agr.3144	dalam Menujng Ketahaan Pangan Wilayah (Studi Kasus di Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tenga)	lan	Desa Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	Prioritas strategis pengembangan keunggulan komparatif komoditas pangan adalah pemanfaatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK), untuk penyelesaian permasalahan komoditas pangan. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan mendukung ketahanan pangan terutama pada ketersediaan pangan. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penekanan pada peran
--	---	--	-----	---	---

					dan tanggung jawab dan komunikasi yang efektif.
15	<p>Hiziroglu M. 2021 <i>International Public Management Sector</i></p> <p>Vol. 34 No. 5, pp. 546-567. https://doi.org/10.1108/IJPSM-04-2020-0109</p>	Perubahan persepsi lingkungan dalam rencana strategis	Perubahan persepsi lingkungan dalam perencanaan	Desain/metodologi /pendekatan Penelitian ini merupakan studi kasus eksploratif dari tiga metropolitan di Turki: Istanbul, Ankara dan Izmir	<p>Temuan mengungkapkan bahwa penggunaan rencana strategis sebagai panduan sangat diperlukan, kondusif untuk perubahan dan alat yang berguna untuk efektivitas strategi. Studi ini merekomendasikan bahwa "rencana strategis" tidak hanya digunakan sebagai ritual tetapi juga sebagai panduan untuk perubahan. Implikasi praktis rencana strategis</p>

					menyediakan manajer dengan alat yang diperlukan untuk melakukan analisis yang memberikan wawasan sejauh mana mereka mampu mengelola perubahan ketika mereka membandingkan rencana strategis mereka dan mempraktikkannya dalam periode berturut-turut dan menunjukkan bagaimana rencana strategis berperan dalam menelusuri perubahan institusi. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penekanan
--	--	--	--	--	--

					pada kerjasama tim atas dasar perumusan rencana penekanan pada data potensi sektor pangan desa.
16	John M. Bryso , Barbara C. Crosby & John K. Bryson, 2019 <i>Management Public International Journal</i> Volume 12:2, 172-207, DOI: 10.1080/10967490902873473.. https://www.tandfonline.com.translate.google/doi/full/10.1080/10967490902873473?cookieSet=1&xt_r_sl=e	Mema ha mi Perenc an aan, Perum usa n dan Imple me ntasi dari Strateg i S ebagai Cara Menge tah ui: Suatu Kontri bus i dari Aktor Jaringa n Teori	Perenc a naan Str a- tegis	Kuantitati f dan Kualitatif. Penelitian perencana an strategis dari tahun 1995 sampai 2007. Dewan Metropolita n, pemerinta h daerah, adalah sponsor utama MetroGIS, yang terdiri dari lebih dari 300 mitra organisasi di seluruh wilayah.d i antara organisasi	Penelitian ini memiliki dua tujuan: pertama, untuk mengambil seri us pada gagasan dari perencana aan strategis sebagai suatu cara untuk meng etahui, dan kedua, untuk berpendapat bahwa aktor- jaringan teori menyediaka n sebuah metode yang pantas untuk memahami apakah dan b agaimana perencanaan strategis

	<p><u>n& x tr tl=i</u> <u>d& x tr hl=</u> <u>id</u></p>			<p>publik yang melaya ni wilayah metropoli tan Twin Cities di Minnesot a, AS.</p>	<p>bekerja dalam keadaan tertentu. Penelitian ini juga membantu menjelaskan perencanaan strategi untuk inklusif, partisipatif, dan demokratis dal am mengelola masyarakat. Kesimpulan yang ditawarkan tentang pentingnya melihat dan mempelajari perencanaan strategis sebagai cara untuk mengetahui dan sebagai kendaraan potensial untuk inklusif pengelolaan masyarakat dalam sebuah masyarakat demokratis. Perbedaan</p>
--	---	--	--	---	--

					dengan penelitian ini, yaitu penekanan pada kerjasama Tim yang saling menguntungkan yang Berpihak pada kepentingan masyarakat.
17	<p>Lutfi Rumkel, Belinda Sam, M Chairul Basrun Umanailo, 2019</p> <p>Jurnal Ilmiah dan Teknologi Internasional</p> <p>VOLUME 8, ISSUE 08, AUGUST 2019.</p> <p>https://www.ijsr.net/?gclid=CjwKCAjwquWVBhBrEiwAt1Kmwjg5nL3mUw9yiOJMWwPVhfp_5aTBRC4RNEC</p>	<p>Kemitraan Kepala Desa, Musyawarah Desa Badan dan Lembaga Adat di Desa Perkebangan</p>	<p>Kolaborasi badan permusyawaratan desa dan lembaga adat dalam perencanaan hingga pemanfaatan</p>	<p>Kualitatif. Lokasi penelitian difokuskan di desa Kayeli. Jumlah wawancara informan 30 orang yang terdiri dari desa aparat, tokoh masyarakat, masyarakat adat dan masyarakat lokal diambil secara purposive. Teknik analisis</p>	<p>Pemerintah Desa Kayeli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Buru dimana unsur administrasinya menjadikan Pemerintah desa Kayeli harus menjalankan tugas administrasi secara ketat dalam kegiatannya, bahkan keterlibatan dalam lembaga adat yang</p>

	NGFjcAI-HDYfAlqNu9BoCP30QAvD_BwE			<p>yang digunakan untuk mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p>	<p>akhirnya mempengaruhi orientasi dan pelaksanaan pembangunan. Tiga unsur kelembagaan desa yaitu Pemerintah Desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga adat mampu berkolaborasi mulai dari perencanaan hingga pemantauan perkembangan Kayeli masyarakat desa. Hasilnya menunjukkan bahwa Hubungan yang terbangun dari ketiga lembaga tersebut mampu menciptakan harmonisasi pembangunan desa yang terwujud melalui</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>perencanaan ,pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan bersama-sama dengan komunikasi dan peran aktif dalam pembangunan desa</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penekanan pada setiap anggota Tim mendapatkan Tupoksi dan Peranan yang jelas, pembagian kekuasaan sesuai minat/keahlian, dan menjadi bahagian keseluruhan.</p>
18	<p>Beibei Tang, 2014</p> <p><i>Journal of Contemporary China</i></p> <p>Volume 24, 2015 - Issue</p>	<p>Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Masyarakat</p>	<p>Musyawarah publik informal</p> <p>Tata kelola Pemerintahan</p>	<p>Studi kasus dari dua desa urban di China</p>	<p>Artikel ini mengkaji tata kelola lokal dan partisipasi warga di China melalui musyawarah</p>

	<p>91, Halaman 137-157.</p> <p>https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670564.2014.918414</p>	<p>rak at Sipil di Tiongkok Konte m-porer.</p> <p>Giliran Diskur si f: pemerin tahan deliber at if di desa- desa urban China.</p>	<p>tahan lokal dan partisi p asi warga</p>	<p>publik yang tidak terstruktur. Studi kasus dari dua desa urban menunjukkan bahwa musyawarah publik informal yang tidak terstruktur berpotensi menghasilkan lebih banyak otonomi dan saluran yang beragam untuk mengejar seruan warga di tingkat lokal, bersama dengan peningkatan pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap permintaan akar rumput yang berkaitan dengan masalah tata kelola</p>
--	--	---	--	---

					<p>praktis. Meskipun berlangsung di luar lembaga politik formal, musyawarah publik yang tidak terstruktur dapat memberikan pengaruh pada kebijakan atau pengambilan keputusan di dalam organisasi pemerintah melalui mekanisme transmisi yang terkoordinasi dengan baik antara publik dan pemerintah daerah. Selama proses ini, organisasi dan aktor masyarakat yang memiliki sumber daya yang baik memainkan</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>peran penting melalui fungsi bridging mereka untuk menghasilkan hubungan yang dinamis dari pemerintahan deliberatif. Peran menjembatani ini berfungsi untuk memberikan hasil deliberatif dari ruang publik kepada otoritas pembuat keputusan, dan juga mencakup pengumpulan umpan balik tentang kebijakan serta sarana bernegosiasi untuk penyesuaian kebijakan dengan memfasilitasi proses implementasi</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>i kebijakan.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penekanan pada kemampuan bekerja sama mencapai visi bersama. Kemampuan mengarahkan pencapaian individual terhadap tujuan organisasi. Sekelompok orang dengan kemampuan, talenta, pengalaman dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai satu tujuan.</p>
--	--	--	--	--	---

Dari review beberapa penelitian terdahulu publikasi jurnal pada tabel 2.1. tersebut perbedaan pada penelitian ini adalah pada ruanglingkup strategi kerjasama Tim Musrenbang Desa dalam

proses rangkaian pilihan keputusan oleh Tim perencana yang terkait dalam perumusan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) dalam memutuskan perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahunan, Pelaksana Kegiatan, Waktu Kegiatan, Tempat dan Lokasi Kegiatan, Prosedur Kegiatan, dan Anggaran Kegiatan. Dengan Indikator Kerjasama Tim diukur dari : 1) Tujuan yang sama, 2) Antusiasme, 3) Peran dan tanggung jawab yang jelas, 4) Komunikasi yang efektif, 5) Resolusi konflik (kesepakatan dalam menyelesaikan konflik), 6) *Share power* (pembagian kekuasaan), dan 7) Keahlian yang dimiliki.

Kerangka Pikiran

Kerangka pemikiran penelitian sebagaimana pada gambar 2.4.



▼

KATEGORI PENILAIAN INDIKATOR
Kategori Ukuran Variabel dan Indikator Menggunakan Skala Likert yaitu: Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik

Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran Strategi Kerjasama Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2022

Konsep Operasional

Berdasarkan kajian kepustakaan maka konsep operasional variabel dan indikator dalam penelitian adalah :

1. Strategi Kerjasama Tim Musrenbang Desa adalah proses rangkaian pilihan keputusan oleh Tim perencana yang terkait dalam perumusan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk memutuskan perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahunan, Pelaksana Kegiatan, Waktu Kegiatan, Tempat dan Lokasi Kegiatan, Prosedur Kegiatan, dan Anggaran Kegiatan.
2. Kerjasama Tim Musrenbangdes adalah kemampuan bekerja sama mencapai visi bersama. Kemampuan mengarahkan pencapaian individual terhadap tujuan organisasi. Sekelompok orang dengan kemampuan, talenta, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Kumpulan individu yang saling bergantung pada tugas dan bersama-sama bertanggungjawab atas hasil yang diperoleh. Indikator Kerjasama Tim yaitu: (1) Tujuan yang sama, (2) Antusiasme, (3) Peran dan tanggung jawab yang jelas, (4) Komunikasi yang efektif, (5) Resolusi konflik (kesepakatan dalam menyelesaikan konflik), (6) *Share power* (pembagian kekuasaan), dan (7) Keahlian yang dimiliki.
3. Tujuan yang sama adalah setiap anggota Tim menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama, memiliki

pengetahuan yang cukup, adanya kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut.

4. Antusiasme adalah setiap anggota Tim Memiliki Inisiatif, Memiliki Integritas, Tidak Menyukai Drama/Sandiwara, dan Aktif Mengikuti Proses.
5. Peran dan tanggung jawab yang jelas adalah setiap anggota Tim berkomitmen melaksanakan tupoksi, berperilaku positif, kesungguhan, dan Menerima Resiko.
6. Komunikasi yang efektif adalah setiap anggota Tim mampu Membangun Suasana Hangat, Terlibat Aktif dengan Minat Orang, Dapat Dipercaya, Bicara dengan Bahasa Dimengerti, Gunakan Gerakan dengan Baik.
7. Resolusi konflik adalah setiap anggota Tim ada kesepakatan menyelesaikan konflik, tindakan mengurai suatu permasalahan, menggagas ide pemecahan masalah, penghapusan atau penghilangan permasalahan.
8. Share power (pembagian kekuasaan) adalah setiap anggota Tim mendapatkan Tupoksi dan Peranan yang jelas, pembagian kekuasaan sesuai minat/keahlian, dan menjadi bagian keseluruhan.
9. Keahlian yang dimiliki adalah setiap anggota Tim memiliki ilmu pengetahuan umum, pengalaman, dan keterampilan yang berkaitan dengan Tupoksi.

Operasionalisasi Variabel

Untuk mengetahui lebih rinci terkait operasionalisasi variabel dan indikator penelitian sebagaimana disajikan pada tabel 2.2.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Strategi Kerjasama Tim Perencanaan adalah proses rangkaian pilihan keputusan oleh Tim perencana yang terkait dalam perumusan dokumen Perencanaan Pembangunan (Sufian dan Indra Muchlis A., 2016). Sedangkan Kerjasama Tim Menurut Keith Davis dan John W. Newstrom (1977) adalah: 1) Tujuan yang sama, 2) Antusiasme, 3) Peran dan tanggung jawab	Kerjasama Tim Musrenbang Desa Pengembangan Program Ketahanan Pangan Dibiayai dari Dana Desa (DD)	1. Tujuan yang sama, 2. Antusiasme, 3. Kejelasan Peran dan Tanggung jawab 4. Komunikasi yang Efektif,	Setiap anggota Tim menyadari bahwa: a. Mereka memiliki kepentingan yang sama, b. Memiliki pengetahuan yang cukup, c. Adanya kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut Setiap anggota Tim : a. Memiliki Inisiatif, b. Berintegritas, c. Tidak Menyukai Drama/Sandiwara, d. Aktif Mengikuti Proses Musyawarah Setiap anggota Tim:

<p>yang jelas,</p> <p>4) Komunikasi yang efektif,</p> <p>5) Resolusi konflik (kesepakatan dalam menyelesaikan konflik),</p> <p>6) Share power (pembagian kekuasaan), dan</p> <p>7) Keahlian yang dimiliki.</p>			<p>a. Berkomitmen melaksanakan tupoksi,</p> <p>b. Berperilaku positif,</p> <p>c. Berkesungguhan,</p> <p>d. Mau Menerima Resiko</p> <p>Setiap anggota Tim</p> <p>a. Mampu Membangun Suasana Hangat,</p> <p>b. Terlibat Aktif dengan Minat Orang,</p> <p>c. Dapat Dipercaya,</p> <p>d. Bicara dengan Bahasa Dimengerti,</p> <p>e. Gunakan Gerakan dengan Baik.</p> <p>Setiap anggota Tim:</p> <p>a. Ada kesepakatan menyelesaikan konflik,</p> <p>b. Tindakan mengurai suatu permasalahan,</p> <p>c. Menggagas ide pemecahan masalah,</p> <p>d. Penghapusan</p>
--	--	--	---

			<p>atau penghilangan permasalahan</p> <p>Setiap anggota Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan Tupoksi dan Peranan yang jelas, b. Pembagian kekuasaan sesuai minat/keahlian c. Menjadi bahagian keseluruhan. <p>Setiap anggota Tim memiliki yang berkaitan dengan Tupoksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ilmu pengetahuan umum, b. Pengalaman, c. Keterampilan <p>Dokumen yang Memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahunan, b. Pelaksana Kegiatan, c. Waktu Kegiatan, d. Lokasi dan Tempat
--	--	--	---

			Kegiatan, e. Prosedur Kegiatan, f. Anggaran Kegiatan
--	--	--	--

Sumber: Olahan Data Penulis Tahun 2022

Teknik Pengukuran Variabel dan Indikator

Pada dasarnya variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi fokus penelitian untuk diamati. Pengukuran variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Skala Likert*. *Skala Likert* merupakan metode pengukuran terhadap peristiwa faktual dari variabel dan indikator variabel yang terdiri dari lima atau tiga kategori penilaian yaitu: Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik.

Ukuran Variabel Kerjasama Tim :

- a. Dinyatakan Baik, apabila rerata jumlah semua persentase indikator berada antara 67-100 %.
- b. Dinyatakan Cukup Baik, apabila rerata jumlah semua persentase indikator berada antara 34-66 %.
- c. Dinyatakan Kurang Baik, apabila rerata jumlah semua persentase indikator berada antara 1-33 %.

Ukuran Indikator-indikator Kerjasama Tim :

- a. Dinyatakan Baik, apabila rerata jumlah semua persentase Item Penilaian berada antara 67-100 %.
- b. Dinyatakan Cukup Baik, apabila rerata jumlah semua persentase Item Penilaian berada antara 34-66 %.
- c. Dinyatakan Kurang Baik, apabila rerata jumlah semua persentase Item Penilaian berada antara 1-33 %.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini sesuai dengan sifat dan jenisnya adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif saling melengkapi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan hasil wawancara, gambar peristiwa dan hasil pengamatan berupa catatan peristiwa dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi, informasi diperoleh dari informan dan dari peneliti itu sendiri. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan penyebaran angket atau kuesioner terhadap responden yang kemudian ditabulasi dalam bentuk tabel frekuensi yang sesuai dengan sifat dan jenis data kemudian diberi skor dan persentase.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Desa ini menjadi pilihan karena memiliki Lembaga Adat Melayu Riau yang masih cukup kuat diharapkan mampu memberi kontribusi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan ketahanan pangan, selain juga memiliki lahan terlantar dan marginal yang cukup luas yang cocok untuk tanaman pangan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian kelompok Responden adalah seluruh Tim yang melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi-Kasi Desa, Staf Kantor Desa, Kepala Dusun, Ketua dan Anggota BPD, Ketua dan Anggota LPM, Perwakilan Ibu PKK, Perwakilan Lembaga Adat, Perwakilan Karang Taruna,

Perwakilan Posyandu, Perwakilan Pamsimas, dan Perwakilan Pengurus BUMDes.

Kelompok Informan adalah Camat sebagai koordinator dan pembinaan wilayah, Anggota Masyarakat yang tidak ikut Musrenbang desa, Akademisi Pengamat Pembangunan Desa, dan Wartawan Media Massa atau Media Sosial.

Populasi dan Sampel Responden dan Informan Penelitian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Sumber Data
01.	Camat Siak Hulu atau yang Mewakili	1	1	Key Informan
02.	Kepala Desa (Pelidung dan Pembina Tim)	1	1	Responden
03.	Seretaris Desa (Ketua Tim)	1	1	Responden
04.	Kasi dan Staf Kantor Desa	5	5	Responden
05.	Ketua dan Anggota BPD	12	12	Responden
06.	Ketua dan Anggota LPM	5	5	Responden
07.	Perwakilan Ibu PKK	3	3	Responden
08.	Ketua dan Anggota Lembaga Adat	6	6	Responden
09.	Perwakilan Karang Taruna	3	3	Responden
10.	Perwakilan Posyandu Desa	3	3	Responden
11.	Perwakilan Pamsimas Desa	3	3	Responden
12.	Perwakilan BUMDes Desa	3	3	Responden

13.	Perwakilan Anggota Masyarakat yang Tidak Terlibat Dalam Musrenbangdes	3	3	Informan
14.	Perwakilan Akademisi (Pengamat)	2	2	Informan
15.	Perwakilan Wartawan dan Medsos	1	1	Informan
Jumlah		52	52	-

Sumber : *Data Olahan Peneliti, 2022*

Jumlah sampel Responden dan Informan Tabel 3.1. menggunakan teknik sampling Purposive (berdasarkan maksud dan tujuan penelitian) dan *Simple Random Sampling* (acak sederhana). Instrumen penelitian untuk Responden dan Informan akan dibedakan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Apakah menggunakan teknik observasi catatan dan foto peristiwa, wawancara, maupun penyebaran angket atau kuesioner. Data disajikan dan dianalisis dengan metode kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

Data Primer yaitu data yang diolah peneliti yang diperoleh langsung dari responden dan informan berkaitan tentang item penilaian indikator dan variabel penelitian kerjasama Tim musyawarah perencanaan pembangunan desa, terdiri dari data tentang :

- (1) Tujuan yang sama,
- (2) Antusiasme,
- (3) Peran dan tanggung jawab yang jelas,
- (4) Komunikasi yang efektif,
- (5) Resolusi konflik (kesepakatan dalam menyelesaikan konflik),
- (6) Share power (pembagian kekuasaan),
- (7) Keahlian yang dimiliki, dan
- (8) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Desa

Data Sekunder, adalah Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan buku, literatur-literatur, jurnal, koran, laporan dan publikasi resmi dari organisasi lokasi penelitian dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan dengan variabel, indikator dan item penilaian yang diteliti. Data sekunder ini berupa dasar pembentukan organisasi, berbagai peraturan perundang-undangan, visi, misi, struktur dan bagan organisasi, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, keadaan tempat bekerja, rencana kerja, program kerja, kegiatan tahunan dan hasil audit dari pengawas, dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman video/audio, dan pengambilan foto atau film.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti :

- 1) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat kejadian sebenarnya dengan melakukan catatan peristiwa tertulis melakukan perekaman video/audio, pengambilan foto atau film.
- 2) Dokumentasi yaitu data dasar pembentukan organisasi, berbagai peraturan perundang-undangan, visi, misi, struktur dan bagan organisasi, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, keadaan tempat bekerja, rencana kerja, program kerja, kegiatan tahunan dan hasil audit dari pengawas.
- 3) Wawancara yaitu mewawancarai informan dan responden dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara.
- 4) Kuesioner yaitu menyebarkan angket berupa daftar pertanyaan dengan jawaban tertutup dalam hal ini menggunakan skala likert, dan pertanyaan jawaban terbuka.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi. Data kuantitatif di klasifikasi sesuai dengan karakteristiknya kemudian disajikan pada tabel frekuensi sederhana dan dihitung persentasenya. Data kualitatif disajikan dalam bentuk hasil wawancara, catatan peristiwa sebagai hasil pengamatan, foto, video dan audio peristiwa. Analisis kualitatif dilakukan juga dengan *triangulasi* yaitu usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Data primer kuantitatif dan kualitatif tersebut dilengkapi pula dengan data sekunder untuk di *crosscheck* dan di *triangulasi*, kemudian dianalisis peristiwa faktual yang didukung data tersebut apakah ada persamaan atau perbedaan dengan teori dan hasil penelitian publikasi jurnal di studi pustaka untuk menentukan sikap ilmiah peneliti untuk menarik suatu kesimpulan.

Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian direncanakan sebagaimana tergambar pada tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke Tahun 2022																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	X	X																		
2	Seminar UP		X	X	X	X															
3	Riset			X	X	X	X														
4	Penelitian				X	X	X	X	X												
5	Pengolahan dan Analisis Data					X	X	X	X	X	X										
6	Bimbingan								X	X	X	X	X								
7	Ujian Tesis												X	X	X	X					
8	Revisi dan Pengesahan																	X	X		
9	Pengadaan dan Penyerahan Tesis																			X	X

Sumber : Data Olahan, 2022

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1989. *Development Management For Developing Countries*. Rusyanto L. Simatupang translation. Jakarta : LP3ES.
- Davis, Keith., and John W. Newstrom. 1977. *Human Behavior at Work Organizational Behavior* Publisher : McGraw-Hill Education; 5Rev Ed edition. ISBN-13 : 978-0070154902. <https://www.amazon.com/Human-Behaviour-Work-Keith-Davis/dp/0070154902>
- David, F.R. 2006. *Strategig Management Concepts and Casus*. Prancis Marion University.
- Ferlie, E., and E. Ongaro. 2015. *Strategic Management in Public Sector Organizations: Concepts, Schools, and Contemporary Issues*. New York: Routledge.
- Friedmann, J. 1981. *The Active Community in Rural Development : National Policies and Experiences*. Nagoya : Maruzen Asia.
- George, B., and S. Desmidt. 2014. "A State of Research on Strategic Management in the Public Sector." In *Strategic Management in Public Organizations: European Practices and Perspectives*, edited by P. Joyce and A. Drumaux, 151-172. New York: Routledge.
- Hamim, Sufian, (2005). *Strategic Planning System in Development*. National Library. Jakarta.
- Hicks, Herbert and G. Ray Gullet. 1987. *Organization Theory and Behavior*. Translation of G. Kartasapoetra. Jakarta: Literacy Development.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Weelen. 1996. *Strategic Management*. California : Addison Wesley Publishing Company.

- Mintzberg, H. 2007. *Tracking Strategies: Toward a General Theory*. New York: Oxford University Press.
- Mintzberg, H., B. Ahlstrand, and Lampel. 2009. *Strategy Safari*. 2nd ed. Philadelphia, PA: Trans- Atlantic Publications.
- Moynihan, D. P., S. K. Pandey, and B. E. Wright. 2013. "Transformational Leadership in the Public Sector: Empirical Evidence of Its Effects." In *Public Administration Reformation: Market Demand from Public Organizations*, edited by Y. K. Kwivedi, M. A. Shareef, S. K. Pandey, and V. Kumar, 87–104. New York: Routledge.
- Muchlis, Indra A. dan Sufian Hamim. 2016. *Manajemen Strategis Dalam Organisasi*. Trusmedia Grafika, Yogyakarta, pp.18. http://repository.unisi.ac.id/81/1/Binder_03-dikompresi.pdf
- Osborne, David dan Peter Plastrik . 1996. *Banishing Bureaucracy, the Five Strategies for Reinventing Government*. New York : Addison-Wesley Publishing Ciompany.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. New York : A Plume Book.
- Rangkuti, F. 2013. *SWOT Analysis Techniques to Dissect Business Cases*. Yogyakarta Book Exchange. Indonesia.
- Rondinelli, Dennis A. Rogers, & Everet M.(1990a). *Development Projects as Integrated Management*. Simamora Healthy Translation. Jakarta: Literacy Development.
- Schumacker, Rendall E dan Richard G Lomax. 1996. *A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling*. Mahwah, New Jersey : LEA.
- Steiner, G. A. 1979. *Strategic Planning : What Every Manager Must Know*. New York : Free Press.

Nurman. 2015. [Strategi Pembangunan Daerah](#). Kota Depok: Rajawali Pers, ISBN.978979698614.

Nurman dan Andriyus. 2014. *Demografi dan Ketenagakerjaan*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing. ISBN 9786027175808.

Terry, G.R. 1975. *Principles of Management*. Georgetown, Ontario : Irwin-Dorsey Limited.

Weiner dan Myron, 1984. *Modernization of Growth Dynamics*. Translation. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Winardi dan Karhi Nisjar. 1997. *Strategic Management*. Bandung: Forward Mandar.

Jurnal :

Ariadi, Andi 2019. Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019,
[file:///C:/Users/acer/Downloads/54-Article%20Text-74-1-10-20190613%20\(2\)](file:///C:/Users/acer/Downloads/54-Article%20Text-74-1-10-20190613%20(2))

Badri, Muhammad. 2016. Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi *Jurnal RISALAH*, Vol. 27, No. 2, Desember 2016: 62-73 62 DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v27i2.2514>

Beibei Tang. 2014. Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Masyarakat Sipil di Tiongkok Kontemporer: Pemerintahan Deliberatif di Desa-desa Urban China. *Journal of Contemporary China*. Volume 24, 2015 - [Issue 91](#), Halaman 137-157. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670564.2014.918414>

Bryson, John M. Lauren Hamilton Edwards & David M. Van Slyke (2018) Getting strategic about strategic planning research,

Public Management Review, 20:3, 317-339, DOI: 10.1080/14719037.2017.1285111.

Bryson, J. M., B. C. Crosby, and J. K. Bryson. 2009. "Understanding Strategic Planning and the Formulation and Implementation of Strategic Plans as a Way of Knowing: The Contributions of Actor-Network Theory." *International Public Management Journal* 12 (2): 172-207. doi:[10.1080/10967490902873473](https://doi.org/10.1080/10967490902873473).

Blair, R. 2004. "Public Participation and Community Development: The Role of Strategic Planning." *Public Administration Quarterly* 28 (1/2): 102-147.

Boyne, G. A., and J. S. Gould-Williams. 2003. "Planning and Performance in Public Organizations." *Public Management Review* 5 (1): 115-132. doi:[10.1080/146166702200002889](https://doi.org/10.1080/146166702200002889).

Boyne, G. A., and J. S. Gould-Williams. 2003. "Planning and Performance in Public Organizations." *Public Management Review* 5 (1): 115-132. doi:[10.1080/146166702200002889](https://doi.org/10.1080/146166702200002889)

[Carmen, Sirianni](#), 2010. Neighborhood Planning as Collaborative Democratic Design *The Case of Seattle*. *Journal of the American Planning Association (JAPA)*. Volume 73 - [Issue 4](#) Pages 373-387 Published online: 22 Jun 2010. <https://doi.org/10.1080/01944360708978519>

Conroy, M. M., and P. R. Berke. 2004. "What Makes a Good Sustainable Development Plan? an Analysis of Factors that Influence Principles of Sustainable Development." *Environment and Planning A* 36 (8): 1381-1396. doi:[10.1068/a367](https://doi.org/10.1068/a367).

Donald, C. G., T. S. Lyons, and R. C. Tribbey. 2001. "A Partnership for Strategic Planning and Management in A Public Organization." *Public Performance and Management Review* 25 (2): 176-193. doi:[10.1080/15309576.2001.11643653](https://doi.org/10.1080/15309576.2001.11643653).

- Effendi, Sofian, T. Keban Yeremias, Ichlasul Amal, Warsito Utomo, & Hadriyanus Suharyanto. (1989). *Alternative Administrative Planning Policy A Retrospective and Prospective Analysis*. Journal of Monograph Series, Faculty of Social and Political Sciences UGM. Yogyakarta.
- Elbanna, S., R. Andrews, and R. Pollanen. 2016. "Strategic Planning and Implementation Success in Public Service Organizations." *Public Management Review* 18 (7): 1017-1042. doi:[10.1080/14719037.2015.1051576](https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051576).
- Eilola, [Salla](#), [Niina Käyhkö](#), [Andrew Ferdinands](#). 2019. A bird's eye view of my village - Developing participatory geospatial methodology for local level land use planning in the Southern Highlands of Tanzania. *Journal Landscape and Urban Planning*. Volume 190. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103596>
- Eka, dkk. Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes Tahun 2021) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*. ISSN 2503-4456. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/joels/article/view/7562/3173>
- Eko, Fajar, Anton dan Keziah Cahya Virdayanti, 2018. Isu Terpilih dalam Perencanaan Strategis Sektor Publik di Indonesia, *Jurnal Kertas Kerja Bappenas (BWP)*. Vol 1 No 1 (2018): Edisi April 2018, DOI: <https://doi.org/10.47266/bwp.v1i1>
- Hamim, Sufian, Syafril Abdullah and Lolita Vianda. Crops Agricultural Development Strategy on Peatlands in Pulau Palas Village Indragiri Hilir Regency Riau-Indonesia. Researchgate.net, Februari 2022. <https://www.researchgate.net/publication/358537445>

- Hamim, S., Indrastuti, S. 2019. Open System of Strategic Planning for the Development of Rural Autonomy in Riau - Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. 10 (4): 27-40. <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213145366>
- Hamim, Sufian, (2019). Feasibility Study of Expansion South Riau-Indonesia District Pelalawan Regency. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10 (4) 41-57. <https://DOI.org/10.1108/17508611011088797>.
- Hamim, S., Vianda, L. 2019. Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Industrialisasi Pengolahan Menjadi Pakan Ternak dan Ikan. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5 (2): 206-216. DOI : [https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(2\).4291](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4291)
- Hendrick, R. 2003. "Strategic Planning Environment, Process, and Performance in Public Agencies: A Comparative Study of Departments in Milwaukee." *Journal of Public Administration Research and Theory* 13 (4): 491-519. doi:[10.1093/jopart/mug031](https://doi.org/10.1093/jopart/mug031).
- Hiziroglu M. 2021. Perubahan persepsi lingkungan dalam rencana strategis: kasus lokal di Turkey. *JURNAL INTERNASIONAL MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK*, Vol. 34 No. 5, pp. 546-567. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-04-2020-0109>
- John M. Bryson, Lauren Hamilton Edwards & David M. Van Slyke. 2018. *Getting Strategic About Strategic Planning Research*, *Public Management Review*, 20(3): 317-339. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2017.1285111>
- John M. Bryson , Barbara C. Crosby & John K. Bryson. 2009.

Memahami Perencanaan, Perumusan dan Implementasi Rencana Strategis sebagai Cara Mengetahui: Kontribusi Teori Jaringan Aktor, *Manajemen Publik Internasional Jurnal*, 12:2, 172-207, DOI: 10.1080/10967490902873473..https://www-tandfonline.com.translate.googleusercontent.com/translate/proxy?url=https://doi.org/10.1080/10967490902873473?cookieSet=1&x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id

Setiawan, Agustina, Utang Suwaryo, Mudiwati Rahmatunnisa. 2020. *Jurnal Academia Praja*. Vol 3 No 02 (2020): DOI: <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.197>.

Suri, D.M., 2021. Deep Learning Methods as a Detection Tools for Forest Fire Decision Making Process Fire Prevention in Indonesia. *Journal Communications in Computer and Information Science*. <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6001078>

Tarmizi, A. 2021. A qualitative study of transformational leadership and organization success. *Journal Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6712818>

Tarmizi, A. 2021. [A study of corporate social responsibility policy implemented by private companies and its impact to surrounding community: A case study of Indonesian port company](https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6712818). *Journal Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6712818>

Lutfi Rumkel, Belinda Sam, M Chairul Basrun Umanailo. 2019. Village Head Partnership, Village Consultative Body and Customary Institution in Village Development. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*. VOLUME 8, ISSUE 08,

https://www.ijsr.net/?gclid=CjwKCAjwquWVBhBrEiwAt1Kmwjg5nL3mUw9yiOJMWwPVhfP_5aTBRc4RNECNGFjcAl-HDYfAlqNu9BoCP30QAvD_BwE

- Margareta, Linda Heloise Hoglund, et. All. 2018. Strategic Management in the Public Sector-How Tools Enable and Constrain Strategy-Making: The Swedish Transport Administration. *International Public Management Journal*. 21 (5) DOI:10.1080/10967494.2018.1427161.
- Mariano Werenfridus, Zainul Rahman* & Krishno Hadi. Implementation Analysis of the Village Council Function in Donowarih Village Administration, Malang Regency. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 11 (2) Desember 2021 ISSN 2088-527X (Print) ISSN 2548-7787 (Online) DOI: [10.31289/jap.v11i2.5486](https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5486)
- Meier, K. J., L. J. O'Toole Jr., G. A. Boyne, and R. M. Walker. 2007. "Strategic Management and the Performance of Public Organizations: Testing Venerable Ideas against Recent Theories." *Journal of Public Administration Research and Theory* 17 (1): 357-377. doi:[10.1093/jopart/mul017](https://doi.org/10.1093/jopart/mul017).
- Mintzberg, H. 1994. "The Fall and Rise of Strategic Planning." *Harvard Business Review* 72 (1): 107-114.
- Mintzberg, H., dan Waters, J.A. 2001. Of Strategies, Deliberate and Emergent. *Journal Strategic Management*. 6 (3), 257-272.
- Nurman, Sufian Hamim dan Yusriadi. 2022. Development of Pluralism Education in Indonesia: A Qualitative Study. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*. 2022, Vol.9, No. 3, 106-120. <http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/1207>

- Nurman dan Rahyunir Rauf, 2018 Document details - Strategic development towards a self-sufficiency village in Indonesia. *Journal Espacios*. 39 (42), 2018, 16p.
- Nurman dan Rahyunir Rauf. 2016. [Trend analysis of operation: Local governance perspectives in Indonesia.](#) *Information (Japan)*.
- Percoco, M. 2016. "Strategic Planning and Institutional Collective Action in Italian Cities." *Public Management Review* 18 (1): 139-158. doi:[10.1080/14719037.2014.969758](https://doi.org/10.1080/14719037.2014.969758).
- Ugboro, I. O., K. Obeng, and O. Spann. 2010. "Strategic Planning as an Effective Tool of Strategic Management in Public Sector Organizations: Evidence from Public Transit Organizations." *Administration and Society* 43 (1): 87-123. doi:[10.1177/0095399710386315](https://doi.org/10.1177/0095399710386315).
- Wijaya, Oki. 2017. Strategi Pengembangan Komoditas Pangan Unggulan dalam Menunjang Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Kasus di Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah). *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*. VOL 3 NO 1. DOI: <https://doi.org/10.18196/agr.3144>
- Zarkasi, A., dan Dimasrizal, D. 2019. Pola Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa, Pola Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa. *Unri Conference Series: Community Engagement*, Volume 1, 652-657. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.652-657>
- Zubaidah, Evi. 2021. [Taxpayer Behavior in Using E-Vehicle in Indonesia.](#) *Asia Pacific Journal of Information Systems*.
- Zubaidah. Evi dan Ema Fitri Lubis. 2020. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan, [VOL 9 NO 2 : SOCIETAS : JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN SOSIAL](#).DOI: <https://doi.org/10.35724/sjias.v9i2.2801>

Peraturan dan Publikasi Lainnya:

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan Nasional.

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4650>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3932/ini-tiga-prioritas-penggunaan-dana-desa-2022>

Permendagri No. 66 Th. 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Permendagri_No._66_.Th._2007_Ttg_.Perencanaan_Pembangunan_Des_.pdf

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Tentang Musyawarah di Desa.

<https://www.simpeldesa.com/blog/musyawah-desa-berdasarkan-permendagri-nomor-114/1474/>

Simpeldesa. 2022.

<https://www.simpeldesa.com/blog/musyawaran-perencanaan-pembangunan-desa-atau-musrenbang-desa/1384/>

Kecamatan Siak Hulu Dalam Angka. 2021.

<https://kamparkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/2be4a4e5eaec2aaa18f431a c/kecamatan-siak-hulu-dalam-angka-2021.html>

LAMPIRAN 2.



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Pusat 10270 <http://simlitabmas.kemdikbud.go.id/>

PROTEKSI ISI PROPOSAL

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi penelitian

PROPOSAL PENELITIAN 2022

ID Proposal: e0ca9e77-308d-4c58-90c3-1b302d12e8fe Rencana Pelaksanaan Penelitian: tahun 2022 s.d. tahun 2023

1. JUDUL PENELITIAN

PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN RUMBAL BARAT KOTA PEKANBARU
--

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Tatakelola dan pemerintahan	Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisa si/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembang an)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembang an)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Kompetitif Nasional	Penelitian Tesis Magister	SBK Riset Dasar	SBK Riset Dasar	3	1

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H- Index
SUFIAN Ketua Pengusul	Universitas Islam Riau	Ilmu Adminstras i	Ketua Peneliti dan Pembimbing Utama	6052092	0
SARDEF SAPUTRA Mahasiswa Bimbingan 1	Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	-	Persiapan, Pengumpulan Data, Analisis Data dan Pelaporan	0	0
DETRI KARYA S.E., M.A Dosen Pembimbi ng Anggota 1	Universitas Islam Riau	Manajemen	Anggota Peneliti dan Anggota Pembimbing	5995321	2

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
-------	------------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
1	Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Bereputasi	Accepted	International Journal of Public Sector Performance Management https://www.emerald.com/insight/publication/isn/0951-3558

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
1	Book Chapter	Terbit ber ISBN	MARPOYAN 7 (IKAPI)

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 13 Revisi.

Total RAB 1 Tahun Rp. 29,950,000

Tahun 1 Total Rp. 29,950,000

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Bahan	ATK	Kertas, Tinta Toner, Map	Paket	1	1,000,000	1,000,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Persiapan	Paket	1	1,000,000	1,000,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	Honor	OH	1	250,000	250,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/ Administrasi Peneliti	Honor	OB	1	400,000	400,000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	Honor	OH (3 hari)	30	150,000	4,500,000
Pengumpulan Data	Transport	Ongkos	OH (3 hari)	30	50,000	1,500,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Tim Peneliti	OH (3 hari)	9	100,000	900,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di dalam kantor	Honor	OH (Hari)	9	100,000	900,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	Makan dan Minum	OH (3 hari)	9	100,000	900,000
Analisis Data	HR Sekretariat/ Administrasi Peneliti	Honor	OH	1	400,000	400,000
Analisis Data	HR Pengolah Data	Biaya Pengolah Data	Paket	1	1,500,000	1,500,000
Analisis Data	Honorarium narasumber	Honor Nara Sumber	OH	2	1,000,000	2,000,000
Analisis Data	Transport Lokal	Biaya Transport	OH (3 hari)	9	100,000	900,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	Makan dan Minum	Paket	1	200,000	200,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Sekretariat/ Administrasi Peneliti	Honor	OH	1	400,000	400,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di dalam kantor	Tim Peneliti	OH (3 hari)	9	100,000	900,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	Makan Minum	OH (3 Hari)	9	100,000	900,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Biaya Publikasi	Paket	1	8,000,000	8,000,000

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Luaran KI (paten, hak cipta dll)	Biaya Pendaftaran	Paket	1	400,000	400,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya penyusunan buku termasuk book chapter	Cetakan dan Penerbitan	Paket	1	3,000,000	3,000,000



Isian Substansi Proposal

PENELITIAN TESIS MAGISTER (PTM)

Petunjuk : Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template ataupun menghapus di setiap bagian

Tuliskan judul usulan penelitian

JUDUL USULAN

PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN RUMBAL BARAT KOTA PEKANBARU

RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisilatarbelakang penelitian, tujuan dan tahapanmetode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

Sebagai Masalah dan Tujuan Penelitian yaitu menganalisis dan menjelaskan bagaimana pelayanan publik yang memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat sebagai wujud capaian tertib administrasi pertanahan di Kecamatan Rumbal Barat Kota Pekanbaru. Penelitian ini akan menggunakan metode survey dan penelitian partisipatif kolaboratif dengan kelompok sasaran. Dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian di Wilayah kerja Kecamatan Rumbal Barat Kota Pekanbaru. Kecamatan ini menjadi

pilihan karena tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang memnpunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standard pelayanan minimal *Public service*

and public complaint. Penelitian akan dilakukan selama 1 tahun yaitu tahun 2022. Tingkatan pelayanan akan diukur dari: (1) peran dan tanggung jawab yang jelas, (2) komunikasi yang efektif, (3) resolusi konflik, (4) pembagian kekuasaan, dan (5) keahlian yang dimiliki.

Populasi dalam penelitian ini adalah Camat Rumbai barat, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Terpadu, 5 Staf Seksi Pemerintahan, 5 Staf Saksi Pelayanan Terpadu, 30 Masyarakat yang Mengurus Surat Tanah, 5 Lurah, 5 RW, 5 RT, dan 10 Tokoh Masyarakat, total 68 sampel sebagai responden dan informan.

Data yang akan dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan daftar wawancara dan kuesioner, observasi langsung dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan foto peristiwa, antara lain: struktur dan bagan organisasi Pemerintahan Kecamatan, struktur dan bagan organisasi Geografi dan Demografi Kecamatan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Data dikumpulkan dan kemudian ditabulasi untuk dianalisis. Alat analisis yang digunakan analisis kuantitatif penyajian tabel frekuensi, jumlah, rata-rata, persentase, analisis statistik sederhana, dan analisis deskriptif kualitatif Nvivo.

Tahapan penelitian antara lain persiapan, survei pengumpulan data, mengolah data, menganalisis, merumuskan laporan dan publikasi luaran. Luaran wajib yaitu laporan akhir dan dokumen tesis dan publikasi jurnal internasional. Luaran tambahan yaitu book chapter (ber ISBN) dan pendaftaran KI.

Uraian TKT : Prinsip dasar riset telah diobservasi dan dilaporkan (TKT 1), Dukungan data Awal, Hipotesis, Desain dan Prosedur Litbang telah dieksplorasi (TKT 2), namun Rancangan dan Metodologi Penelitian belum tersusun lengkap (TKT 3) |

kata kunci maksimal 5 kata

KATA KUNCI

Pelayanan Publik; Kepuasan masyarakat; Tertib Administrasi Pertanahan |

Latarbelakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisilatarbelakang dan permasalahan yang akanditeliti, tujuankhususdan studikelayakannya. Pada bagian ini perludijelaskanuraiantentangspesifikasiketerkaitanskemadengan bidangfokusataurenstra penelitian PT.

LATAR BELAKANG

Dalam penertiban administrasi pertanahan Pemerintahan Kecamatan di Indonesia selalu melakukan pengecekan lapangan yang dilengkapi dengan GPS (titik Koordinat) sebagai acuan untuk membuat peta bidang persil tanah sehingga tanah yang ditinjau dapat diukur secara akurat dan meminimalisir terjadinya tumpang tindih tanah di masa yang akan datang. Semua tanah yang terpetakan teregister dalam buku register pertanahan. Dalam peninjauan lokasi selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Tugas, Fungsi dan wewenang Camat dan Lurah, jika dikaitkan dengan pelayanan tertib administrasi pertanahan diberi kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan bertujuan untuk membantu kelancaran dalam tugas-tugas administrasi pertanahan yaitu membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum yang meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbrens*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan daerah kerja di dalam wilayah kerja jabatannya.

Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Camat yang mana peran utama dalam penerbitannya adalah Ketua RT/RW,serta Lurah melihat kondisi dimana Ketua RT/RW dan Lurah memahami lebih spesifik akan wilayah kerjanya yang

cakupan wilayahnya lebih kecil. Prosedur dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah, SKGR, SKT, SHM maupun Surat Keterangan wilayah telah diterbitkan dan diumumkan kepada masyarakat di papan pengumuman kantor Camat.

Dalam pengurusan administrasi tanah sebenarnya tidak ada biaya yang dikeluarkan, adanya indikasi penyelesaian pengurusan administrasi tanah lebih dari 14 hari kerja, karena belum adanya SOP. Sesuai standar operasional prosedur (SOP), proses pengurusan tanah hingga penerbitan sertifikat tanah memerlukan waktu selama 90 hari atau tiga bulan.

Namun, fakta di lapangan pengurusan sertifikat membutuhkan waktu selama berbulan-bulan hingga tahunan. Berkaitan dengan hal di atas, makin lama makin terasa perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Kecamatan Rumbai Barat issue permasalahan yang timbul mengenai persengketaan tanah terutama antara masyarakat dengan pemodal besar yang memiliki Pabrik, bahkan perkebunan. Selain itu dikarenakan pengembangan wilayah Kecamatan Rumbai membuat harga tanah dikawasan Kecamatan tersebut menjadi naik. Isu lainnya yakni sebagian besar diakibatkan administrasi surat tanah yang dikeluarkan oleh Camat yakni Surat Keterangan Tanah masih ada tumpang tindih Kepemilikan. Pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat belum dilaksanakan. Penyerobotan hak tanah, dimana tanah yang dikuasai oleh seseorang tanpa adanya administrasi pengesahan atau tanpa adanya surat bukti pengesahan kepemilikan diambil alih oleh orang lain dengan membuat surat dasar baru kepemilikan; Pemalsuan persyaratan penerbitan surat tanah, dimana oknum makelar tanah melakukan berbagai cara

seperti pemalsuan tanda tangan atau identitas untuk dapat meyakinkan pihak pemerintah agar dapat menerbitkan surat keterangan ganti rugi tanah;

Tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standard pelayanan minimal *Public service and public complaint*.

Pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Rumbai Bara Kota Pekanbaru fokus penelitian pada prosedur pelayanan, waktu penyelesaian dalam pengurusan administrasi, biaya pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi petugas pemberi pelayanan dalam pelayanan administrasi belum maksimal.

Sebagai Masalah dan Tujuan Penelitian yaitu menganalisis dan menjelaskan bagaimana pelayanan publik yang memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat sebagai wujud capaian tertib administrasi pertanahan di Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.

Spesifikasi keterkaitan skema dengan bidang focus atau renstra penelitian PT yaitu terkait dengan pembangunan dan penguatan sosial budaya di provinsi Riau, khususnya agraria reform di Provinsi Riau.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti/teknologi yang dikembangkan. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini.

TINJAUAN PUSTAKA

State of the Art

Penelitian sebelumnya berfungsi untuk analisis dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini disertakan jurnal internasional, nasional, dan buku hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan konsep dan teori pelayanan publik yang memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat

sebagai wujud capaian tertib administrasi pertanahan. Jurnal dan buku tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. State of the Art Penelitian

Nama/ Judul Penelitian	Pengarang	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
<p>Buku Manajemen Strategis Dalam Organisasi</p> <p><i>Administration Industrielle et Generale</i></p> <p>[1]</p>	<p>Penulis : Hendy Fayol (dalam, Muclis, Indra A. dan Sufian Hamim. 2013)</p>	<p>Fayol membedakan antarapinsip dan unsur manajemen. Prinsip-prinsip umum dan unsur-unsur manajemen terdiri dari:</p> <p>(1) pembagian kerja; (2) otoritas dan tanggung jawab, (3) disiplin (4) kesatuan komando, (5) kesatuan pengarahan, (6) mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan perorangan, (7) Upah/gaji, (8) sentralisasi, (9) rantaiscalar, (10) tata tertib, (11) keadilan, (12) stabilitas masa jabatan, (13) inisiatif, (14) semangat korps. Sedangkan unsur-unsur</p>	<p>Sebagai salah satu Konsep dan Teoridasar Organisasi Publik</p>

		<p>manajemensebagai fungsi manajemen terdiri dari: merencanakan, mengorganisasi, memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan.</p>	
<p>Buku Manajemen Strategis Dalam Organisasi</p> <p><i>The Principles of Scientific Managemen</i></p> <p>[2]</p>	<p>Peneliti : Frederick Winslow Taylor (dalam, Muclis, Indra A. dan Sufian Hamim.20</p>	<p>Prinsip-prinsip dasar yang menurut Taylor mendasari pendekatan ilmiah terhadap manajemen, adalah sebagai berikut: (1) Menggantikan cara yang asal-asalan dengan ilmu; (2)Mengusahakan keharmonisan dalam gerakan kelompok, dan bukannya perpecahan; (3)Mencapai kerjasama manusia, dan bukannya individualisme yang kacau; (4) Bekerja untuk output yang maksimum, dan bukannya output yang terbatas; (5)Mengembangkan semua pekerja</p>	<p>Sebagai salahsatu Konsep dan Teoridasar Organisasi Publik</p>

		sampai taraf yang setinggi-tingginya untuk kesejahteraan maksimum mereka sendiri dan perusahaan mereka.	
<p>Sufian Hamim, 2020</p> <p><i>Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.</i></p> <p>[3]</p>	<p>PUBLIKA :</p> <p>Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6, No.1/ 2020</p>	<p>Bahwa Secara keseluruhan pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru berada pada kategori cukup terlaksana.</p> <p>Dari sepuluh indikator variabel Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan, hanya satu indikator prinsip keamanan pelayanan publik yang sudah terlaksana dengan baik yaitu dalam proses pengurusan terasa aman, hanya saja kurang nyaman karena ruang pelayanan dan ruang tunggu terasa sempit dan suara berisik.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian Sufian sama-sama membahas pelayanan administrasi, hanya saja perbedaannya pada penelitian selanjutnya focus pada administrasi pertanahan di kantor Camat.</p>

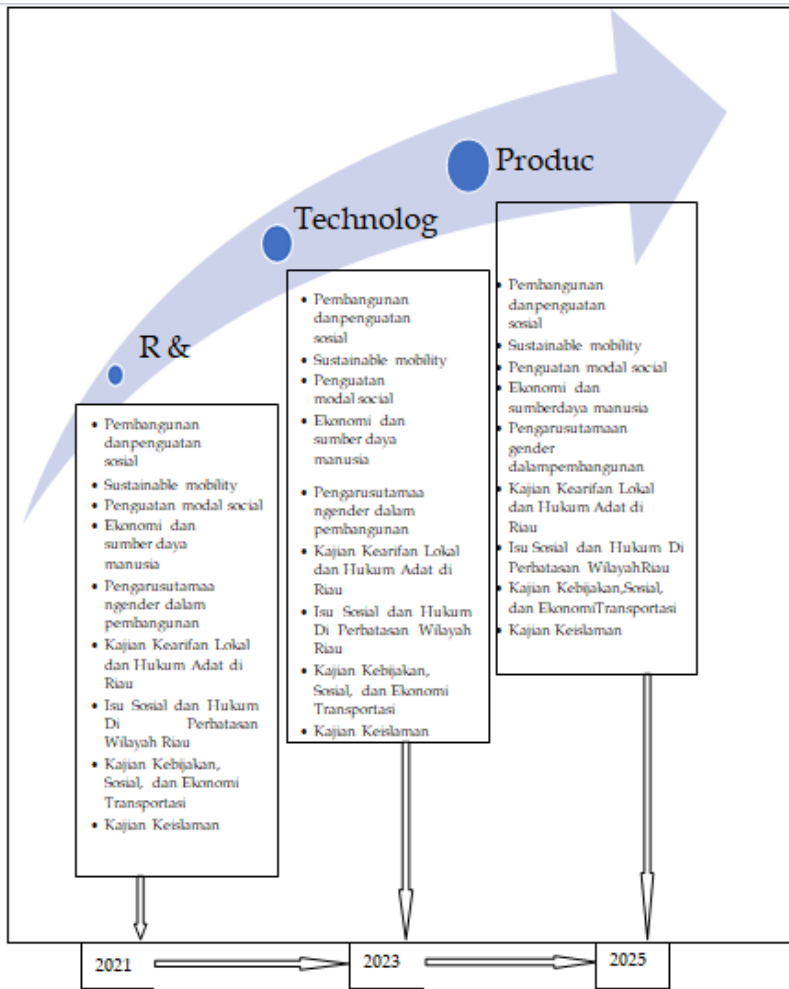
<p>Sufian Hamim, 2019</p> <p><i>Manajemen Publik Pemerintahan Di 10 Desa Sampel di Provinsi Riau</i></p> <p>[4]</p>	<p>IJICC, 2019</p>	<p>Efektivitas suatu implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh pengorganisasian sumber- sumber daya pembangunan, pergerakan sumber-sumber daya pembangunan, evaluasi dan pengawasan program pembangunan perdesaan dalam rangka menemukan strategi yang muncul kemudian sebagai strategidarurat untuk penyesuaian.</p>	<p>Persamaan pada jurnal Sufian ini adalah dalam teori manajemen publicyang digunakan Pada peneltian selanjutnya.</p>
<p>Hamriani Akmar, 2016</p> <p><i>Pelayanan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional KabupatenWajo</i></p> <p>[5]</p>	<p>Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar</p>	<p>Bahwa pelayanan tertib administrasi pertanahan merupakan bukti ilmiah akan pentingnya pelayanan tertib administrasi pertanahan, agar kedepannya lebih ditingkatkan dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat atau pengguna pelayanan publik</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian Hamriani Akmarsama-sama membahas pelayanan administrasi pertanahan, hanyasaja lokasi penelitiannya di Kantor Pertanahan Kabupaten</p>

			Wajo dalam melayani masyarakat.
AnifahPutri Cahyanti, 2017 <i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Studi di Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2016-2017</i> [6]	<i>e-Jurna Fakultas Sosial Politik Universitas Diponegoro Semarang</i>	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, penilaian kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman di Dinas Kesehatan Kota Salatiga belum dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh OPD ini hal ini dapat diketahui dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan, pelayanan yang diselenggarakan tahun 2017 masih buruk, karena penyelenggara pelayanan ini tidak mengamankan Undang Undang No.25 Tahun 2009 dan belum memahami indikator apa saja yang termasuk ke dalam standar pelayanan publik.	Dalam teori dan Indikator penelitian kepatuhan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, sedangkan dalam penelitian selanjutnya indikator kepatuhan penilaian standar pelayanan public dikaitkan dengan teoristrategi.

<p>I Komang Gede Bendesa, 2016 <i>Analisis Kualitas Pelayanan Publik DiBadan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung</i></p> <p>[7]</p>	<p><i>E-Jurnal Ekonomi danBisnis Universitas Udayana 5.1 (2016) : 89-114</i></p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa: kelima faktor yaitu faktor bukti fisik, daya tanggap, keandalan, jaminan, dan empati. Variabel tanggung jawab petugas adalah variabel yang paling mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam pengurusan ijin usaha di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung karena memiliki nilai koefisien tertinggi.</p>	<p>Dalam metode penelitian yang Digunakan dan indikator kualitas pelayanan, pada penelitian selanjutnya menggunakan metode kualitatif.</p>
<p>Muhammad Fadly Vinanda, 2017 <i>Studi Tentang Pelaksanaan Kepatuhan Dalam Standar Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan BantuasKota Samarinda</i></p>		<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kepatuhan dalam standar pelayanan publik di Kantor Kelurahan Bantuas Kota Samarinda yang merupakan Standar pelayanan publik sebagai tolok ukur dalam berlangsungnya penyelenggaraan pelayanan, namun masih saja</p>	<p>Fokus penelitian yaituPersyaratan pelayanan, Prosedur pelayanan, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/tarif pelayanan, ProdukPelayanan, Dan Penanganan Pengelolaan</p>

[8]		<p>ditemukan pihak-pihak oknum yang masih menyimpang dari aturan tersebut seperti persyaratan pelayanan yang tidak terpenuhi dalam pemenuhannya dan kedisiplinan pegawai yang melebihi pada jangka waktu pelayanan yang seharusnya pada saat jam kerja</p>	<p>Pengaduan pelayanan, sedangkan pada Penelitian selanjutnya akan dibahas tentang indicator pelayanan public berdasarkan teori strategi pelayanan.</p>
-----	--	--	---

Roadmap Bidang Fokus Sosial dan Humaniora LPPM UIR



Gambar 1. Roadmap Bidang Fokus Sosial dan Humaniora LPPM UIR

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Bagian penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, semesta tahapan untuk mencapai luaran beserta indikator pencapaian yang ditargetkan. Pada bagian ini harus juga dijelaskan tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

METODA

Metode atau cara Mencapai Tujuan

Penelitian ini akan menggunakan metode survey dan penelitian partisipatif kolaboratif dengan kelompok sasaran. Dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian di Wilayah kerja Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru. Kecamatan ini menjadi pilihan karena tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standard pelayanan minimal *Public service and public complaint*. Penelitian akan dilakukan selama 1 tahun yaitu tahun 2022. Tingkatan pelayanan akan diukur dari: (1) peran dan tanggung jawab yang jelas, (2) komunikasi yang efektif, (3) resolusi konflik, (4) pembagian kekuasaan, dan (5) keahlian yang dimiliki.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Camat Rumbai barat, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Terpadu, 5 Staf Seksi Pemerintahan, 5 Staf Saksi Pelayanan Terpadu, 30 Masyarakat yang Mengurus Surat Tanah, 5 Lurah, 5 RW, 5 RT, dan 10 Tokoh Masyarakat, total 68 sampel sebagai responden dan informan.

Teknik Pengumpulan Data

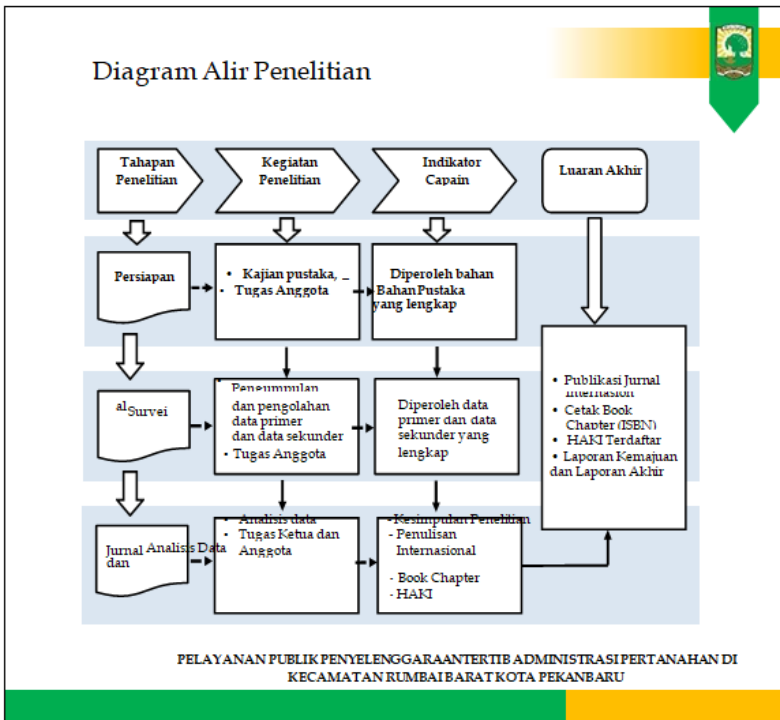
Data yang akan dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan daftar wawancara dan kuesioner, observasi

langsung dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan foto peristiwa, antara lain: struktur dan bagan organisasi Pemerintahan Kecamatan, struktur dan bagan organisasi Geografi dan Demografi Kecamatan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis Data

Data dikumpulkan dan kemudian ditabulasi untuk dianalisis. Alat analisis yang digunakan analisis kuantitatif penyajian tabel frekuensi, jumlah, rata-rata, poersentase, analisis statistik sederhana, dan analisis deskriptif kualitatif Nvivo.

Diagram alir penelitian yang akan dikerjakan sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL PENELITIAN

Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Mengumpul Data												
3	Mengolah Data												
4	Menganalisis Data												
5	Merumuskan Laporan												
6	Publikasi												
	Luaran												

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hamim, S., Indrastuti, S. 2019. *Open System of Strategic Planning for the Development of Rural Autonomy in Riau - Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change.* 10 (4): 27-40.
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213145366>
- [2] Muclis, Indra A. dan Sufian Hamim. 2013. *Manajemen Strategis Dalam Organisasi.* Trusmedia Grafika, Yogyakarta, pp.18.
http://repository.unisi.ac.id/81/1/Binder_03-dikompresi.pdf

- [3] Hamim, Sufian, dkk. 2020. Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. PUBLIKA :
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6,
- [4] Sufian Hamim, 2019. Manajemen Publik Pemerintahan Di 10 Desa Sampel di Provinsi Riau. <https://repository.uir.ac.id/>
- [5] Hamriani Akmar, 2016. Pelayanan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo. Rispotory Universitas Negeri Makasara.
- [6] Anifah Putri Cahyanti, 2017. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar
- [7] I Komang Gede Bendesa, 2016, Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung, E-Jurnal Ekonomidan Bisnis Universitas Udayana 5.1 (2016) : 89-114.
- [8] Muhammad Fadly Vinanda, 2017, Studi Tentang Pelaksanaan Kepatuhan Dalam Standar Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Bantuas Kota Samarinda, eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 5, Nomor 4, 2017: 507-518.

LAMPIRAN BIODATA PENGUSUL

A. BIODATA KETUA PENGUSUL

Nama	Dr SUFIAN S.H., M.Si
NIDN/NIDK	1012026703
Pangkat/Jabatan	-/Guru Besar
E-mail	sufianhamim@soc.uir.ac.id / sosmed 0811764589
ID Sinta	6052092
h-Index	0

Publikasi di Jurnal Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	FEASIBILITY STUDY OF EXPANSION SOUTH RIAU-INDONESIA DISTRICT PELALAWAN REGENCY	first author	International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2019, Volume 10, Issue 4, 2019, Pages 41-57, 2201-1315	https://www.scopus.c
2	OPEN SYSTEM OF STRATEGIC PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL AUTONOMY IN RIAU - INDONESIA	first author	International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2019, Volume 10, Issue 4, 2019, Pages 27-40, 2201-1315	https://www.scopus.c

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
----	---------------	--	---	------------------------

Prosiding Seminar/ Konverensi Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	MEMOTIVASI KERJA SUMBER DAYA MANUSIA	First author	MANAJEMEN SUMBER DAYAMANUSIA, Seminar Nasional Manajemen Sumber Daya Manusia, 23 Oktober 1996, 2005, , , 979-8885-09-0	https://scholar.google

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
1	ORGANISASI BIROKRASI DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN	2019	979 – 8885 – 39 – 2	UIR PRESS	https://scholar.google
2	MANAJEMEN STRATEGIS PEMERINTAHAN : Suatu Pembangunan Daerah dan Pedesaan	2018	979 – 8885 – 38 – 4	UIR PRESS	https://scholar.google

3	FILSAFAT ILMU DAN METODOLOGI PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL	2017	979 – 8885 – 79- 1	UIR PRESS	https://sc holar.goog
4	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN : Suatu Konsep, Teori dan Pendekatan	2016	979 – 8885 – 36 – 8	UIR PRESS	https://sc holar.goog
5	HUKUM BISNIS	2016	978- 602- 0992- 56-3	TRUSSM EDIA GRAFIK A	https://sc holar.goog
6	MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN	2016	978- 602- 0992- 54-9	TRUSSM EDIA GRAFIK A	https://sc holar.goog
7	PERAN DAN DINAMIKA DEWAN KOMISARIS BANK DAERAH	2016	978- 602- 0992- 52-5	TRUSSM EDIA GRAFIK A	https://sc holar.goog
8	EKOLOGI ADMINISTRASI	2015	978- 602- 0992- 43-3	TRUSSM EDIA GRAFIK A	https://sc holar.goog
9	IDEAL DAN PRAKTEK DALAM	2015	978- 602- 0992-	TRUSSM EDIA	https://sc holar.goog

	ADMINISTRASI NEGARA		45-7	GRAFIK A	
10	PERILAKU ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN	2015	978-602-0992-47-1	TRUSSMEDIA GRAFIK A	https://sc.holar.goog
11	SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN	2015	979 - 8885 - 33 - 3	UIR PRESS	https://sc.holar.goog
12	FILSAFAT ILMU, ILMU PENGETAHUAN DAN PENELITIAN	2014	978-602-0992-34-1	TRUSSMEDIA GRAFIK A	https://sc.holar.goog
13	MENUJU PEMEKARAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR VISIONER PROSPEK DAN TANTANGAN	2014	978-602-0992-36-5	TRUSSMEDIA GRAFIK A	https://sc.holar.goog
14	SISTEM UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DI KABUPATEN ROKAN	2014	978-602-0992-32-7	TRUSSMEDIA GRAFIK A	https://sc.holar.goog

	HULU				
15	ADMINISTRASI, ORGANISASI, DAN MANAJEMEN , Suatu Ilmu, Teori, Konsep dan Aplikasi	2013	978- 602- 0992- 28-0	TRUSSMEDIA GRAFIK A	https://scolar.google
16	MANAJEMEN STRATEGIS DALAM ORGANISASI	2013	978- 602- 0992- 25-9	TRUSSMEDIA GRAFIK A	https://scolar.google
17	MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEDESAAN	2013	978- 602- 0992- 26-6	TRUSSMEDIA GRAFIK A	https://scolar.google
18	ORGANISASI DAN MANAJEMEN	2013	978- 602- 0992- 27-3	TRUSSMEDIA GRAFIK A	https://scolar.google
19	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN, Suatu Konsep, Pendekatan, Teori dan Aplikasi di Indonesia	2012	978- 602- 0992- 38-9	TRUSSMEDIA GRAFIK A	https://scolar.google

20	BUNGA RAMPAI ILMU- ILMU SOSIAL	2012	978-602-0992-40-2	TRUSSM EDIA GRAFIK A	https://sc.holar.goog
21	ADMINISTRASI NEGARA, KONSEP DAN KASUS	2005	979-8885-75-9	UIR PRESS	https://sc.holar.goog
22	SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN, Dapat Dijadikan Pedoman Dalam Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi	2005	979-8885-33-3	UIR PRESS	https://sc.holar.goog

Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Status KI (terdaftar/ granted)	URL (jika ada)
1	Organisasi Birokrasi dan Manajemen Pemerintahan	2019	Hak Cipta	000139079	Terdaftar	https://e-hakcipta.d
2	Administrasi dan Manajemen Pembangunan	2017	Hak Cipta	000139077	Terdaftar	https://e-hakcipta.d

	an					
3	Manajemen Strategis Pemerintahan	2018	Hak Cipta	000139078	Terdaftar	https://e-hakcipta.d
4	EKOLOGI ADMINISTRASI (Edisi Revisi)	2015	Hak Cipta		Terdaftar	file:///C:/Users/ac e
5	IDEAL DAN PRAKTEK DALAM ADMINISTRASI NEGARA	2015	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d
6	PERILAKU ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN	2015	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d
7	MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN (Hasil Penelitian Seri Kedua)	2016	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d

8	PERAN DAN DINAMIK A DEWAN KOMISARI S BANK DAERAH	2016	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d
9	FILSAFAT ILMU, ILMU PENGETA HUAN DAN PENELITIA N	2014	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d
10	MENUJU PEMEKAR AN KABUPAT EN INDRAGIR I HILIR VISIONER Prospek Dan Tantangan	2014	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d
11	MANAJEM EN STRATEGI S DALAM ORGANIS ASI (Edisi Revisi)	2013	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d

12	MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEDESAA N (Edisi Revisi)	2013	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d
13	BUNGA RAMPAI ILMU-ILMU SOSIAL Hasil Penelitian Seri Kesatu (Edisi Revisi)	2012	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d
14	ADMINISTRASI, ORGANISASI DAN MANAJEMEN (Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi)	2013	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d

15	SISTEM UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU (Edisi Revisi)	2014	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d
16	HUKUM BISNIS	2016	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d
17	ADMINISTRASI NEGARA, KONSEP DAN KASUS	2005	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d
18	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN, KONSEP, PENDEKATAN, TEORI DAN APLIKASI	2012	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d

	DI INDONESIA					
19	ORGANISASI DAN MANAJEMEN	2013	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d
20	SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN	2005	Hak Cipta		Terdaftar	https://e-hakcipta.d
21	Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial	2017	Hak Cipta	000139076	Terdaftar	https://e-hakcipta.d

B. ANGGOTA PENGUSUL 1

Nama	DETRI KARYA S.E., M.A
NIDN/NIDK	1005025901
Pangkat/Jabatan	-/Guru Besar
E-mail	
ID Sinta	5995321
h-Index	2

Publikasi di Jurnal Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	DISTRIBUTION OF SILICASAND ON THE MUDA ISLAND AND KETAM ISLAND IN THE ESTUARYOF KAMPAR RIVER, PELALAWAN REGENCY, INDONESIA		International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, 2017, 5, 2, 2321-9009	http://iraj.in/
2	Impact of Forest Fire to Economic and Environment inRiau Province Indonesia		Medwell Journals, 2017, 11, 2, 1993-5250	www.medwelljournals.

3	APPLICATION OF MUDHARABAH FINANCING TOWARD SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEUR IN BANK MUAMALAT PEKANBARU BRANCH INDONESIA		International Business Management, 2016, 10, 6, 1993-5250	http://www.edwelljo
4	NEW ALGORITHM FOR FAST PROCESSING RFIDSYSTEM IN CONTAINER TERMINAL		INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (IJECE), 2016, 6, 1, 2088-8708	http://iaesjournal.c
5	New Algorithm for Fast Processing RFID System in Container Terminal		International Journal of Electrical and Computer Engineering , 2015,6, 1, 2088-8708	http://iaesjournal.c

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

Prosiding Seminar/ Konverensi Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
1	MIKRO EKONOMI	2018	978-602-425-247-2	RAJAWALI PERS	-
2	MAKRO EKONOMI	2016	978-979-769-953-6	RAJA GRAFINDO PERSADA	-
3	Corporate Performance Management	2013	978-979-450-591-5	Ghalia Indonesia	-
4	Menuju Universitas Islam Riau (UIR) sebagai Universitas Unggul dan Terkemuka	2013	978-979-3793-59-7	UIR Press	-
5	Pengurusan	2013	978-983-	Institut Alam	-

	Alam Sekitar di Malaysia dan Indonesia		2457-59-6	dan Tamadun Melayu	
6	Riau Membangun Sembilan Tahun, Daya dan Karya memajukan Riau	2013	897-624-8816-68-9	Citramedia	-

Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Status KI (terdaftar/ granted)	URL (jika ada)

PERSETUJUAN USULAN

Tanggal Pengiriman	Tanggal Persetujuan	Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan	Sebutan Jabatan Unit	Nama Unit Lembaga Pengusul
-	-	-	-	-

LAMPIRAN 3.

R A H A S I A
Hanya Untuk Keperluan Ilmiah

No.Responden :
Desa :

**KUESIONER DAN PEDOMAN WAWANCARA TERPIMPIN,
STUDI DOKUMENTASI SERTA OBSERVASI**

Isilah daftar pertanyaan identitas responden/Informan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

U m u r : Tahun

Jenis Kelamin : 1. Pria 2. Wanita

Tingkat Pendidikan : 1. Tidak Sekolah 2. SD tidak tamat
3. SD tamat 4. SLTP tidak tamat
5. SLTP tamat 6. SLTA tidak tamat
7. SLTA tamat 8. PT. Tidak tamat
9. PT. tamat

Pekerjaan : 1. Utama :
2. Sampingan :

Ketokohan di Masyarakat :

1. Aparat Pemerintah 4. Tokoh Adat
2. Tokoh Masyarakat 5. Saudagar Kaya
3. Tokoh Agama 6. Masyarakat Biasa

Jumlah Anggota Keluarga : Orang

Lama Menetap / Tinggal : Tahun

Petunjuk Pengisian Pernyataan dari No. 1 sampai No. 94 :

Pilihan jawaban dapat saja lebih dari satu atau tidak ada sama sekali, tergantung pada fakta (kenyataan), pengalaman atau kejadian yang sesuai dari pernyataan yang disampaikan, yaitu data dan informasi apa saja dari situasi dan kondisi internal dan eksternal perdesaan yang dikumpulkan dan dianalisis oleh

perencana, yang dijadikan bahan dasar untuk perumusan perencanaan strategi.

I. Variabel X : Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan Perdesaan

A. Dimensi Analisis Potensi Alam :

1. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi topografi (bentang lahan) perdesaan, berikut ini: (a) potensi dataran rendah, (b) potensi perbukitan, (c) potensi sungai, (d) potensi danau dan atau rawa, (e) potensi sungai dan atau laut.
2. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi geografis perdesaan, berikut ini: (a) sumber air, (b) curah hujan rata rata pertahun, (c) ketinggian dari permukaan laut, (d) suhu rata-rata, (e) tingkat erosi tanah.
3. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi lahan perdesaan berikut ini: (a) tingkat kesuburan lahan, (b) lahan kritis (c) lahan terlantar, (d) lahan gambut, (e) lahan tadah hujan dan atau lahan pasang surut.
4. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi potensi hutan, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) sumber yang dapat dimanfaatkan, (d) kelestarian, (e) status kepemilikannya.
5. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi potensi belukar, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) sumber yang dapat dimanfaatkan, (d) kelestarian, (e) status kepemilikannya.
6. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi potensi padang rumput/ilalang, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) sumber yang dapat dimanfaatkan, (d) kelestarian, (e) status kepemilikannya.
7. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi potensi danau atau rawa, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) sumber

yang dapat dimanfaatkan, (d) kelestarian, (e) status kepemilikannya.

8. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi potensi sungai atau laut, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) sumber yang dapat dimanfaatkan, (d) kelestarian, (e) status kepemilikannya.
9. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi potensi pertambangan atau bahan galian golongan C, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) sumber yang dapat dimanfaatkan, (d) kelestarian, (e) status kepemilikannya.
10. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi potensi sumber air, berikut ini: (a) lokasi, (b) volume, (c) sumber yang dapat dimanfaatkan, (d) kelestarian, (e) status kepemilikannya.
11. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi potensi sumber energi, berikut ini: (a) lokasi, (b) kekuatan, (c) sumber yang dapat dimanfaatkan, (d) kelestarian, (e) status kepemilikannya.
12. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi lahan yang potensial untuk persawahan, berikut ini : (a) lokasi, (b) luas, (c) tingkat kesuburan, (d) pemanfaatan, (e) status kepemilikannya.
13. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi lahan yang potensial untuk perladangan, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) tingkat kesuburan, (d) pemanfaatan, (e) status kepemilikannya.
14. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi lahan yang potensial untuk perkebunan, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) tingkat kesuburan, (d) pemanfaatan, (e) status kepemilikannya.

15. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi lahan yang potensial untuk perikanan darat, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) tingkat kesuburan, (d) pemanfaatan, (e) status kepemilikannya.
16. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi lahan yang potensial untuk peternakan, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) tingkat kesuburan, (d) pemanfaatan, (e) status kepemilikannya.
17. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi lahan yang potensial untuk lokasi kegiatan industri kecil, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) dampak lingkungan (d) pemanfaatan, (e) status kepemilikannya.
18. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi lahan yang potensial untuk lokasi kegiatan industri sedang/ menengah, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) dampak lingkungan (d) pemanfaatan, (e) status kepemilikannya.
19. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi lahan yang potensial untuk lokasi kegiatan industri besar, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) dampak lingkungan (d) pemanfaatan, (e) status kepemilikannya.
20. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi lahan yang potensial untuk lokasi kegiatan pariwisata/rekreasi, berikut ini: (a) lokasi, (b) luas, (c) dampak lingkungan (d) pemanfaatan, (e) status kepemilikannya.

B. Dimensi Analisis Potensi Masyarakat :

21. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi pendidikan masyarakat, berikut ini: (a) jenis pendidikan formal, (b) tingkat pendidikan formal, (c) jenis pelatihan, (d) tingkat pelatihan, (e) pengalaman kerja/ pengetahuan umum.

22. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kemampuan dan keterampilan masyarakat, berikut ini: (a) tingkat kemampuan menulis, (b) tingkat kemampuan membaca, (c) tingkat kemampuan menyampaikan pendapat., (d) jenis keterampilan, (e) tingkat keterampilan.
23. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi angkatan kerja terdidik masyarakat, berikut ini: (a) jenis pekerjaan, (b) jumlah, (c) tingkat pendidikan, (d) pengalaman/ pengetahuan umum, (e) tingkat keterampilan.
24. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi angkatan kerja tidak terdidik masyarakat, berikut ini: (a) jenis/sifat pekerjaan, (b) jumlah, (c) pengalaman kerja, (d) kemampuan pengetahuan umum, (e) tingkat keterampilan.
25. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kesehatan masyarakat, berikut ini: (a) usia harapan hidup, (b) jenis penyakit diderita, (c) ketahanan fisik, (d) peserta keluarga berencana aktif, (e) tahapan keluarga sejahtera.
26. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi gizi makanan yang dikonsumsi masyarakat, berikut ini: (a) jumlah kalori, (b) jumlah lemak, (c) jumlah protein, (d) jumlah vitamin, (e) jumlah makanan tambahan.
27. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi budaya kerja masyarakat, berikut ini: (a) lama bekerja sehari, (b) semangat kerja, (c) kedisiplinan, (d) sikap mental, (e) orientasi pada hasil.
28. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi teknologi sendiri (setempat), berikut ini: (a) jenis teknologi, (b) tingkat penguasaan teknologi, (c) tingkat penyebaran teknologi, (d) peluang pengembangan teknologi, (e) tingkat efisiensi teknologi.

29. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi usaha yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, berikut ini: (a) jenis usaha, (b) tenaga kerja, (c) sumber-sumber yang diperlukan berusaha, (d) produktivitas, (e) pemasaran.
30. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kesadaran anggota bermasyarakat, berikut ini: (a) kerjasama, (b) solidaritas, (c) ketertiban, (d) persatuan, (e) toleransi.
31. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi spirit keagamaan dalam masyarakat, berikut ini: (a) kerja keras/ketekunan, (b) hemat, (c) disiplin, (d) tolong menolong, (e) kesabaran.

C. Dimensi Analisis Keadaan Pemerintahan Desa :

32. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi jumlah aparatur pemerintah desa berikut ini, yang berdasarkan: (a) urusan, (b) lamanya bekerja, (c) jenis kelamin, (d) pendidikan, (e) pangkat/golongan.
33. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi pendidikan aparat desa, berikut ini: (a) macam pendidikan formal, (b) tingkat pendidikan formal, (c) macam pelatihan, (d) tingkat pelatihan, (e) pengetahuan umum.
34. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kemampuan dan pengalaman kerja aparat desa, berikut ini: (a) kemampuan menulis, (b) kemampuan membaca, (c) kemampuan menyampaikan pendapat, (d) jenis pengalaman kerja, (e) lama pengalaman kerja.
35. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kepemimpinan kepala desa, berikut ini: (a) kerjasama, (b)

kejujuran, (c) kedisiplinan, (d) tanggung jawab, (e) hubungan dengan bawahan dan masyarakat.

36. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi sikap mental aparat desa, berikut ini: a) kerjasama, (b) kejujuran, (c) kedisiplinan, (d) tanggung jawab, (e) hubungan dengan pimpinan dan masyarakat.
37. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kedisiplinan aparat desa, berikut ini: (a) kualitas pelayanan, (b) kehadiran ke kantor, (c) bekerja sesuai rencana, (d) orientasi pada hasil, (e) efisiensi dalam bekerja.
38. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi sistem penggajian pegawai desa, berikut ini: (a) sumber, (b) bentuk, (c) jumlah, (d) ketepatan waktu membayar, (e) tingkat kewajaran.
39. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi peralatan kantor desa, berikut ini: (a) jumlah peralatan yang ada, (b) sistem perawatan, (c) kualitas, (d) kebutuhan, (e) sumber pendanaan.
40. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi bahan-bahan atau perlengkapan kantor desa, berikut ini: (a) jumlah bahan yang ada, (b) sistem perawatan bahan, (c) kualitas, (d) kebutuhan, (e) sumber pendanaan.
41. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi gedung kantor desa, berikut ini : (a) luas bangunan, (b) kualitas bangunan, (c) tata ruang, (d) perawatan, (e) rencana pengembangan.

D. Dimensi Analisis Sumber Pendapatan (Penerimaan) Desa:

42. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi sumber pendapatan dari tanah-tanah kas desa, berikut ini: (a) lokasi, (b) jumlah, (c) luas, (d) sistem pengelolaan, (e) penghasilan untuk kas desa.
43. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi sumber pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa, berikut ini: (a) bentuk, (b) jumlah, (c) sistem pengelolaan, (d) upaya meningkatkan partisipasi, (e) penghasilan untuk kas desa.
44. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi sumber pendapatan desa dari potensi kekayaan alam, berikut ini: (a) lokasi, (b) macam, (c) jumlah, (d) sistem pengelolaan, (e) penghasilan untuk kas desa.
45. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi sumber pendapatan dari hasil usaha desa, berikut ini: (a) lokasi, (b) bentuk, (c) jumlah, (d) sistem pengelolaan, (e) penghasilan untuk kas desa.
46. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi sumber pendapatan dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat, berikut ini: (a) bentuk, (b) macam, (c) jumlah, (d) sistem pengelolaan, (e) penghasilan untuk kas desa.
47. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi sumber pendapatan dari sumbangan dan bantuan pemerintah Daerah tingkat I dan II, berikut ini: (a) bentuk, (b) macam, (c) jumlah, (d) sistem pengelolaan, (e) penghasilan untuk kas desa.
48. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi sumber pendapatan dari sebagian pajak dan retribusi daerah, berikut

ini: (a) bentuk, (b) macam, (c) jumlah, (d) sistem pengelolaan, (e) penghasilan untuk kas desa.

49. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi sumber pendapatan desa dari hibah (pemberian), berikut ini: (a) bentuk, (b) macam, (c) jumlah, (d) sistem pengelolaan, (e) penghasilan untuk kas desa.

50. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi sumber pendapatan desa dari pinjaman, berikut ini: (a) bentuk, (b) macam, (c) jumlah, (d) sistem pengelolaan, (e) penghasilan untuk kas desa.

E. Dimensi Analisis Kebutuhan Masyarakat Desa :

51. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan makanan (sembako) masyarakat, berikut ini: (a) macam, (b) daya beli masyarakat, (c) yang sudah ada, (d) yang masih kurang, (e) sistem pengelolaan.

52. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan pakaian masyarakat, berikut ini : (a) macam, (b) daya beli masyarakat, (c) yang sudah ada, (d) yang masih kurang, (e) sistem pengelolaan.

53. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan papan (bahan bangunan) tempat tinggal masyarakat, berikut ini: (a) macam, (b) daya beli masyarakat, (c) yang sudah ada, (d) yang masih kurang, (e) sistem pengelolaan.

54. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan alat transportasi darat dan sungai desa, berikut ini: (a) macam, (b) keterjangkauan harga, (c) yang sudah ada, (d) yang masih kurang, (e) sistem pengelolaan.

55. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan jalan desa, berikut ini: (a) jumlah, (b) panjang dan lebar jalan, (c) kualitas jalan, (d) sumber pendanaan, (e) sistem perawatan.
56. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan jembatan desa, berikut ini: (a) jumlah jembatan, (b) panjang dan lebar jembatan, (c) kualitas jembatan, (d) sumber pendanaan, (e) sistem perawatan.
57. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan listrik desa, berikut ini: (a) jumlah yang membutuhkan, (b) kekuatan (KW), (c) daya beli masyarakat, (d) sumber pendanaan, (e) sistem pengelolaan.
58. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan gedung/balai pertemuan desa, berikut ini: (a) lokasi, (b) bentuk dan tata ruang, (c) kelengkapan peralatan dan bahan, (d) sumber pendanaan, (e) sistem pengelolaan.
59. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan lapangan dan alat olahraga desa, berikut ini: (a) lokasi lapangan, (b) macam, (c) kelengkapan peralatan dan bahan, (d) sumber pendanaan, (e) sistem pengelolaan.
60. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan gedung sekolah/madrasah desa, berikut ini: (a) lokasi, (b) bentuk dan tata ruang, (c) kelengkapan peralatan dan bahan, (d) sumber pendanaan, (e) sistem pengelolaan.
61. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan guru sekolah/madrasah desa, berikut ini: (a) jumlah, (b) kualitas, (c) ketersediaan guru, (d) sumber pendanaan, (e) sistem penggajian.

62. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan peralatan dan bahan sekolah/madrasah desa, berikut ini: (a) macam, (b) jumlah, (c) kualitas, (d) sumber pendanaan, (e) sistem perawatan.
63. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan gedung PUSKESMAS/balai kesehatan desa, berikut ini: (a) lokasi, (b) bentuk dan tata ruang, (c) kelengkapan peralatan dan bahan, (d) sumber pendanaan, (e) sistem pengelolaan.
64. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan tenaga medis desa, berikut ini: (a) jumlah, (b) kualitas, (c) ketersediaan tenaga medis, (d) sumber pendanaan, (e) sistem penggajian.
65. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan peralatan dan bahan PUSKESMAS/balai kesehatan desa, berikut ini : (a) macam, (b) jumlah, (c) kualitas, (d) sumber pendanaan, (e) sistem perawatan.
66. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan gedung balai adat desa, berikut ini: (a) lokasi, (b) bentuk dan tata ruang, (c) kelengkapan peralatan dan bahan, (d) sumber pendanaan, (e) sistem pengelolaan.
67. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan peralatan dan bahan seni dan budaya masyarakat, berikut ini: (a) macam, (b) jumlah, (c) kualitas, (d) sumber pendanaan, (e) sistem perawatan.
68. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan gedung LMD, berikut ini: (a) lokasi, (b) bentuk dan tata ruang, (c) kelengkapan peralatan dan bahan, (d) sumber pendanaan, (e) sistem pengelolaan.

69. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan peralatan dan bahan LMD, berikut ini: (a) macam, (b) jumlah, (c) kualitas, (d) sumber pendanaan, (e) sistem perawatan.
70. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan gedung LKMD, berikut ini: (a) lokasi, (b) bentuk dan tata ruang, (c) kelengkapan peralatan dan bahan, (d) sumber pendanaan, (e) sistem pengelolaan.
71. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan peralatan dan bahan LKMD, berikut ini: (a) macam, (b) jumlah, (c) kualitas, (d) sumber pendanaan, (e) sistem perawatan.
72. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan gedung mesjid/mushalla/langgar atau rumah ibadah agama lainnya di desa, berikut ini: (a) lokasi, (b) bentuk dan tata ruang, (c) kelengkapan peralatan dan bahan, (d) sumber pendanaan, (e) sistem pengelolaan.
73. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan peralatan dan bahan mesjid/mushalla/langgar atau rumah ibadah agama lainnya di desa, berikut ini : (a) macam, (b) jumlah, (c) kualitas, (d) sumber pendanaan, (e) sistem perawatan.
74. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan pos ronda desa, berikut ini: (a) lokasi, (b) personil (petugas), (c) kelengkapan peralatan dan bahan, (d) sumber pendanaan, (e) sistem pengelolaan.
75. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan peralatan dan bahan pos ronda, berikut ini: (a) jenis/macam, (b) jumlah, (c) kualitas, (d) sumber pendanaan, dan (e) sistem perawatan.

F. Dimensi Analisis Kebijakan Pemerintah :

76. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa menurut UU No.5/79 (tentang Pemerintahan Desa), berikut ini: (a) sumber-sumber pembangunan desa, (b) organisasi pembangunan desa, (c) manajemen pembangunan desa, (d) kepemimpinan pemerintahan desa, (e) sistem pengambilan keputusan desa.
77. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa menurut UU No.22/99 (tentang Pemerintah Daerah), berikut ini: (a) sumber-sumber pembangunan desa, (b) organisasi pembangunan desa (c) manajemen pembangunan desa, (d) kepemimpinan pemerintahan desa, (e) sistem pengambilan keputusan.
78. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa menurut program pemerintah, berikut ini: (a) program pembangunan politik di desa (b) program pembangunan ekonomi desa (c) program pembangunan social desa, (d) program pembangunan budaya desa, (e) program pembangunan pertahanan dan keamanan masyarakat desa.
79. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa menurut PERDA Tingkat I, berikut ini: (a) sumber-sumber pembangunan desa, (b) tujuan pembangunan desa, (c) sasaran pembangunan desa, (d) program pembangunan desa, (e) implementasi program pembangunan desa.
80. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa menurut surat keputusan Gubernur, berikut ini: (a) sumber-sumber pembangunan desa, (b) tujuan pembangunan desa, (c) sasaran

pembangunan desa, (d) program pembangunan desa, (e) implementasi program pembangunan desa.

81. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa menurut PERDA Tingkat II, berikut ini: (a) sumber-sumber pembangunan desa, (b) tujuan pembangunan desa, (c) sasaran pembangunan desa, (d) program pembangunan desa, (e) implementasi program pembangunan desa.

82. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa menurut keputusan Bupati/Walikota, berikut ini: (a) sumber-sumber pembangunan desa, (b) tujuan pembangunan desa, (c) sasaran pembangunan desa, (d) program pembangunan desa, (e) implementasi program pembangunan desa.

83. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa menurut keputusan Camat, berikut ini: (a) sumber-sumber pembangunan desa, (b) tujuan pembangunan desa, (c) sasaran pembangunan desa, (d) program pembangunan desa, (e) implementasi program pembangunan desa.

G. Dimensi Analisis Kebutuhan Pasar dari Sumber Perdesaan :

84. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi produk perdesaan yang dibutuhkan pasar, berikut ini: (a) macam, (b) jumlah, (c) kualitas, (d) kebersihan, (e) sistem pengelolaan.

85. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi tingkat ketersediaan dan ketepatan waktu memasarkan produk perdesaan yang dibutuhkan pasar, berikut ini: (a) macam, (b) jumlah, (c) kualitas (d) sistem memasarkan, (e) tingkat harga.

86. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kebutuhan tenaga kerja perdesaan untuk lapangan kerja/ pasar kerja, berikut ini: (a) macam, (b) jumlah, (c) kualitas, (d) sistem pengadaan, (e) sistem penyaluran.

87. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi tingkat ketersediaan dan ketepatan waktu penyaluran tenaga kerja perdesaan yang dibutuhkan lapangan kerja, berikut ini: (a) macam, (b) jumlah, (c) kualitas, (d) sistem pengadaan, (e) sistem penyaluran.

H. Dimensi Analisis Perkembangan Teknologi Perdesaan :

88. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi pengembangan teknologi yang sesuai dengan perdesaan, berikut ini: (a) macam, (b) upaya pengembangan, (c) upaya alih teknologi, (d) upaya penyesuaian dengan teknologi setempat, (e) upaya penyebaran kepada masyarakat.

89. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi efektivitas teknologi yang digunakan untuk perdesaan, berikut ini: (a) cara penggunaan, (b) biaya yang dibutuhkan, (c) waktu yang dibutuhkan, (d) penggunaan tempat, (e) kemudahan memperoleh.

I. Dimensi Analisis Investasi Pemerintah dan Swasta Nasional:

90. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kesiapan aparatur pemerintahan Desa dengan masuknya investasi pemerintah dan swasta nasional di desa, berikut ini: (a) kemampuan aparat, (b) pengalaman aparat, (c) kerjasama aparat, (d) sikap mental aparat, (e) kedisiplinan aparat.

91. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kesesuaian usaha yang dikembangkan di perdesaan, berikut ini: (a) kesesuaian dengan potensi alam, (b) kesesuaian dengan

potensi masyarakat, (c) kesesuaian dengan perkembangan teknologi, (d) kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat desa, (e) kesesuaian dengan kebutuhan pasar.

92. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi kesesuaian jenis spesialisasi usaha yang dikembangkan di perdesaan, berikut ini: (a) kesesuaian dengan potensi alam, (b) kesesuaian dengan potensi masyarakat, (c) kesesuaian dengan perkembangan teknologi, (d) kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat desa, (e) kesesuaian dengan kebutuhan pasar.

93. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi bentuk (pola) kerjasama (kemitraan) pengusaha dengan masyarakat perdesaan, berikut ini: (a) bentuk wadah organisasi, (b) pemilikan saham (c) pembagian kerja, (d) pembagian hasil, (e) keamanan berusaha.

94. Yang mana saja telah dianalisis dari situasi dan kondisi bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perusahaan/perkebunan perdesaan, berikut ini: (a) modal/investasi, (b) tenaga kerja, (c) peralatan dan bahan, (d) pengambilan keputusan, (e) tanggung jawab keamanan.

Petunjuk Pengisian Pernyataan dari No. 95 sampai No. 235:

Jawaban hanya salah satu saja dari pilihan yang tersedia yaitu tergantung pada fakta (kenyataan), pengalaman atau kejadian yang sesuai dari pernyataan yang diajukan.

J. Dimensi Organisasi Perencanaan :

95. Semua unsur masyarakat dalam organisasi perencanaan pembangunan di perdesaan: (a) sudah diwakili semuanya, (b) sebagian besar, (c) separohnya, (d) sebagian kecil, (d) tidak ada.

96. Semua unsur pemerintahan desa dalam organisasi perencanaan pembangunan perdesaan: (a) sudah diwakili semuanya, (b) sebagian besar, (c) separohnya, (d) sebagian kecil, (d) tidak ada.
97. Bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan proses pengambilan keputusan dalam organisasi perencanaan pembangunan perdesaan: (a) sangat lengkap, (b) lengkap, (c) cukup, (d) kurang lengkap, (e) tidak ada.
98. Data dan informasi yang diperlukan dalam organisasi perencanaan pembangunan perdesaan: (a) sangat lengkap, (b) lengkap, (c) cukup, (d) kurang lengkap, (e) tidak ada.
99. Keputusan yang diambil dalam organisasi perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi perdesaan: (a) sudah disesuaikan, (b) sebagian besar, (c) separohnya, (d) sebagian kecil, (e) tidak ada disesuaikan.
100. Proses pengambilan keputusan dalam organisasi perencanaan pembangunan perdesaan: (a) sangat demokratis, (b) demokratis, (c) cukup demokratis, (d) kurang demokratis, (e) tidak demokratis.

K. Dimensi Merumuskan Tujuan :

101. Perencanaan pembangunan selama ini bertujuan memberdayakan masyarakat perdesaan: (a) sangat memberdayakan, (b) memberdayakan, (c) cukup memberdayakan, (d) kurang memberdayakan, (e) tidak memberdayakan masyarakat.
102. Perencanaan pembangunan selama ini bertujuan memanfaatkan potensi alam desa: (a) sangat memanfaatkan,

(b) memanfaatkan, (c) cukup memanfaatkan, (d) kurang memanfaatkan, (e) tidak memanfaatkan potensi alam.

103. Perencanaan pembangunan selama ini bertujuan memanfaatkan potensi masyarakat desa: (a) sangat memanfaatkan, (b) memanfaatkan, (c) cukup memanfaatkan, (d) kurang memanfaatkan, (e) tidak memanfaatkan potensi masyarakat.

104. Perencanaan pembangunan selama ini bertujuan memenuhi kebutuhan fisik masyarakat: (a) sangat memenuhi, (b) memenuhi, (c) cukup memenuhi, (d) kurang memenuhi, (e) tidak memenuhi kebutuhan fisik masyarakat.

105. Perencanaan pembangunan selama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik masyarakat: (a) sangat memenuhi, (b) memenuhi, (c) cukup memenuhi, (d) kurang memenuhi, (e) tidak memenuhi kebutuhan nonfisik masyarakat.

106. Perencanaan pembangunan selama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dari sumber perdesaan: (a) sangat memenuhi, (b) memenuhi, (c) cukup memenuhi, (d) kurang memenuhi, (e) tidak memenuhi kebutuhan pasar dari sumber perdesaan.

107. Perencanaan pembangunan selama ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi perdesaan: (a) sangat mengembangkan, (b) mengembangkan, (c) cukup mengembangkan, (d) kurang mengembangkan, (e) tidak mengembangkan teknologi perdesaan.

108. Perencanaan pembangunan selama ini, bertujuan menciptakan suasana yang menguntungkan untuk berinvestasi di perdesaan: (a) sangat menciptakan, (b) menciptakan, (c) cukup menciptakan, (d) kurang menciptakan, (e) tidak menciptakan suasana yang menguntungkan untuk berinvestasi.

109. Perencanaan pembangunan selama ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat perdesaan: (a) sangat meningkatkan, (b) meningkatkan, (c) cukup meningkatkan, (d) kurang meningkatkan, (e) tidak meningkatkan partisipasi masyarakat.

L. Dimensi Merumuskan Sasaran :

110. Perencanaan pembangunan selama ini, dengan sasaran mengutamakan masyarakat miskin: (a) sangat mengutamakan, (b) mengutamakan, (c) cukup mengutamakan, (d) kurang mengutamakan, (e) tidak mengutamakan masyarakat miskin.

111. Perencanaan pembangunan selama ini, dengan sasaran mengutamakan peningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat: (a) sangat mengutamakan, (b) mengutamakan, (c) cukup mengutamakan, (d) kurang mengutamakan, (e) tidak mengutamakan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat.

112. Perencanaan pembangunan selama ini, dengan sasaran mengutamakan peningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat: (a) sangat mengutamakan, (b) mengutamakan, (c) cukup mengutamakan, (d) kurang mengutamakan, (e) tidak mengutamakan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat.

113. Perencanaan pembangunan yang dibuat selama ini, dengan sasaran mengutamakan pembukaan lapangan kerja: (a) sangat mengutamakan, (b) mengutamakan, (c) cukup mengutamakan, (d) kurang mengutamakan, (e) tidak mengutamakan pembukaan lapangan kerja.

114. Perencanaan pembangunan yang dibuat selama ini, dengan sasaran mengutamakan masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan tetap: (a) sangat mengutamakan, (b) mengutamakan,

(c) cukup mengutamakan, (d) kurang mengutamakan, (e) tidak mengutamakan masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan tetap.

115. Perencanaan pembangunan yang dibuat selama ini, dengan sasaran mengutamakan peningkatan sosial ekonomi masyarakat: (a) sangat mengutamakan, (b) mengutamakan, (c) cukup mengutamakan, (d) kurang mengutamakan, (e) tidak mengutamakan peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

116. Perencanaan pembangunan yang dibuat selama ini, dengan sasaran mengutamakan memasarkan produk perdesaan: (a) sangat mengutamakan, (b) mengutamakan, (c) cukup mengutamakan, (d) kurang mengutamakan, (e) tidak mengutamakan memasarkan produk perdesaan.

117. Perencanaan pembangunan yang dibuat selama ini, dengan sasaran mengutamakan penggalan sumber penerimaan keuangan desa: (a) sangat mengutamakan, (b) mengutamakan, (c) cukup mengutamakan, (d) kurang mengutamakan, (e) tidak mengutamakan penggalan sumber sumber penerimaan keuangan desa.

M. Dimensi Merumuskan Program :

118. Program pembangunan yang dibuat selama ini, untuk meningkatkan pendidikan masyarakat: (a) sangat meningkatkan, (b) meningkatkan (c) cukup meningkatkan, (d) kurang meningkatkan, (e) tidak meningkatkan pendidikan masyarakat.

119. Program pembangunan yang dibuat selama ini, memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat: (a) sangat memberikan, (b) memberikan (c) cukup memberikan, (d) kurang memberikan, (e) tidak memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat.

120. Program pembangunan selama ini, memberikan kursus manajemen berusaha kepada masyarakat: (a) sangat memberikan, (b) memberikan, (c) cukup memberikan kursus, (d) kurang memberikan, (e) tidak memberikan kursus manajemen berusaha kepada masyarakat.
121. Program pembangunan yang dibuat selama ini, memberikan penyuluhan berusaha kepada masyarakat: (a) sangat memberikan, (b) memberikan, (c) cukup memberikan, (d) kurang memberikan, (e) tidak memberikan penyuluhan berusaha kepada masyarakat.
122. Program pembangunan yang dibuat selama ini, untuk menyediakan berbagai media informasi, misalnya: buku-buku, surat kabar, dll. kepada masyarakat: (a) sangat menyediakan, (b) menyediakan, (c) cukup menyediakan, (d) kurang menyediakan, (e) tidak menyediakan berbagai media informasi.
123. Program pembangunan yang dibuat selama ini, untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat: (a) sangat meningkatkan, (b), meningkatkan, (c) cukup meningkatkan, (d) kurang meningkatkan, (e) tidak meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat.
124. Program pembangunan yang dibuat selama untuk memfungsikan dan memberdayakan lembaga LMD dan LKMD: (a) sangat memfungsikan dan memberdayakan, (b) memfungsikan dan memberdayakan, (c) cukup memfungsikan dan memberdayakan, (d) kurang memfungsikan dan memberdayakan, (e) tidak memfungsikan dan memberdayakan lembaga LMD dan LKMD.
125. Program pembangunan selama ini, untuk penataan administrasi pertanahan (landreform) perdesaan: (a)

sangat menata, (b) menata, (c) cukup menata, (d) kurang menata, (e) tidak menata administrasi pertanahan (landreform) perdesaan.

126. Program pembangunan selama ini, untuk pengadaan listrik desa: (a) sangat mengadakan, (b) mengadakan, (c) cukup mengadakan, (d) kurang mengadakan, (e) tidak mengadakan listrik desa.
127. Program pembangunan yang dibuat selama ini, untuk pengadaan telpon umum desa: (a) sangat mengadakan, (b) mengadakan, (c) cukup mengadakan, (d) kurang mengadakan, (e) tidak mengadakan telpon umum desa.
128. Program pembangunan selama ini, untuk pengadaan alat transportasi desa: (a) sangat mengadakan, (b) mengadakan, (c) cukup mengadakan, (d) kurang mengadakan, (e) tidak mengadakan alat transportasi desa.
129. Program pembangunan yang dibuat selama ini, untuk memberdayakan KUD: (a) sangat memberdayakan, (b) memberdayakan, (c) cukup memberdayakan, (d) kurang memberdayakan, (e) tidak memberdayakan KUD.
130. Program pembangunan yang dibuat selama ini, untuk pemberdayaan Bank Desa/BPR: (a) sangat memberdayakan, (b) memberdayakan, (c) cukup memberdayakan, (d) kurang memberdayakan, (e) tidak memberdayakan Bank Desa/BPR.
131. Program pembangunan selama ini untuk pengadaan sarana produksi dan distribusi produk perdesaan: (a) sangat mengadakan, (b) mengadakan, (c) cukup mengadakan, (d) kurang mengadakan, (e) tidak mengadakan sarana produksi dan distribusi produk perdesaan.

132. Program pembangunan yang dibuat selama ini untuk membangun pasar desa: (a) sangat membangun, (b) membangun, (c) cukup membangun, (d) kurang membangun, (e) tidak membangun pasar desa.
133. Program pembangunan yang dibuat selama ini untuk memasarkan produk perdesaan: (a) sangat memasarkan, (b) memasarkan, (c) cukup memasarkan, (d) kurang memasarkan, (e) tidak memasarkan produk desa.
134. Program pembangunan yang dibuat selama ini untuk pengadaan kemitraan berusaha: (a) sangat mengadakan, (b) mengadakan, (c) cukup mengadakan, (d) kurang mengadakan, (e) tidak mengadakan kemitraan berusaha.
135. Program pembangunan yang dibuat selama ini untuk mendatangkan investor yang menanamkan modalnya di perdesaan: (a) sangat mendatangkan, (b) mendatangkan, (c) cukup mendatangkan, (d) kurang mendatangkan, (e) tidak mendatangkan investor yang menanamkan modalnya di perdesaan.
136. Program pembangunan yang dibuat selama ini untuk pengembangan teknologi perdesaan: (a) sangat mengembangkan, (b) mengembangkan, (c) cukup mengembangkan, (d) kurang mengembangkan, (e) tidak mengembangkan teknologi perdesaan.
137. Program pembangunan selama ini untuk membangun jalan dan jembatan: (a) sangat membangun, (b) membangun, (c) cukup membangun, (d) kurang membangun, (e) tidak membangun jalan dan jembatan.
138. Program pembangunan selama ini untuk menggali sumber-sumber penerimaan keuangan perdesaan: (a) sangat menggali,

(b), menggali, (c) cukup menggali, (d) kurang menggali, (e) tidak menggali sumber penerimaan keuangan perdesaan.

N. Dimensi Organisasi Pelaksana Program atau Proyek :

139. Dalam perencanaan pembangunan selama ini, kelembagaan yang melaksanakan program/proyek pembangunan: (a) sangat jelas, (b) jelas, (c) cukup jelas, (d) kurang jelas, (e) tidak ada kejelasan kelembagaan yang melaksanakan program/proyek pembangunan.

140. Dalam perencanaan pembangunan selama ini, metode atau tata kerja melaksanakan program/ proyek pembangunan: (a) sangat jelas, (b) jelas, (c) cukup jelas, (d) kurang jelas, (e) tidak ada kejelasan metode atau tata kerja melaksanakan program/ proyek pembangunan.

141. Dalam perencanaan pembangunan selama ini, target-target yang akan dicapai dalam melaksanakan program/ proyek pembangunan: (a) sangat jelas, (b) jelas, (c) cukup jelas, (d) kurang jelas, (e) tidak ada kejelasan target-target yang akan dicapai dalam melaksanakan program/ proyek pembangunan

142. Dalam perencanaan pembangunan selama ini, prosedur melaksanakan program/ proyek pembangunan: (a) sangat jelas, (b) jelas, (c) cukup jelas, (d) kurang jelas, (e) tidak ada kejelasan prosedur melaksanakan program/ proyek pembangunan.

O. Dimensi Sumber-sumber yang Diperlukan:

143. Dalam perencanaan pembangunan selama ini, kejelasan personil atau tenaga kerja yang melaksanakannya: (a) sangat jelas, (b) jelas, (c) cukup jelas, (d) kurang jelas, (e) tidak

ada kejelasan personil atau tenaga kerja yang melaksanakannya.

144. Dalam perencanaan pembangunan selama ini, kualitas personil atau tenaga kerja yang melaksanakan program/proyek: (a) sangat berkualitas, (b) berkualitas, (c) cukup berkualitas, (d) kurang berkualitas, (e) tidak berkualitas.
145. Dalam perencanaan pembangunan selama ini, kejelasan dan ketersediaan sumber pembiayaan (anggarnya): (a) sangat jelas dan tersedia, (b) jelas dan tersedia, (c) cukup jelas dan tersedia, (d) kurang jelas dan tersedia, (e) tidak jelas dan tidak tersedia.
146. Dalam perencanaan pembangunan selama ini, ketersediaan peralatan yang dibutuhkan atau yang harus selalu tersedia untuk melaksanakan program: (a) sangat tersedia, (b) tersedia, (c) cukup tersedia, (d) kurang tersedia, (e) tidak tersedia .
147. Dalam perencanaan pengembangan selama ini, ketersediaan bahan-bahan atau perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan program: (a) sangat tersedia, (b) tersedia, (c) cukup tersedia, (d) kurang tersedia, (e) tidak tersedia .
148. Dalam perencanaan pembangunan selama ini, kejelasan penggunaan waktu atau jadwal untuk melaksanakan program: (a) sangat jelas, (b) jelas, (c) cukup jelas, (d) kurang jelas, (e) tidak ada kejelasan penggunaan waktu atau jadwal untuk melaksanakan program.

P. Dimensi Pengamilan Keputusan Strategis :

149. Selama ini alternatif keputusan yang dipilih untuk melaksanakan program disesuaikan dengan situasi dan kondisi perdesaan: (a) sangat disesuaikan, (b) disesuaikan, (c) cukup

disesuaikan, (d) kurang disesuaikan, (e) tidak disesuaikan dengan situasi dan kondisi perdesaan.

150. Selama ini alternatif keputusan yang dipilih untuk melaksanakan program merupakan pilihan terbaik dalam rangka mencapai tujuan: (a) sangat terbaik, (b) terbaik, (c) cukup terbaik, (d) kurang terbaik, (e) tidak terbaik untuk mencapai tujuan.
151. Selama ini alternatif keputusan yang dipilih dalam melaksanakan program berpedoman kepada biaya yang minimal untuk memperoleh hasil yang maksimal: (a) sangat berpedoman, (b) berpedoman, (c) cukup berpedoman, (d) kurang berpedoman, (e) tidak berpedoman pada biaya yang minimal untuk memperoleh hasil yang maksimal.
152. Selama ini alternatif keputusan yang dipilih dalam melaksanakan program merupakan pilihan yang memberi peluang pencapaian hasil yang optimal: (a) sangat memberi peluang, (b) memberi peluang, (c) cukup memberi peluang, (d) kurang memberi peluang, (e) tidak ada memberi peluang pada pencapaian hasil yang optimal.

II. Variabel Y : Implementasi Program Pembangunan.

A. Dimensi Pengorganisasian :

153. Program kerja operasional yang dibuat selama ini dalam kaitannya dengan perencanaan strategi yang telah dirumuskan: (a) sangat disesuaikan, (b) disesuaikan, (c) cukup disesuaikan, (d) kurang disesuaikan, (e) tidak disesuaikan dengan perencanaan strategi yang telah dirumuskan.
154. Pembentukan dan perlengkapan sumber-sumber organisasi pelaksanaan program pembangunan: manusia, uang, bahan, peralatan, bahan dan metode: (a) sangat dibentuk dan sangat dilengkapi (b) dibentuk dan dilengkapi, (c) cukup dibentuk dan

cukup dilengkapi, (d) kurang dibentuk dan kurang dilengkapi, (e) tidak dibentuk dan tidak dilengkapi dengan sumber-sumber.

155. Pembagian kerja antara unit-unit atau seksi-seksi organisasi/kelembagaan pelaksana program pembangunan selama ini: (a) sangat jelas, (b) jelas, (c) cukup jelas, (d) kurang jelas, (e) tidak jelas dalam pembagian kerja antara unit-unit atau seksi-seksi.

156. Pemberian wewenang kepada siapa tugas/ pekerjaan diserahkan dalam organisasi pelaksana program pembangunan selama ini: (a) sangat jelas, (b) jelas, (c) cukup jelas, (d) kurang jelas, (e) tidak jelas pemberian wewenang kepada siapa tugas/ pekerjaan diserahkan.

157. Pertanggung jawaban unit-unit, seksi-seksi, dan personel dalam melaksanakan tugas yang telah diserahkan dalam organisasi pelaksana program pembangunan selama ini (a) sangat jelas, (b) jelas, (c) cukup jelas, (d) kurang jelas, (e) tidak jelas pertanggung jawaban unit-unit, seksi-seksi, dan personel dalam melaksanakan tugas yang telah diserahkan.

158. Koordinasi vertikal, horizontal, intern dan ekstern dalam melaksanakan program pembangunan selama ini: (a) sangat dilaksanakan, (b) dilaksanakan, (c) cukup dilaksanakan, (d) kurang dilaksanakan, (e) tidak dilaksanakan koordinasi vertikal, horizontal, intern dan ekstern.

B. Dimensi Penggerakan :

159. Gaya kepemimpinan tokoh formal dan informal masyarakat perdesaan dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya: (a) sangat disesuaikan, (b) disesuaikan, (c) cukup disesuaikan, (d) kurang disesuaikan, (e) tidak disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya.

160. Sikap dan mental aparat pemerintah desa dan petugas lapangan dalam melaksanakan program: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak memperlihatkan sikap dan mental yang baik.
161. Kedisiplinan aparat pemerintahan desa dan petugas lapangan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya: (a) sangat berdisiplin, (b) berdisiplin, (c) cukup berdisiplin, (d) kurang berdisiplin, (e) tidak berdisiplin dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya.
162. Motivasi kerja dari pimpinan kepada bawahan (staf), baik melalui sistem penggajian maupun penghargaan: (a) sangat memotivasi, (b) memotivasi, (c) cukup memotivasi, (d) kurang memotivasi, (e) tidak memotivasi bawahan (staf), baik melalui sistem penggajian maupun penghargaan.
163. Komunikasi antara pemimpin dengan petugas (staf) terutama dalam memberi maupun menerima arahan: (a) sangat sering, (b) sering, (c) cukup sering, (d) kurang sering, (e) tidak ada komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, terutama dalam memberi maupun menerima arahan.
164. Menciptakan hubungan baik antara sesama pimpinan, sesama petugas (staf) maupun pimpinan dengan petugas (staf) atau sebaliknya: (a) sangat sering, (b) sering, (c) cukup sering, (d) kurang sering, (e) tidak pernah ada menciptakan hubungan baik antara sesama pimpinan, sesama petugas (staf) maupun pimpinan dengan petugas (staf) atau sebaliknya.

C. Dimensi Evaluasi dan Pengawasan :

165. Pimpinan dengan masyarakat secara bersama-sama menetapkan ukuran-ukuran kemajuan pelaksanaan program pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan strategi: (a) sangat sering, (b) sering, (c) cukup sering, (d) kurang sering,

(e) tidak pernah ada menetapkan ukuran-ukuran kemajuan pelaksanaan program pembangunan.

166. Pimpinan dengan masyarakat secara bersama-sama melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan program pembangunan: (a) sangat sering, (b) sering, (c) cukup sering, (d) kurang sering, (e) tidak pernah ada melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan program pembangunan.

167. Pimpinan dengan masyarakat secara bersama-sama melakukan koreksi-koreksi terhadap setiap penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan program pembangunan: (a) sangat sering, (b) sering, (c) cukup sering, (d) kurang sering, (e) tidak pernah ada melakukan koreksi-koreksi terhadap setiap penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan program pembangunan.

III. Variabel Z : Keberhasilan Pembangunan Perdesaan.

A. Dimensi Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat :

168. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini masyarakat yang telah menerima pendidikan: (a) semuanya, (b) sebagian besar, (c) separohnya, (d) sebagian kecil, (e) tidak ada.

169. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini keadaan pendidikan masyarakat: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak baik.

170. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini kualitas pendidikan masyarakat: (a) sangat berkualitas, (b) berkualitas, (c) cukup berkualitas, (d) kurang berkualitas, (e) tidak berkualitas.

171. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini pengalaman masyarakat dalam berusaha/bekerja: (a) sangat berpengalaman, (b) berpengalaman, (c) cukup berpengalaman, (d) kurang berpengalaman, (e) tidak berpengalaman.
172. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini keterampilan masyarakat: (a) sangat terampil, (b) terampil, (c) cukup terampil, (d) kurang terampil, (e) tidak terampil.
173. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini kesehatan masyarakat: (a) sangat sehat, (b) sehat, (c) cukup sehat, (d) kurang sehat, (e) tidak sehat.
174. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini gizi makanan masyarakat: (a) sangat bergizi, (b) bergizi, (c) cukup bergizi, (d) kurang bergizi, (e) tidak bergizi.
175. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini pendidikan aparat desa: (a) sangat berpendidikan, (b) berpendidikan, (c) cukup berpendidikan, (d) kurang berpendidikan, (e) tidak berpendidikan.
176. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini pengalaman kerja aparat desa: (a) sangat berpengalaman, (b) berpengalaman, (c) cukup berpengalaman, (d) kurang berpengalaman, (e) tidak berpengalaman.
177. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini kepemimpinan kepala desa: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak baik.
178. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini sikap mental aparat desa: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak baik.

179. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini kedisiplinan aparat desa: (a) sangat berdisiplin, (b) berdisiplin, (c) cukup berdisiplin, (d) kurang berdisiplin, (e) tidak berdisiplin.

B. Dimensi Sosial Ekonomi Masyarakat :

180. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini pendapatan perorangan, keluarga dan masyarakat desa: (a) sangat tinggi, (b) tinggi, (c) cukup tinggi, (d) rendah, (e) tidak ada.

181. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini peluang masyarakat mendapatkan pekerjaan: (a) sangat terbuka, (b) terbuka, (c) cukup terbuka, (d) kurang terbuka, (e) tidak terbuka.

182. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini peluang masyarakat berusaha: (a) sangat terbuka, (b) terbuka, (c) cukup terbuka, (d) kurang terbuka, (e) tidak terbuka.

183. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini pengangguran di perdesaan: (a) tidak ada, (b) rendah, (c) cukup tinggi, (d) tinggi, (e) sangat tinggi.

184. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini produktivitas (hasil) usaha masyarakat: (a) sangat tinggi, (b) tinggi, (c) cukup tinggi, (d) rendah, (e) tidak ada.

C. Dimensi Kelengkapan Fasilitas Umum :

185. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bangunan PUSKESMAS/ balai kesehatan/ Posyandu: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada.

186. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini jumlah tenaga medis: (a) sangat terpenuhi, (b) terpenuhi, (c) cukup terpenuhi, (d) kurang terpenuhi, (e) tidak ada.
187. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini peralatan dan bahan kesehatan: (a) sangat lengkap/sangat tersedia, (b) lengkap/tersedia, (c) cukup lengkap/cukup tersedia, (d) kurang lengkap/kurang tersedia, (e) tidak ada.
188. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bangunan sekolah/madrasah: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada.
189. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini jumlah guru: (a) sangat terpenuhi, (b) terpenuhi, (c) cukup terpenuhi, (d) kurang terpenuhi, (e) tidak ada.
190. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini peralatan dan bahan sekolah:(a) sangat baik/lengkap, (b) baik/lengkap, (c) cukup baik/lengkap, (d) kurang baik/lengkap, (e) tidak ada.
191. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bangunan (tempat) pelatihan kerja: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada.
192. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini peralatan dan bahan pelatihan: (a) sangat baik/lengkap, (b) baik/lengkap, (c) cukup baik/lengkap, (d) kurang baik/lengkap, (e) tidak ada.
193. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bangunan mesjid/ mushalla: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak baik.
194. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bahan dan peralatan mesjid/mushalla: (a) sangat baik/lengkap,

- (b) baik/lengkap, (c) cukup baik/lengkap, (d) kurang baik/lengkap, (e) tidak ada.
195. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bangunan balai adat: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada.
196. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini peralatan dan bahan seni dan kebudayaan: (a) sangat baik/ lengkap, (b) baik/lengkap, (c) cukup baik/lengkap, (d) kurang baik/ lengkap, (e) tidak ada.
197. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bangunan KUD: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada.
198. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini peralatan dan bahan KUD: (a) sangat baik/lengkap, (b) baik/lengkap, (c) cukup baik/lengkap, (d) kurang baik/lengkap, (e) tidak ada.
199. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini manajemen (pengelolaan) KUD: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada.
200. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bangunan Bank Desa/BPR: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada.
201. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini peralatan dan bahan Bank Desa/BPR: (a) sangat baik/lengkap, (b) baik/lengkap, (c) cukup baik/lengkap, (d) kurang baik/ lengkap, (e) tidak ada.
202. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini manajemen (pengelolaan) Bank Desa/BPR: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada.

203. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bangunan pasar desa: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada.
204. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini peralatan dan bahan pasar desa: (a) sangat baik/lengkap, (b) baik/lengkap, (c) cukup baik/lengkap, (d) kurang baik/lengkap, (e) tidak ada.
205. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini peralatan dan bahan produksi dan distribusi (SAPRODI) : (a) sangat baik/lengkap, (b) baik/lengkap, (c) cukup baik/lengkap, (d) kurang baik/lengkap, (e) tidak ada.
206. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini listrik desa: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada.
207. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini media informasi seperti: koran, majalah, buku, dan brosur informasi iptek: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada.
208. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini penerimaan siaran pesawat televisi: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) siaran TV tidak dapat diterima.
209. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini penerimaan siaran pesawat radio: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) siaran radio tidak dapat diterima.
210. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini saluran pesawat telpon umum: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada saluran telpon.

211. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bangunan, perlengkapan dan bahan kantor desa: (a) sangat baik/lengkap, (b) baik/lengkap, (c) cukup baik/lengkap, (d) kurang baik/lengkap, (e) tidak ada.
212. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bangunan, perlengkapan dan bahan kantor LKMD: (a) sangat baik/lengkap, (b) baik/lengkap, (c) cukup baik/lengkap, (d) kurang baik/lengkap, (e) tidak ada.
213. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bangunan, perlengkapan dan bahan kantor LMD: (a) sangat baik/lengkap, (b) baik/lengkap, (c) cukup baik/lengkap, (d) kurang baik/lengkap, (e) tidak ada.
214. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini jumlah dan keadaan jembatan desa: (a) sangat memenuhi kebutuhan, (b) memenuhi kebutuhan, (c) cukup memenuhi kebutuhan, (d) kurang memenuhi kebutuhan, (e) tidak memenuhi kebutuhan.
215. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini panjang jalan dan lebar jalan desa: (a) sangat memenuhi kebutuhan, (b) memenuhi kebutuhan, (c) cukup memenuhi kebutuhan, (d) kurang memenuhi kebutuhan, (e) tidak memenuhi kebutuhan.
216. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini alat transportasi desa: (a) sangat memenuhi kebutuhan, (b) memenuhi kebutuhan, (c) cukup memenuhi kebutuhan, (d) kurang memenuhi kebutuhan, (e) tidak ada.
217. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini jumlah dan keadaan bangunan irigasi desa: (a) sangat memenuhi kebutuhan, (b) memenuhi kebutuhan, (c) cukup memenuhi kebutuhan, (d) kurang memenuhi kebutuhan, (e) tidak ada.

218. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini sumber air bersih: (a) sangat tersedia, (b) tersedia, (c) cukup tersedia, (d) kurang tersedia, (e) tidak tersedia.
219. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini taman hiburan/ tempat rekreasi: (a) sangat baik, (b) baik, (c) cukup baik, (d) kurang baik, (e) tidak ada.
220. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini bangunan, peralatan dan bahan pos ronda/ keamanan: (a) sangat baik/lengkap, (b) baik/lengkap, (c) cukup baik/lengkap, (d) kurang baik/lengkap, (e) tidak ada.

D. Dimensi Keadaan Lingkungan Hidup :

221. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini pencemaran udara di perdesaan: (a) tidak ada, (b) rendah, (c) cukup tinggi, (d) tinggi, (e) sangat tinggi.
222. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini kerusakan hutan dan atau hutan lindung perdesaan: (a) tidak ada, (b) rendah, (c) cukup tinggi, (d) tinggi, (e) sangat tinggi.
223. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini kerusakan tanah (pementasi) perdesaan: (a) tidak ada, (b) rendah, (c) cukup tinggi, (d) tinggi, (e) sangat tinggi.
224. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini pencemaran air di perdesaan: (a) tidak ada, (b) rendah, (c) cukup tinggi, (d) tinggi, (e) sangat tinggi.
225. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini kerusakan sosial atau penyakit sosial (gelandangan, pengemis, anak-anak nakal, anak-anak jalanan, dll.) di perdesaan: (a) tidak ada, (b) rendah, (c) cukup tinggi, (d) tinggi, (e) sangat tinggi.

E. Dimensi Keadilan Sosial Masyarakat:

226. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini kesempatan atau peluang berusaha masyarakat: (a) sangat terbuka, (b) terbuka, (c) cukup terbuka, (d) kurang terbuka, (e) tidak terbuka.
227. Sebagai keberhasilan pembangunan pada saat ini pemerataan pendapatan masyarakat:(a) sangat merata, (b) merata, (c) cukup merata, (d) kurang merata, (e) tidak merata.
228. Sebagai keberhasilan pembangunan pada saat ini pemerataan hasil-hasil pembangunan:(a) sangat merata, (b) merata, (c) cukup merata, (d) kurang merata, (e) tidak merata.
229. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini kesadaran dan tanggung jawab bersama masyarakat: (a) sangat tinggi, (b) tinggi, (c) cukup tinggi, (d) rendah, (e) tidak ada kesadaran/tanggungjawab.

F. Dimensi Partisipasi Masyarakat :

230. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pikiran dalam pengambilan keputusan: (a) sangat tinggi, (b) tinggi, (c) cukup tinggi, (d) rendah, (e) tidak ada.
231. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan tenaga dalam kegiatan gotong royong: (a) sangat tinggi, (b) tinggi, (c) cukup tinggi, (d) rendah, (e) tidak ada.
232. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dana (uang) dalam swadaya masyarakat: (a) sangat tinggi, (b) tinggi, (c) cukup tinggi, (d) rendah, (e) tidak ada.

233. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan: (a) sangat tinggi, (b) tinggi, (c) cukup tinggi, (d) rendah, (e) tidak ada.

G. Dimensi Pendapatan Keuangan Desa :

234. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini penggalan sumber-sumber penerimaan keuangan desa: (a) sangat tergali, (b) tergali, (c) cukup tergali, (d) kurang tergali, (e) tidak ada tergali.

235. Sebagai keberhasilan pembangunan, pada saat ini pendapatan keuangan desa: (a) sangat tinggi, (b) tinggi, (c) cukup tinggi, (d) rendah, (e) tidak ada.

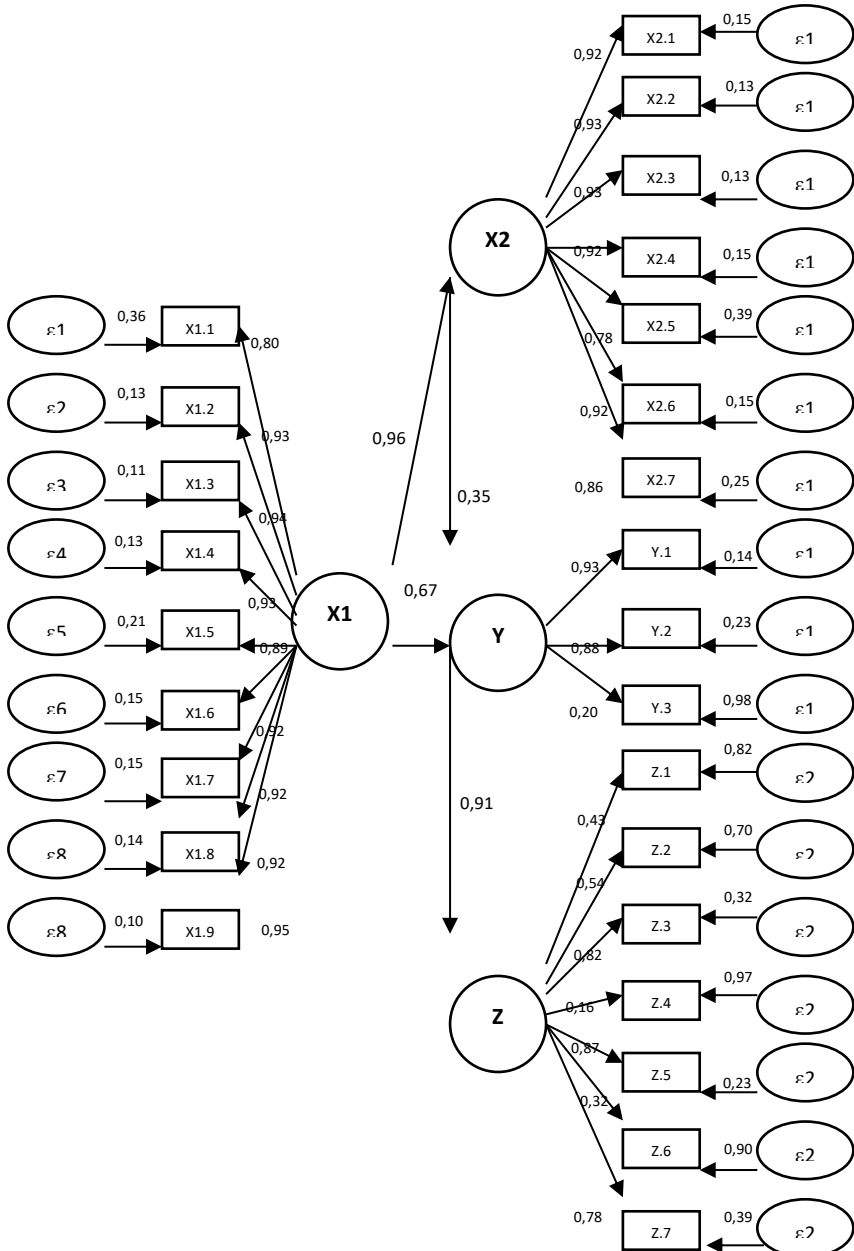
**DAFTAR PERTANYAAN TERBUKA
PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sistem perencanaan pembangunan perdesaan selama ini?
2. Apakah sebelum membuat perencanaan pembangunan perdesaan terlebih dulu mengumpulkan informasi dan data tentang situasi / kondisi internal (situasi / kondisi masyarakat setempat) ?
3. Apa saja potensi alam yang di data ?
4. Apa saja potensi masyarakat yang di data ?
5. Apa saja keadaan pemerintah desa yang di data ?
6. Apa saja sumber pendapatan desa yang di data ?
7. Apa saja kebutuhan masyarakat yang di data ?
8. Apakah sebelum membuat perencanaan pembangunan perdesaan terlebih dahulu mengumpulkn informasi dan data tentang situasi-kondisi eksternal (situasi-kondisi di luar masyarakat setempat ?
Kalau ya apa saja informasi dan data yang dikumpulkan ?
9. Apa saja kebijaksanaan pemerintah yang di data ?
10. Apa saja kebutuhan pasar dari sumber perdesaan yang di data ?
11. Apa saja perkembangan teknologi yang di data ?
12. Apa saja investasi dari pemerintah dan swasta nasional yang di data?
13. Dalam proses perencanaan pembangunan perdesaan selama ini,
 - a. Apakah Organisasi perencanaan telah ada perwakilan unsur masyarakat ?
 - b. Unsur pemerintah ?
 - c. Ketersediaan bahan dan kelengkapan data ?
 - d. Keputusan yang sesuai dengan situasional desa ?
 - e. Keputusan berlangsung secara demokrasi ?
14. Apa saja yang menjadi tujuan dalam proses perencanaan pembangunan perdesaan ?

15. Apa saja yang menjadi sasaran dalam proses perencanaan pembangunan perdesaan ?
16. Apa saja yang menjadi program pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan perdesaan ?
17. Apakah organisasi pelaksanaan yang ditunjuk melaksanakan program ?
 - a. Kejelasan kelembagaan yang melaksanakan program ?
 - b. Kejelasan metoda atau tata kerjanya ?
 - c. Kejelasan target-target yang ingin di capai ?
 - d. Apakah prosedurnya jelas ?
18. Apakah sumber-sumber yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan perdesaan sudah jelas ?
19. Supaya pencapaian tujuan pembangunan efektif, sedangkan kondisi-kondisi di masa yang akan datang sulit diramalkan, maka perencanaan selalu dihadapkan pada pemilihan berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. Bagaimana pemilihan alternatif dalam mencapai tujuan ?
20. Dalam implementasi program pembangunan, bagaimana pengorganisasiannya?
21. Bagaimana pula pergerakan dalam kegiatan pembangunan perdesaan?
22. Bagaimana pula kegiatan pengawasan pembangunan ?
23. Sebagai realisasi pembangunan perdesaan, bagaimana kualitas S.D.M masyarakat ?
24. Bagaimana pula kemajuan sosial ekonomi masyarakat ?
25. Bagaimana pula kelengkapan:
 - a. Fasilitas Kesehatan ?
 - b. Fasilitas Pendidikan ?
 - c. Fasilitas Keagamaan ?
 - d. Fasilitas Adat-istiadat ?
 - e. Fasilitas Ekonomi masyarakat ?
 - f. Fasilitas Penerangan ?
 - g. Fasilitas Media Informasi ?
 - h. Fasilitas Pemerintahan ?
 - i. Fasilitas Jalan dan Jembatan ?
 - j. Fasilitas Transportasi ?

- k. Fasilitas Pengelolaan Pertanian
 - l. Fasilitas Irigasi ?
 - m. Fasilitas Air Bersih ?
 - n. Fasilitas Hiburan dan Rekreasi ?
 - o. Keamanan dan Ketahanan Masyarakat ?
26. Bagaimana tingkat kerusakan lingkungan hidup ?
 - a. Pencemaran udara ?
 - b. Kerusakan hutan ?
 - c. Kerusakan tanah ?
 - d. Pencemaran air ?
 - e. Bagaimana kondisi sosial, anak nakal, gelandangan atau anak jalanan ?
 27. Bagaimana tingkat keadilan sosial dalam masyarakat?
 28. Bagaimana Pelayanan pemenuhan kebutuhan sosial dan budaya ?
 29. Bagaimana partisipasi tingkat masyarakat ?
 30. Bagaimana pendapatan keuangan desa ?

Lampiran 6. Path Diagram Structural Equation Modeling (SEM) atau Model Persamaan Struktural Sistem Terbuka Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan Perdesaan yang Kontekstual di Riau



Keterangan :

X : Variabel Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan Perdesaan (Variabel Bentukuan/*Latent Variables*)

X1 : Sub Variabel Pra Kondisi Perencanaan Strategis Pembangunan Perdesaan (Sub Variabel Bentukuan)

X2 : Sub Variabel Perumusan Rencana Strategis Pembangunan Perdesaan (Sub Variabel Bentukuan)

Y : Variabel Implementasi Program Pembangunan Perdesaan (Variabel Bentukuan/*Latent Variables*)

Z : Variabel Keberhasilan Pembangunan Perdesaan (Variabel Bentukuan/*Latent Variables*)

X1.1 sampai dengan X1.9 : Dimensi-dimensi Sub Variabel Pra Kondisi Perencanaan Strategis Pembangunan Perdesaan (Variabel Terobservasi/*Observed Variable*)

X2.1 sampai dengan X2.7 : Dimensi-dimensi Sub Variabel Perumusan Rencana Strategis Pembangunan Perdesaan (Variabel Terobservasi/*Observed Variable*)

Y.1 sampai dengan Y.3 : Dimensi-dimensi Variabel Implementasi Program Pembangunan Perdesaan (Variabel Terobservasi/*Observed Variable*)

Z.1 sampai dengan Z.7 : Dimensi-dimensi Variabel Keberhasilan Pembangunan Perdesaan (Variabel Terobservasi/*Observed Variable*)

————→ : panah dari lingkaran ke lingkaran, merupakan hubungan pengaruh antara variabel.

———:→ panah dari lingkaran ke kotak, merupakan dimensi-dimensi bagian dari variabel.

Lampiran 7. Tabel Nilai Uji Kesesuaian (*Goodness-of-fit Indices*) dari Sistem Terbuka Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan Perdesaan yang Kontekstual di Riau.

<i>Goodness-of-fit Index</i>	<i>Cut-off Value</i>	Hasil Model	Keterangan
χ^2 -Chi-Squarey	-	3566,15	Diharapkan Nilai Kecil
Derajat Bebas, df	-	271	-
χ^2 -Significance Probability	$\geq 0,05$	0,241	Baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0,192	Cukup Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,952	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,938	Baik
Relative χ^2 (CMIN/DF)	$\leq 2,00$	1,639	Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,981	Baik
CFI	$\geq 0,94$	0,995	Baik

Keterangan :

RMSEA = *The Root Mean Square Error of Approximation* atausebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi *Chi-Squarey Statistic*

GFI = *Goodness of Fit Index* yaitu indeks kesesuaian

AGFI = *Adjusted Goodness-of-Fit Index* sama dengan R^2 dalam regresi berganda yaitu untuk menguji diterima tidaknya model

CMIN/DF = *The Minimum Sample Discrepancy Function* dibagi dengan *Degree of Freedom* yaitu sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat fitnya sebuah model.

TLI = *Tucker Lewis Index* adalah nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model

CFI = *Comparative Fit Index* yaitu indeks untuk mengukur tingkat penerimaan sebuah model

Kesimpulan Uji Kesesuaian Model :

Dari hasil Nilai Uji Kesesuaian (*Goodness-of-fit Indices*) dalam tabel tersebut di atas ternyata Sistem Terbuka Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan Perdesaan yang Kontekstual di Riau dapat diterima atau dapat dikatakan memiliki sebuah makna

tertentu yang disebut *unidimensionalitas* atau fenomena yang unidimensi sebagai suatu konsep baru yang telah teruji secara faktual berdasarkan data empirik.

Lampiran 8. Tabel 9.1. Hasil Uji hipotesis dan Besar Pengaruh Setiap Variabel, Sub Variabel dan Dimensi dalam proses pemodelan Sistem Terbuka Perencanaan Strategis Pembangunan Perdesaan yang Kontekstual

Regression Weight	Estimates	Standard Error	Standardized Estimates (R) ²	T-Values	P-Values	Hubungan Pengaruh	Hipotesis
$X \rightarrow Y = \beta$	0,82	0,00	0,6642	10,63	0,000	Positif & Sign.	H 1: Diterima
$X1 \rightarrow X2 = \beta_1$	0,96	0,00	0,9216	13,31	0,000	S.Positif & Sign.	Sub H 1: Diterima
$X1 \rightarrow Y = \beta_2$	0,67	0,00	0,4489	7,95	0,000	C.Positif & Sign.	Sub H 2 : Ditolak
$X1.1 \leftarrow X1 = \lambda_{1.1}$	0,84	0,36	0,6400	17,56	0,000	Positif & Sign.	-
$X1.2 \leftarrow X1 = \lambda_{1.2}$	0,98	0,13	0,8649	22,59	0,000	S.Positif & Sign.	-
$X1.3 \leftarrow X1 = \lambda_{1.3}$	0,99	0,11	0,8836	22,98	0,000	S.Positif & Sign.	-
$X1.4 \leftarrow X1 = \lambda_{1.4}$	0,98	0,13	0,8649	22,48	0,000	S.Positif & Sign.	-
$X1.5 \leftarrow X1 = \lambda_{1.5}$	0,93	0,21	0,7921	20,69	0,000	Positif & Sign.	-
$X1.6 \leftarrow X1 = \lambda_{1.6}$	0,97	0,15	0,8464	22,04	0,000	S.Positif & Sign.	-
$X1.7 \leftarrow X1 = \lambda_{1.7}$	0,97	0,15	0,8464	22,00	0,000	S.Positif & Sign.	-
$X1.8 \leftarrow X1 = \lambda_{1.8}$	0,97	0,14	0,8464	22,17	0,000	S.Positif & Sign.	-
$X1.9 \leftarrow X1 = \lambda_{1.9}$	0,99	0,10	0,9025	23,19	0,000	S.Positif & Sign.	-
$X2 \rightarrow Y = \beta_3$	0,35	0,00	0,1225	5,17	0,000	S.K.Positif & Sign.	Sub H 3: Diterima
$X2.1 \leftarrow X2 = \lambda_{2.1}$	0,97	0,15	0,8464	15,78	0,000	S.Positif & Sign.	-
$X2.2 \leftarrow X2 =$	0,98	0,13	0,8649	15,87	0,000	S.Positif &	-

$\lambda_{2.2}$						Sign.	
$X_{2.3} \leftarrow X_{2.2} = \lambda_{2.3}$	0,98	0,13	0,8649	15,87	0,000	S.Positif & Sign.	-
$X_{2.4} \leftarrow X_{2.2} = \lambda_{2.4}$	0,97	0,15	0,8464	15,78	0,000	S.Positif & Sign.	-
$X_{2.5} \leftarrow X_{2.2} = \lambda_{2.5}$	0,82	0,39	0,6084	13,50	0,000	Positif & Sign.	-
$X_{2.6} \leftarrow X_{2.2} = \lambda_{2.6}$	0,97	0,15	0,8464	15,77	0,000	S.Positif & Sign.	-
$X_{2.7} \leftarrow X_{2.2} = \lambda_{2.7}$	0,91	0,25	0,7396	14,85	0,000	Positif & Sign.	-
$Y \rightarrow Z = \beta_4$	0,91	0,00	0,8281	10,50	0,000	S.Positif & Sign.	H ₂ : Diterima
$Y_1 \leftarrow Y = \lambda_1$	0,97	0,14	0,8649	10,85	0,000	S.Positif & Sign.	-
$Y_2 \leftarrow Y = \lambda_2$	0,92	0,23	0,7744	10,69	0,000	Positif & Sign.	-
$Y_3 \leftarrow Y = \lambda_3$	0,24	0,98	0,0400	3,17	0,000	S.K.Positif & Sign.	-
$Z_1 \leftarrow Z = \lambda_1$	0,45	0,82	0,1849	7,29	0,000	S.K.Positif & Sign.	-
$Z_2 \leftarrow Z = \lambda_2$	0,57	0,70	0,2916	9,04	0,000	K.Positif & Sign.	-
$Z_3 \leftarrow Z = \lambda_3$	0,86	0,32	0,6724	12,80	0,000	Positif & Sign.	-
$Z_4 \leftarrow Z = \lambda_4$	0,17	0,97	0,0256	2,82	0,000	S.K.Positif & Sign.	-
$Z_5 \leftarrow Z = \lambda_5$	0,92	0,23	0,7569	13,26	0,000	Positif & Sign.	-
$Z_6 \leftarrow Z = \lambda_6$	0,33	0,90	0,1024	5,44	0,000	S.K.Positif & Sign.	-
$Z_7 \leftarrow Z = \lambda_7$	0,82	0,39	0,6084	12,30	0,000	Positif & Sign.	-

Keterangan :

Hubungan pengaruh antara variabel, sub variabel, dan dimensi dinyatakan signifikan, apabila *Critical Ratio (t-values)* tidak sama dengan 0 (*p-values*).

S.Positif & Sign. = Sangat Positif dan Signifikan

Positif & Sign. = Positif dan Signifikan

- C. Positif & Sign. = Cukup Positif dan Signifikan
K. Positif & Sign. = Kurang Positif dan Signifikan
S. K. Positif & Sign. = Sangat Kurang Positif dan Signifikan